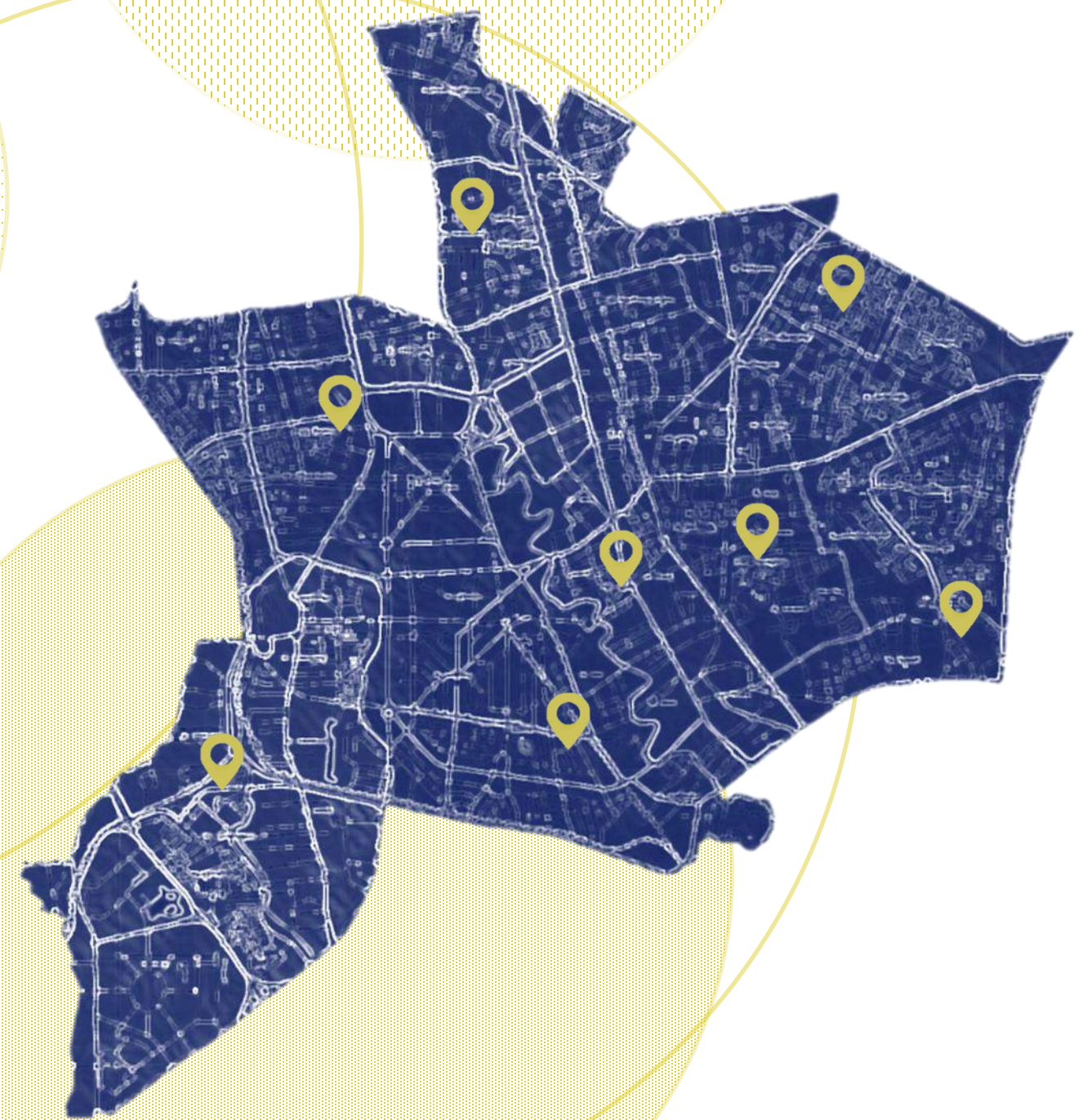




LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Administrasi Jakarta Pusat

LKIP 2024 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Bagian Kepegawaian,
Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik
Setko Administrasi Jakarta Pusat

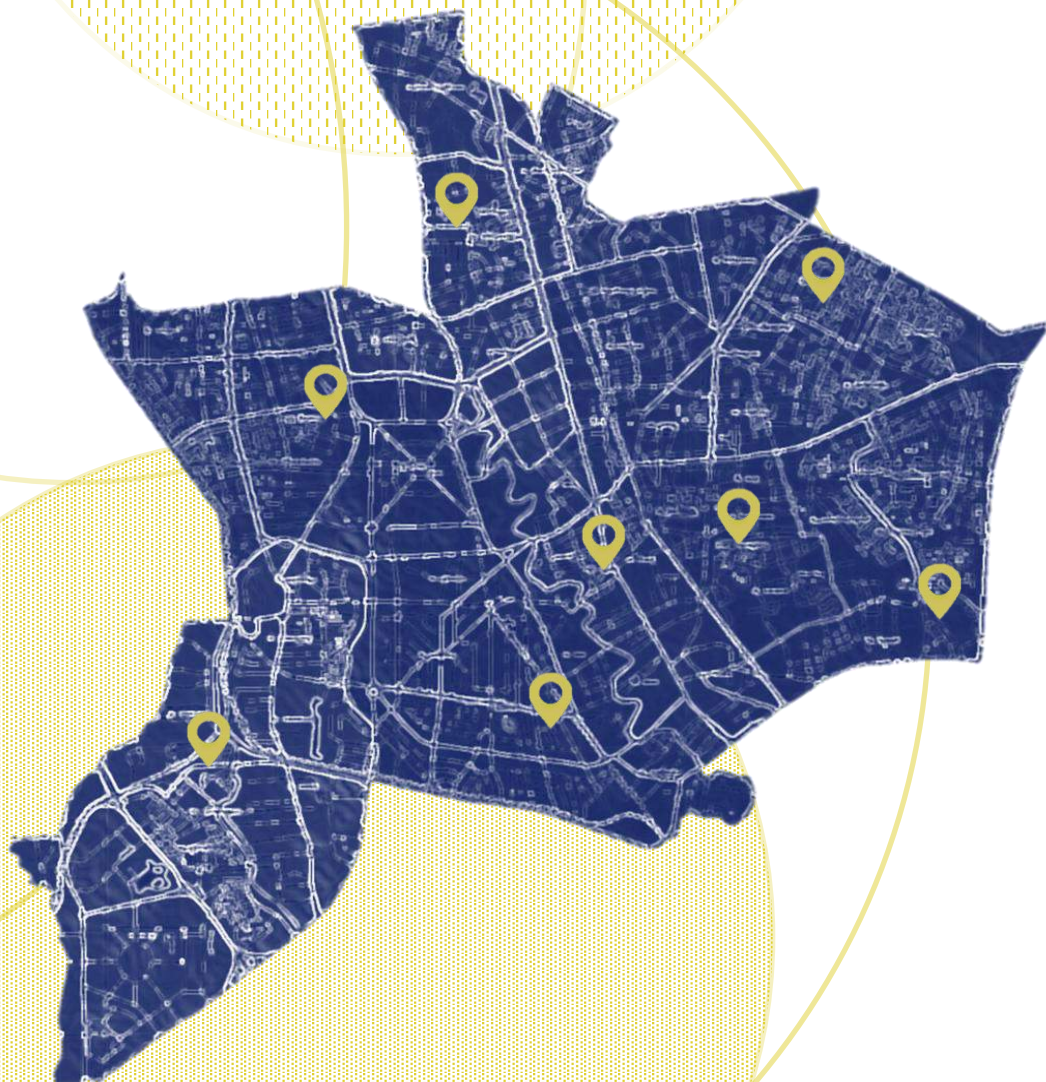
Email:
tatalaksana.jakpus@gmail.com





LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Administrasi Jakarta Pusat





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	j
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	k
PENDAHULUAN	
LATAR BELAKANG.....	1
TUJUAN DAN MANFAAT	2
GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	2
GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	6
Kedudukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	6
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat	6
Susunan Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat	8
ISU STRATEGIS.....	10
Ringkasan IKU Periode 2017-2022	10
Isu Strategis 2023-2026	13
SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	16
Sumber Daya Manusia	16
Sumber Daya Sarana dan Prasarana	19
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL.....	26
SISTEMATIKA PENYUSUNAN	35
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026.....	40
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	42
RENCANA KERJA TAHUN 2024	45
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2024	63
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	70
ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN PER SASARAN.....	71
INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	71
Sasaran 1: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal.....	71
Sasaran 2: Meningkatnya kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal.....	74

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	74
Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	82
Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi	89
Analisa Program dan Kegiatan/ KSD Pendukung	89
Faktor Keberhasilan atau Kegagalan Indikator Kinerja Utama	92
Rencana Aksi di Tahun yang Akan Datang	94
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	96
Penghargaan Dalam Pencapaian IKU	106
SASARAN KHUSUS	111
Sasaran 3: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah.....	111
Sasaran 4: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas.....	112
Sasaran 5: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.....	114
Sasaran 6: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel.....	114
Sasaran 7: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.....	115
Sasaran 8: Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun.....	116
Sasaran 9: Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	119
Sasaran 10: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.....	119
Sasaran 11: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	120
SASARAN OPERASIONAL	122
Sasaran 12: terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur.....	122
Sasaran 13: Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	123
Sasaran 14: Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	123
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	127
Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2024	128
PENGARUH IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA	136
INOVASI	142
KESIMPULAN	147
SARAN	148
PENGHARGAAN	v

KUESIONER.....	xviii
DATA PENDUKUNG	xxix

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah data pegawai Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian KKPP, Desember 2024)	16
Tabel 2 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Tahun 2024 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)	18
Tabel 3 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2024 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)	18
Tabel 4 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)	19
Tabel 5 Jumlah bangunan kantor di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2024)	21
Tabel 6 Jumlah bangunan rumah dinas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2024)	23
Tabel 7 Jumlah RPTRA di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, 2024)..	24
Tabel 8 Jumlah Eksisting Petugas PPSU Kelurahan per Desember 2024 (sumber: Kelurahan Kota Adm Jakarta Pusat)	26
Tabel 9 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal Tahun 2024	34
Tabel 10 Tujuan dan Sasaran Dimensi Pemerintahan (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)	40
Tabel 11 Tujuan dan sasaran Kota Administrasi 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)	41
Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024.....	42
Tabel 13 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024	43
Tabel 14 Rincian 14 (empat belas) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator kinerja 2024.....	64
Tabel 15 Skala Nilai Peringkat Kerja (sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan penyesuaian)	64
Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Utama dan tambahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024	65
Tabel 17 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024	66
Tabel 18 Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024.....	67
Tabel 19 Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)	72

Tabel 20 Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat per-semester Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)	72
Tabel 21 Perbandingan Capaian Kinerja tujuan strategis periode sebelumnya diwakili Tahun 2021-2022 dengan Tahun 2023 -2024	73
Tabel 22 Perbandingan target Indeks kepuasan layanan kota administrasi dengan target dalam RPD 2023-2026	73
Tabel 23 Perbandingan dengan kota dan kabupaten administrasi; dan standar nasional 2024	74
Tabel 24 Realisasi Indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)	75
Tabel 25 Realisasi Indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)” Kota Administrasi Jakarta Pusat Semester I dan II Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)	75
Tabel 26 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2018-2022	75
Tabel 27 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2023-2024	76
Tabel 28 Tabel Nilai IKM (PermanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	78
Tabel 29 Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain serta nilai IKM beberapa kota di Indonesia (sumber: monev2024.bapedadki.net/ dan hasil pencarian melalui internet)	79
Tabel 30 Unsur Pelayanan	80
Tabel 31 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 (diolah UPT Pengelola Statistik, 2024)	81
Tabel 32 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)	82
Tabel 33 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)	83
Tabel 34 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” per-Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)	83
Tabel 35 Nilai efektivitas koordinasi bidang Pemerintahan per-variabel Tahun 2024 (sumber: Dinas Kominfo JP)	84
Tabel 36 Nilai efektivitas koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan per-variabel Tahun 2024 (sumber: Dinas Kominfo JP)	85

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Tabel 37 Nilai efektivitas koordinasi bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat per-variabel Tahun 2024 (sumber: Dinas Kominfo JP)	87
Tabel 38 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023-2024 dibandingkan periode sebelumnya (sumber: monev2024.bapedadki.net/).....	87
Tabel 39 Perbandingan target Indeks efektivitas koordinasi dengan target dalam RPD 2023-2026	88
Tabel 40 Perbandingan dengan standar nasional 2024	88
Tabel 41 Program dan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024.....	90
Tabel 42 Target dan Realisasi KSD Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024	91
Tabel 43 Rencana Aksi JPT Tahun 2025.....	96
Tabel 44 Pengisian formasi jabatan untuk pengangkatan Tahun 2025.....	97
Tabel 45 Hasil redistribusi pegawai selama tahun 2023	98
Tabel 46 pengikutsertaan diklat pegawai 2024.....	99
Tabel 47 konsolidasi JF di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022.....	105
Tabel 48 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program Tahun 2024.....	111
Tabel 49 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program Tahun 2020-2024.....	112
Tabel 50 Realisasi Indikator kinerja Nilai Kualitas data SDI Tahun 2024	113
Tabel 51 Daftar Data Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai Kepgub Nomor 61/ 2024	114
Tabel 52 Realisasi Indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2024.....	114
Tabel 53 Realisasi Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang	115
Tabel 54 Realisasi Indikator kinerja Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri 2023-2024.....	116
Tabel 55 Realisasi Indikator kinerja Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun 2023-2024.....	117
Tabel 56 Realisasi indikator kinerja Persentase penyelesaian tahapan Manajemen Pengetahuan 2023-2024	119
Tabel 57 Realisasi indikator kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko 2023-2024	120

Tabel 58 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Tahun 2023-2024.....	121
Tabel 59 Realisasi Indikator Kinerja Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur Tahun 2024	122
Tabel 60 Capaian Kinerja Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2024.....	122
Tabel 61 Realisasi Indikator Kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat Tahun 2024	123
Tabel 62 Capaian Kinerja Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2024.....	123
Tabel 63 Realisasi Indikator Kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2024	124
Tabel 64 Capaian Kinerja Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2024.....	124
Tabel 65 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2024.....	126
Tabel 66 Perbandingan Rata-rata Capaian Sasaran Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2024	126
Tabel 67 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024	128
Tabel 68 Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024	129
Tabel 69 Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 berdasarkan Program	130
Tabel 70 Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.....	130
Tabel 71 Efisiensi output program.....	131
Tabel 72 Analisa Capaian Output Program Anggaran Tahun 2024.....	134
Tabel 73 Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	135
Tabel 74 Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi 2024 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	136
Tabel 75 Perbandingan Rincian Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 dengan Provinsi DKI Jakarta (sumber: ACT).....	140
Tabel 76 Inovasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	143

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Persentase keterisian eselon 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: Bagian KKPP)	16
Grafik 2 Persentase keterisian pegawai bagian-bagian di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber Bagian KKPP)	17
Grafik 3 Persentase keterisian pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: Bagian KKPP)	17
Grafik 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, Sasaran Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: Data diolah Bagian KKPP, 2025)	66
Grafik 5 Capaian seluruh Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024	69
Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024	71
Grafik 7 Tren Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Adm Jakarta Pusat Tahun 2018-2024	76
Grafik 8 Jumlah pegawai Sekretariat, kecamatan, dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 2020-2024 (Sumber data: Bagian KKPP, 2024)	96
Grafik 9 Capaian Indikator kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2024	121
Grafik 10 Perbandingan realisasi Sasaran Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2024	127
Grafik 11 Realisasi dan Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024.....	128
Grafik 12 Realisasi Belanja Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024	129
Grafik 13 konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.....	131
Grafik 14 Perbandingan Indeks Implementasi BerAKHLAK 2023 Provinsi DKI Jakarta dan beberapa PD (sumber: ACT)	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Luas wilayah dan rata-rata ketinggian di atas permukaan laut (mdpl), berdasarkan Kecamatan (sumber Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan BPS Jakarta Pusat)	3
Gambar 2 Infografis penduduk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: Sudin Dukcapil JP) ...	5
Gambar 3 Struktur Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pergub 57/2022)	9
Gambar 4 Skema keterkaitan tujuan Kota Administrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026).....	41
Gambar 5 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I, 2024 (sumber: Kelurahan Kwitang)	76
Gambar 6 Tim Penggerak PKK Kelurahan melakukan monitoring Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) (sumber: PKK Kelurahan Cideng)	77
Gambar 7 Area RPTRA Harapan Mulya yang dijadikan tempat ketahanan pangan keluarga dan sarana pengetahuan bagi anak (sumber: Sudin Kominfotik JP)	77
Gambar 8 Monitoring pemberantasan sarang nyamuk (PSN), Kelurahan Kwitang (sumber Sudin Kominfotik Kota Adm JP).....	78
Gambar 9 Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Posyandu Melati RW 08 Kelurahan Tanah Tinggi (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP).....	78
Gambar 10 Penertiban bangunan liar dan lapak PKL Kelurahan Petojo Utara (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP)	79
Gambar 11 Penataan kawasan oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Petamburan (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP)	79
Gambar 12 Penilaian RT/ RW terkait administrasi kependudukan tingkat kelurahan (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP).....	79
Gambar 13 Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Wilayah Semester 1 Tahun 2024	80
Gambar 14 Rapat Koordinasi bidang Asisten Pemerintahan Sekko Adm Jakarta Pusat TW I Tahun 2024 (sumber: Bagian KKPP).....	84
Gambar 15 Rapat Koordinasi bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan I Tahun 2024 (sumber: bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup).....	86
Gambar 16 Rapat Koordinasi bidang Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan II Tahun 2024 (sumber: bagian Kesejahteraan Rakyat)	87
Gambar 17 Juara I Tingkat Nasional Lomba Vlog Pokja IV: TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Sudin Kominfotik JP).....	106
Gambar 18 Juara Terbaik ke-2 Nasional Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (sumber: Sudin Kominfotik JP).....	107

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Gambar 19 Posyandu Inovasi Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2024: Posyandu Mawar Melati Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih (sumber: Sudin Kominfo JP)	107
Gambar 20 Juara 1 Kader Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2024: Melita Selviasari (Posyandu Aster 7c kelurahan Cideng) (sumber: Sudin Kominfo JP)	107
Gambar 21 Kampung Bali mendapatkan Penghargaan Penataan Kawasan Terbaik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (sumber: Sudin Kominfo JP)	108
Gambar 22 Kelurahan Paseban menjadi kelurahan terbaik dalam rangka penataan kawasan di wilayah Jakarta Pusat (Apresiasi dan Evaluasi Kinerja Kewilayahan bagi Camat dan Lurah di Desember 2024) (sumber: Sudin Kominfo JP).....	108
Gambar 23 Paralegal Justice Award 2024 Kategori Non Litigation Peace Maker (sumber: Sudin Kominfo JP) ...	108
Gambar 24 Penghargaan dari KPU DKI Jakarta atas suksesnya Pemilu Tahun 2024.....	109
Gambar 25 penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024 dengan nilai 97,98 masuk Zona Hijau Kualitas Tertinggi	109
Gambar 26 Penghargaan PEKPPP oleh KemenPAN dan RB Tahun 2024.....	109
Gambar 27 Walikota Administrasi Jakarta Pusat menerima Pin Siddhakarya Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta, Siddhakarya merupakan penghargaan tertinggi Tingkat Provinsi di bidang produktivitas (sumber: Sudin Kominfo JP)	110
Gambar 28 Kelurahan Kebon Kosong meraih Juara 4 Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2024 (sumber: Bagian Pemerintahan JP).....	110
Gambar 29 Lomba RT/ RW Terbaik Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun 2024 (sumber: Bagian Pemerintahan JP)	110
Gambar 30 Kegiatan Penanganan Angka Stunting.....	111
Gambar 31 Kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa KIP B peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.....	115
Gambar 32 Peringkat Pertama Kategori Kota/ Kabupaten dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	116
Gambar 33 Sistem Jakarta U-learning (SiJule).....	118
Gambar 34 Podcast Rabu Belajar	118
Gambar 35 Rangkuman data pengembangan kompetensi pegawai Sekretariat, Kecamatan, dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024	118
Gambar 36 Knowledge Center BPSDM DKI	119
Gambar 37 Pelatihan Pencapaian Indeks Berakhlak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	142

Gambar 38 Inovasi Dadu, Dunia Anak Terpadu dari RPTRA Planet Senen (sumber: Sudin Kominfo Kota Adm JP)
.....143

Gambar 39 Inovasi Hyminaphogot Kelurahan Harapan Mulya Raih Juara 2 Dalam Ajang Jakarta Innovation Award
2024143



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam periode peralihan 2023-2026 LKIP merupakan dokumen informasi akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah direncanakan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap tahunnya.

Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dalam merealisasikan target kinerja kota. Hendaknya kita semua dapat terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang dengan kerja sama dan koordinasi yang lebih baik.

Akhir kata, kepada semua pihak yang berkepentingan dalam tersusunnya laporan ini, diharapkan adanya masukan dan umpan balik guna perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat ke depan.

Jakarta, 31 Januari 2025
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



ARIFIN
NIP 197206221992031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam Dokumen RPD 2023-2026, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi unik sebagai pengelola wilayah Kota memiliki peran dalam memastikan kebijakan provinsi terimplementasi dengan baik di wilayahnya. Agar bisa menampilkan kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan lebih komprehensif dan sesuai asas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely), dirumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis baru untuk Kota/ Kabupaten Administrasi di Jakarta yang menampilkan fungsinya sebagai koordinator suku dinas dan suku badan di tingkat kota/ kabupaten. Selain itu untuk memberikan tantangan pada kinerja Walikota dalam pemberian layanan kepada masyarakat, pada Survei Kepuasan Masyarakat ditambahkan satu komponen baru sehingga komponen yang disurvei menjadi tujuh komponen yaitu PKK, Jumantik, Posyandu, PPSU, RPTRA, Ketertiban Umum, dan pengelolaan kelurahan (RT, RW, LMK, FKDM).

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2023-2026 menjadi:

- Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal, indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi”
- Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal, indikator kinerjanya “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan” dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi”

Selain capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di atas, LKIP ini juga menjabarkan pencapaian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam sasaran lain yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang bersama dengan tujuan dan sasaran strategis menjadi total 14 sasaran dan 15 indikator kinerja dengan rata-rata realisasi di Tahun 2024 mencapai target.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 mencapai target dengan capaian indikator kepuasan layanan kota administrasi sebesar 104.08%, capaian indikator kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan sebesar 101.5%, dan capaian Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi sebesar 106.86%.

Sasaran khusus dan Sasaran operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 juga mencapai target dengan capaian rata-rata 100%.


Guna mendukung IKU dan sasaran lain pada Perjanjian Kinerja dianggarkan dalam 5 program dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 773.301.068.379, adapun dengan tahun berjalan terdapat perubahan menjadi Rp. 779.977.900.621 dan realisasi akhir sebesar Rp. 746.367.815.588.

Berdasarkan perhitungan menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, didapatkan bahwa penyerapan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 95,69%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan di angka 73,14%, capaian output program 100%, nilai efisiensi 60,87%, nilai kinerja atas aspek implementasi 27,81%, nilai kinerja atas aspek manfaat 66,70%, dan nilai kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat berada pada angka 94,51%.

Pencapaian tersebut menunjukkan Budaya Kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sudah berjalan dengan cukup baik di mana pegawai Sekretariat, Kecamatan, Kelurahan telah memiliki visi yang sejalan sebagai satu Perangkat Daerah besar dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menunjang keberhasilan organisasi tempatnya bernaung.

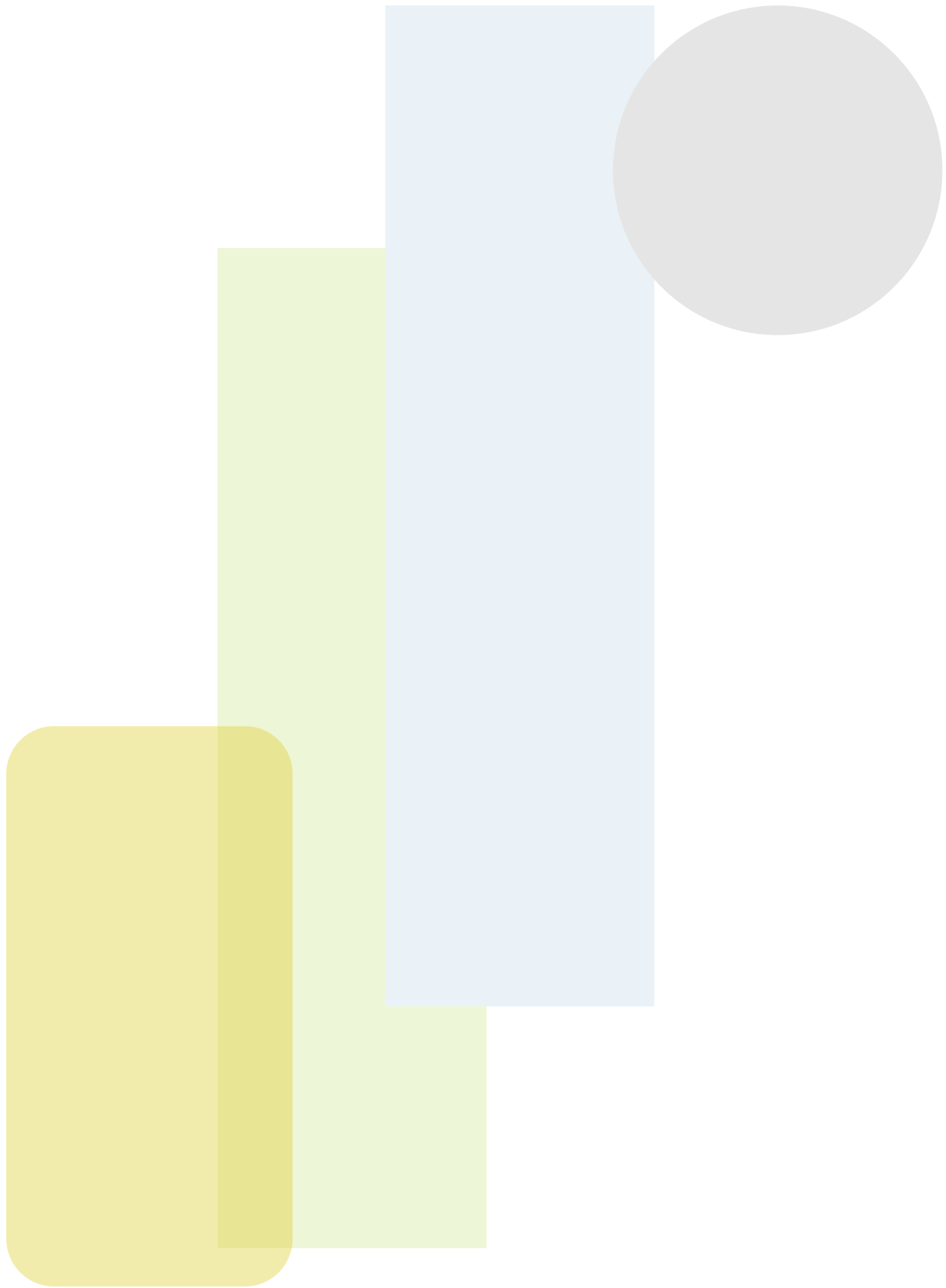
Dalam pencapaian kinerja tersebut Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus berkomitmen melakukan perbaikan manajemen dan akuntabilitas kinerja sehingga dapat meningkatkan layanannya sebagai pengelola wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini tercermin dari perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU), efisiensi sumber daya dan anggaran, dan pencapaian target Manajemen Risiko. Selain itu Kota Administrasi Jakarta Pusat mendukung secara aktif kebijakan pengimplementasian Budaya Kerja yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dengan mengikuti kegiatan diskusi/ workshop/ survei untuk semakin menanamkan budaya kerja ASN Berakhlak di diri masing-masing pegawai di lingkungannya.

Tahun 2025 kinerja baik harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan guna menjawab tantangan-tantangan di depan sebagai bagian dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan Jakarta Global City.

- **LATAR BELAKANG**
 - **TUJUAN DAN MANFAAT**
 - **GAMBARAN UMUM WILAYAH**
 - **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**
 - **ISU STRATEGIS**
 - **SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**
 - **TINDAK LANJUT EVALUASI INTERNAL**
 - **SISTEMATIKA PENYUSUNAN**
- 



BAB I: PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Reformasi administrasi publik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan konsep yang mencakup dua hal utama yaitu struktur dan prosedur serta sikap dan perilaku birokrat. Berdasarkan pedoman umum yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sasaran umumnya adalah mengubah pola pikir, budaya kerja, dan sistem manajemen pemerintahan menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai amanat yang harus dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat kota-kota besar hampir di seluruh dunia. Komitmen tersebut tertuang dalam TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. Di samping itu dinyatakan pula bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan kesadaran ini, Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai amanat yang harus

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban setiap kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat harus dilakukan secara benar, jelas, dan teratur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bertujuan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat di tahun 2024. Manfaatnya adalah, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selama tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di masa yang akan datang;
3. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terlaksananya pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah salah satu wilayah kota administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 106° 58' 18" BT dan 5° 19' 12" LS sampai dengan 6° 23' 54" LS, dengan perbatasan wilayah :

- Arah utara berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat (Jalan Sunter Raya, Jalan Taman Sari, dan Jalan Zainul Arifin);
- Arah selatan berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jalan Jenderal Sudirman, Kali Banjir Kanal, Kali Ciliwung, dan Jalan Pramuka);
- Arah barat berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan (Jalan KS Tubun dan Kali Grogol);
- Arah timur berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Timur (bypass Jalan Jenderal Achmad Yani).

Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas wilayah 47,93 km² dengan rata-rata ketinggian 7,9 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar terdiri dari tanah daratan relatif landau dengan belahan kontur yang tinggi di sepanjang Kali Banjir Kanal.

Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Pusat dibagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 44 (empat puluh empat) Kelurahan, 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Rukun Warga/RW, dan 4.533 (empat ribu lima ratus tiga puluh tiga) Rukun Tetangga/RT.



Gambar 1 Luas wilayah dan rata-rata ketinggian di atas permukaan laut (mdpl), berdasarkan Kecamatan (sumber Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan BPS Jakarta Pusat)

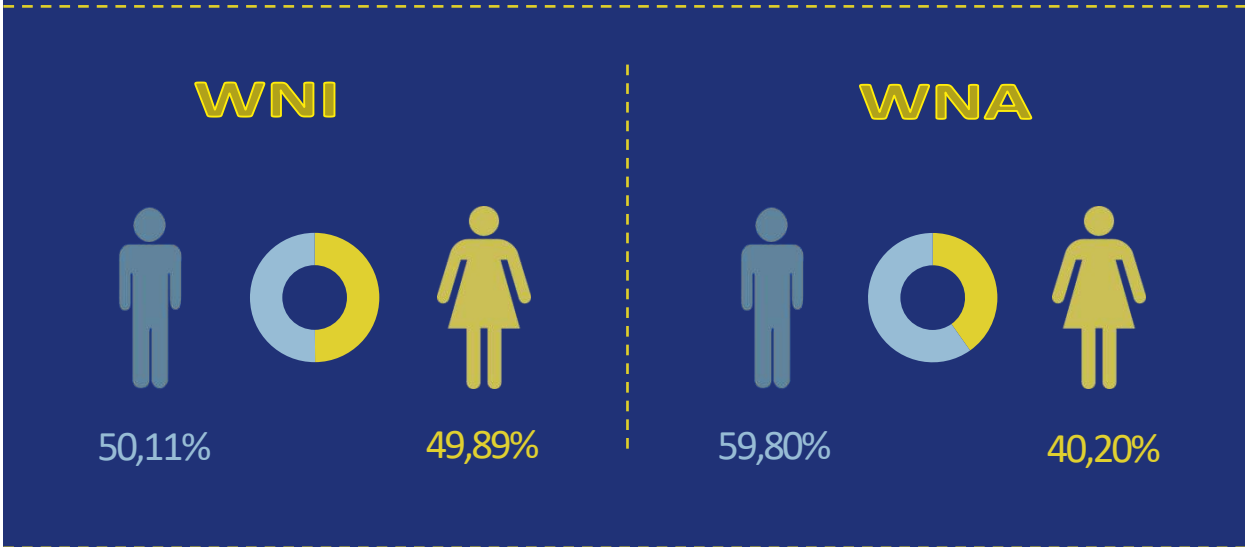
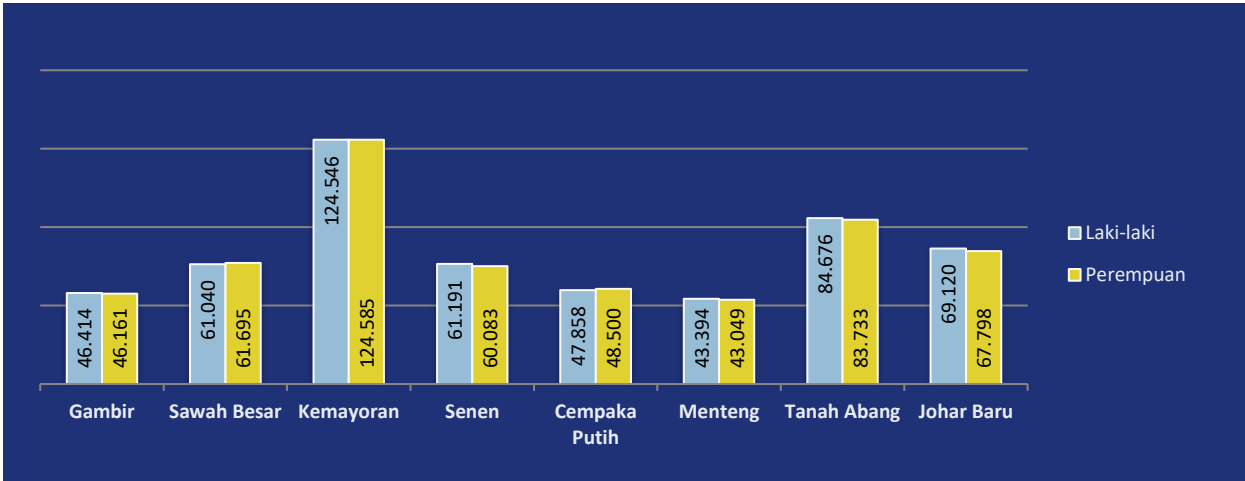
Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Kemendagri Semester 1 Tahun 2024 yang disediakan oleh Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, jumlah penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berjumlah 1.072.639 jiwa, yang terdiri dari 537.519 berjenis kelamin laki-laki dan 535.120 penduduk berjenis kelamin perempuan. Penduduk dengan status Warga Negara Asing (WNA) tercatat sebanyak 1.204 jiwa, 720 berjenis kelamin laki-laki dan 484 berjenis kelamin perempuan. Total jumlah penduduk (WNI + WNA) sebesar 1.073.843 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk WNI per Semester 1 2024 sebesar 22.551 jiwa/km², tingkat kepadatan penduduk WNA per Semester 1 2024 sebesar 25 jiwa/km², total tingkat kepadatan penduduk

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

(WNI+WNA) sebesar 22.576 jiwa/km², mengalami penurunan dibandingkan tingkat kepadatan penduduk menurut data Tahun 2023 yaitu 23.196 jiwa/km². Berdasarkan kecamatan, tingkat kepadatan penduduk (WNI+WNA) tertinggi berada di wilayah Kecamatan Johar Baru, 57.828 jiwa/km² dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Gambir, 12.331 jiwa/km².

Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat termasuk multi-etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.



Gambar 2 Infografis penduduk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: Sudin Dukcapil JP)

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki posisi strategis sebagai lokasi pusat pemerintahan kota Jakarta, Istana Negara, kantor-kantor Lembaga Tinggi Negara, kantor-kantor Duta Besar dari berbagai Negara, serta beberapa kawasan bisnis yang menjadi barometer perekonomian di Indonesia. Dengan posisi tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki tanggung jawab yang besar baik sebagai pendukung Provinsi DKI Jakarta maupun dalam peta nasional dan internasional, sehingga mempunyai konsekuensi kewenangan maupun kewajiban khusus yang berbeda dibandingkan kota/kabupaten lainnya baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Kedudukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lampiran 37, tertera bahwa Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota dan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah. Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Lampiran 37 Bab II Kota Administrasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;

- j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
- p. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
- q. pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
- r. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

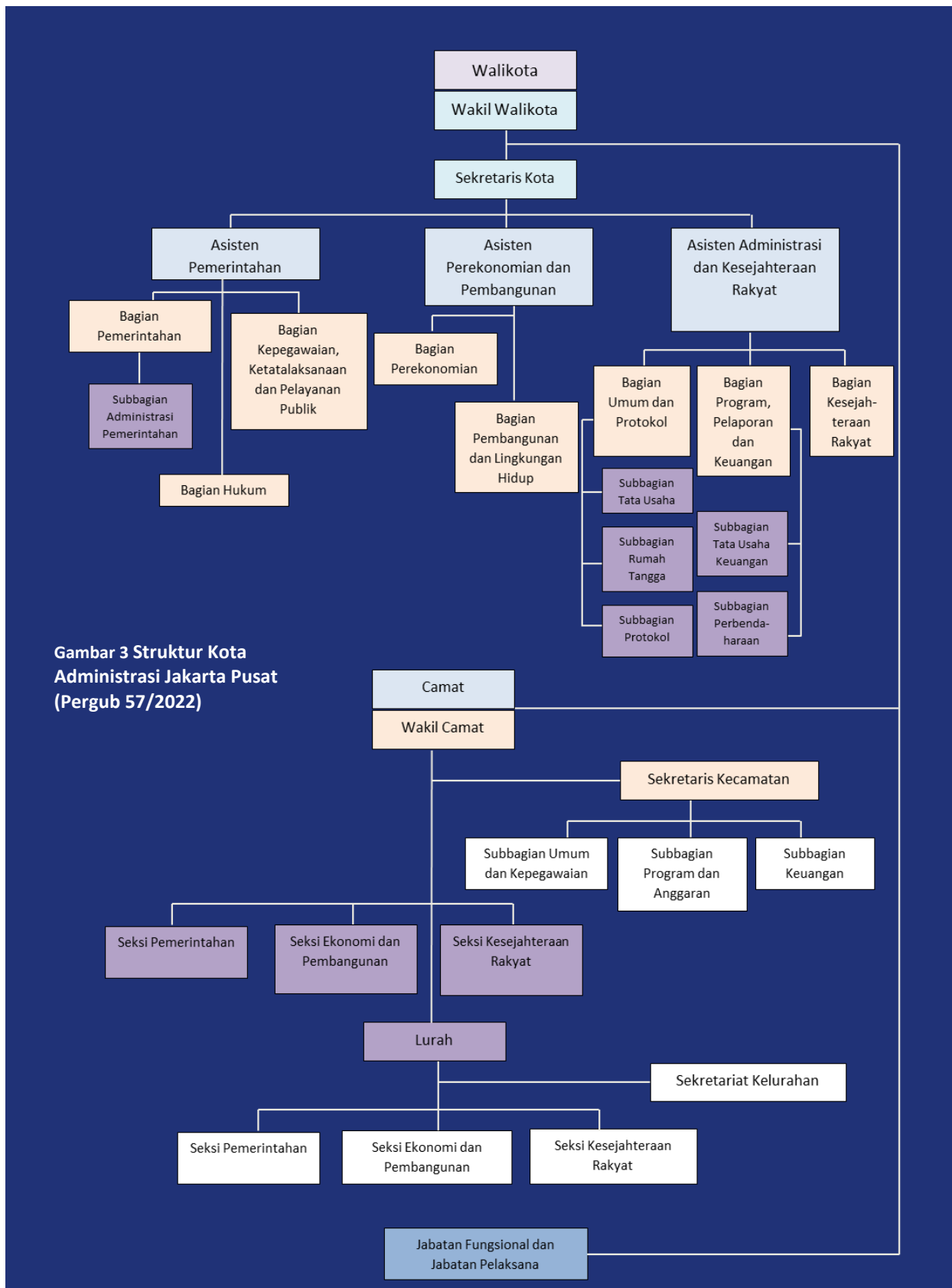
Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan fungsi tambahan, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
- b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
- c. fasilitasi pengawasan rumah kos dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
- d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
- e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
- g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
- h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Susunan Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Susunan Organisasi struktural Kota Administrasi Jakarta Pusat, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kota, terdiri atas:
 - 1) Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Bagian Pemerintahan yang membawahi Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum; dan
 - c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
 - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Bagian Perekonomian; dan
 - b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
 - i. Subbagian Tata Usaha;
 - ii. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - iii. Subbagian Protokol
 - b) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri atas:
 - i. Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - ii. Subbagian Perbendaharaan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Kecamatan, terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan;
 - 2) Seksi Pemerintahan;
 - 3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 4) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 5) Kelurahan, terdiri atas:
 - a) Sekretariat Kelurahan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

2. Pada Bagian di Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Sub kelompok, yaitu unit kerja non struktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya.



Gambar 3 Struktur Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pergub 57/2022)

ISU STRATEGIS

Lampiran 37 Bab II KOTA Administrasi poin B mengenai Tugas dan Fungsi pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyatakan Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Sebagai implementasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi pelaksana kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat demi rangka mewujudkan misi dan tujuan RPJMD Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang selama Tahun peralihan 2023-2026 adalah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Ringkasan IKU Periode 2017-2022

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat mengemban misi 3, yaitu: "Menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas."

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Kota Administrasi Jakarta Pusat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022, yang secara bertahap akan direalisasikan pada setiap tahun, yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.

Kemudian, dengan dilaksanakannya evaluasi berkelanjutan RPJMD Provinsi DKI Jakarta serta Renstra seluruh Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dikaji dan kemudian dilakukan perubahan. Pada evaluasi SAKIP Tahun 2021 Kemenpan RB merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah di dalamnya menggunakan perubahan perencanaan yang telah disusun, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi:

- Indeks Reformasi Birokrasi (berdasarkan draf RPJMD perubahan)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (Tetap)

- Persentase Kualitas Penggunaan Anggaran (Perkin setara sasaran)

Selain tiga sasaran di atas, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat juga diberikan amanah tambahan sebagai kinerja yang diperjanjikan. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Sasaran Strategis, yang terdiri dari Sasaran Utama pada tabel 9 di atas dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional yang bervariasi setiap tahunnya tergantung kebutuhan.

Selama periode 2017-2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melaksanakan evaluasi kinerja perangkat-perangkat daerah di bawahnya yang kemudian diimplementasikan dengan perbaikan dan pengembangan sasaran-sasaran kinerja perangkat daerah. Penambahan pengampu/ penanggung jawab sasaran kinerja dilakukan guna mengatasi sasaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang belum tercapai. Kondisi seperti ini diakomodir melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD), sasaran khusus, dan sasaran operasional. Oleh sebab itu Indikator Kinerja Kota Administrasi terlihat dinamis selama periode 2017-2022 dengan hampir semua sasaran mencapai target 100%. Rekap sasaran kinerja Kota Administrasi periode 2017-2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	70.92	N/A	N/A	74.57	N/A	N/A	76.54	N/A	85	76.88	92.88	91		
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	80	82.26	102.8	83	83.58	100.7	86	87.42	101.6	86*	91.63	106.5	88.5	95.05	107.4
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	94.59	94.59	91%	96.24%	105.76	91%	92.23%	101.35

Catatan:

1. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Tahun 2018-2020 adalah realisasi IRB Provinsi DKI Jakarta yang belum diamanatkan kepada perangkat daerah termasuk Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 disesuaikan dengan kondisi covid-19 menjadi 86 dari target awal 88;

Indikator Kinerja Strategis Daerah (KSD) Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (23)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
2	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (20)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (45)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
4	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (29)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
5	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (73)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
6	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (39)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
7	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (66)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
8	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (61)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Indikator Kinerja Sasaran Khusus Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Opini Laporan Keuangan	N/A	WTP (3)	N/A	N/A	WTP (3)	N/A	WTP (3)	WTP (3)	100	WTP (3)	WTP (3)	100	WTP (3)	WTP (3)	100
2	Persentase Pemanfaatan E-Order	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	0%	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100
3	Persentase implementasi rencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70.92	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100

	strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta															
4	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88.69	N/A	81	93.88	115.9	91%	96.66%	106.2
5	Nilai PMPRB PD	N/A	N/A	N/A	N/A	80.68	N/A	N/A	95.32	N/A	N/A	95.56	N/A	95	97.62	102.76
6	Penggunaan e-Office	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100
7	Penggunaan e-Produk Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100

Indikator Kinerja Sasaran Operasional Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
2	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	99.92%	99.92	100%	99.99%	99.99	100%	100%	100
3	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Dengan berakhirnya periode RPJMD 2017-2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun RPD 2023-2026 untuk masa transisi dan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyusun Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026.

Isu Strategis 2023-2026

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Sementara itu Kota Administrasi berkedudukan sebagai perangkat yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan warga masyarakat sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat.

Hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kota Administrasi dalam mewujudkan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Periode 2005-2025, adalah sebagai berikut:

No	Misi RPJPD (Misi Kepala Daerah) yang terkait Peran Kota Administrasi)	Hambatan Kota Administrasi dalam Mewujudkan Misi RPJPD	Faktor Penentu Keberhasilan Kota Administrasi dalam Mewujudkan Misi RPJPD
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerja sama antar daerah dan kerja sama internasional.	1. Perlu mengoptimalkan aparatur yang disiplin, profesional dan berintegritas	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi; 2. Mengoptimalkan pola karir pegawai serta meningkatkan kualitas pegawai fungsional maupun struktural

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah di tinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada RPD, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah dan implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah dapat diperoleh informasi mengenai isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 pada tabel di bawah ini.

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	No	Identifikasi Permasalahan	Isu Strategis	Motto
1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1	Peningkatan kolaborasi pemerintah-swasta-warga	Pemerataan Pembangunan	Maju Masif
		2	Forum kolaborasi tanggap bencana		
		3	Industri Mikro Kreatif		
		4	Optimalisasi Peran Walikota		
		5	Optimalisasi Basis Data Terpadu Penerima Manfaat yang Terintegrasi		
2	Sasaran RPD	1	Peningkatan kualitas, Aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Inklusif
3	Sasaran Renstra	1	Peningkatan Kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal	Wilayah yang Optimal	
4	Implikasi RT/RW bagi pelayanan	1	Kesulitan Pengadaan Lahan		
		2	Kawasan yang belum tertata		

Dapat dijabarkan secara singkat bahwa isu strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah:

1. Pemerataan pembangunan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur agar setiap Perangkat Daerah menanamkan Nilai-nilai Budaya Kerja serta core values “BerAKHLAK” dalam pelaksanaan kesehariannya. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2020, nilai-nilai budaya kerja tersebut, antara lain: berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, dan berkeadilan. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang merupakan inti sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Manusia

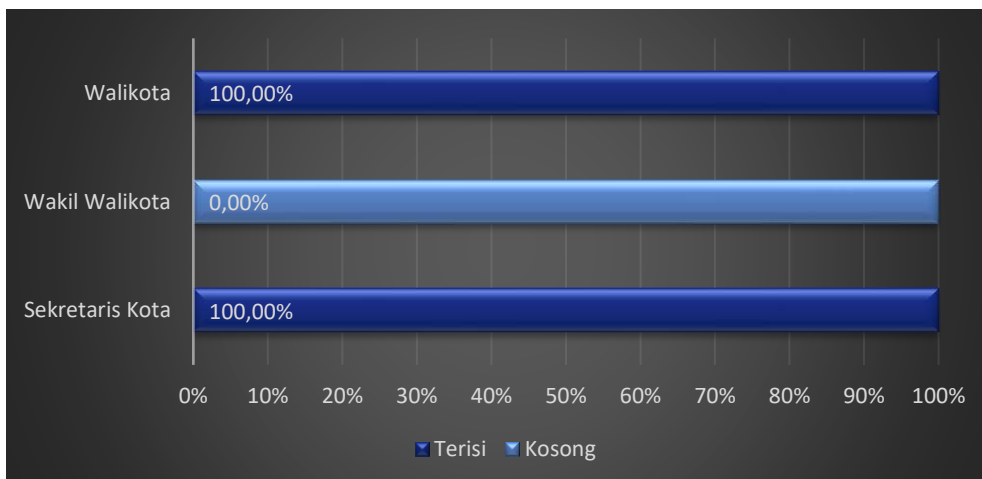
Sumber daya Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebar di Sekretariat Kota, delapan Kecamatan, dan empat puluh empat Kelurahan, dengan sebaran berdasarkan pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut:

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai						
		S3	S2	S1/ Setara	D4/ Setara	D3/ Setara	SMU	SMP
Sekretariat Kota	89	2	27	41	3	4	12	-
Kecamatan	89	-	32	47	1	7	2	-
Kelurahan	309	-	37	191	9	32	37	3
Jumlah	487	2	96	279	13	43	51	3

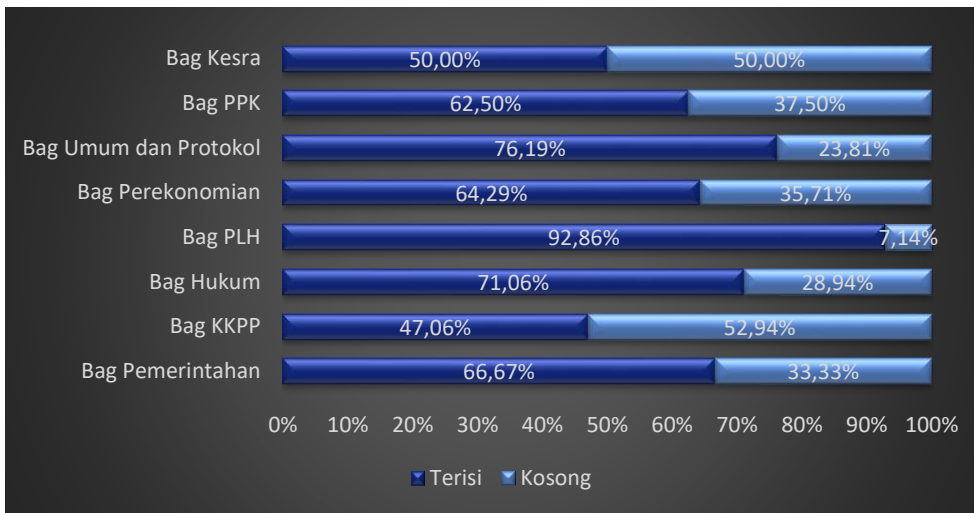
Tabel 1 Jumlah data pegawai Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian KKPP, Desember 2024)

Rasio jumlah eksisting dengan jumlah ABK eselon 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, rasio jumlah eksisting dengan jumlah ABK pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan rasio jumlah eksisting dengan jumlah ABK pegawai Kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

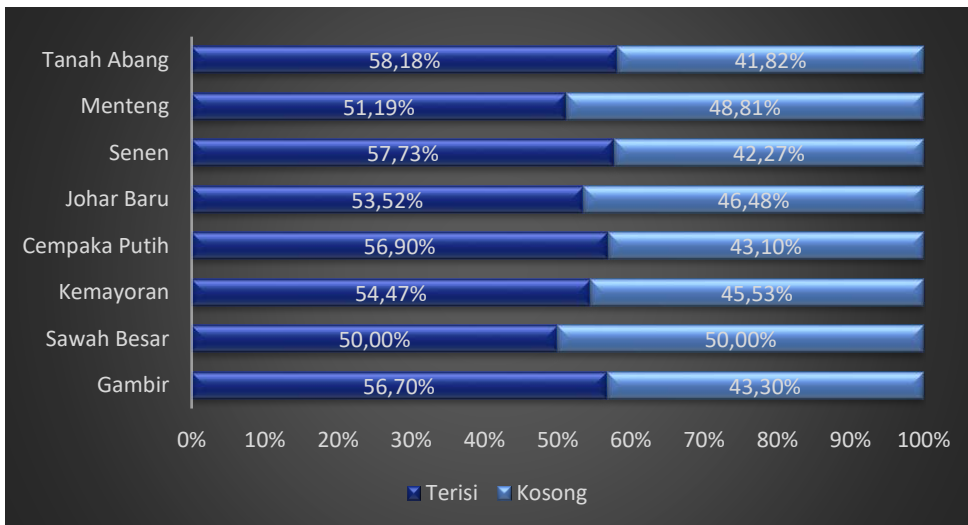
Data per Desember 2024, posisi Wakil Walikota (eselon II b) belum terisi dengan Wakil Walikota sebelumnya dipromosikan ke perangkat daerah lain.



Grafik 1 Persentase keterisian eselon 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: Bagian KKPP)



Grafik 2 Persentase keterisian pegawai bagian-bagian di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: Bagian KKPP)



Grafik 3 Persentase keterisian pegawai kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: Bagian KKPP)

Berdasarkan data awal Tahun 2023, rasio perbandingan ABK dengan jumlah eksisting pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan, dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, adalah sebagai berikut:

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan meliputi:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi	18
2	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi	10
3	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi	45
4	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi	374
5	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi	12
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi	442
7	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi	154

Tabel 2 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Tahun 2024 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi:

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi	23
2	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi	16
3	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi	25
4	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi	14
5	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi	111
6	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi	50
7	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi	47
8	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi	38
9	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi	51
10	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi	65
11	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi	16

Tabel 3 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2024 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)

UKPD di tingkat Kota Administrasi yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

No	UKPD	Jumlah Pegawai
1	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi	25
2	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi	168
3	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi	667
4	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi	17
5	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi	28
6	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi	11
7	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi	18
8	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi	19
9	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi	22
10	Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi	21
11	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi	13

Tabel 4 Jumlah pegawai Unit Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 (sumber Suban Kepegawaian Kota Adm JP)

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai target indikator kinerja utama Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selain didukung oleh sumber daya manusia, juga didukung oleh sumber daya sarana dan prasarana.

Berdasarkan data Desember 2024, jumlah bangunan kantor di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat total sebanyak lima puluh sembilan bangunan kantor, dengan tujuh bangunan di kompleks Kantor Walikota, delapan bangunan kantor kecamatan, dan empat puluh empat bangunan kantor kelurahan. Data bangunan kantor lebih detail, adalah sebagai berikut:

No	Bangunan Kantor	Alamat
1	Blok A Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1
2	Blok B Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1
3	Blok C Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1
4	Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1
5	Masjid Al Fauz Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1
6	Lapangan Tennis Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1
7	Bank Sampah Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	JL. Tanah Abang 1 No. 1

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Bangunan Kantor	Alamat
8	Kecamatan Gambir	Jl. Tanah Abang 1 No. 10
9	Kelurahan Gambir	Jl. Budi Kemuliaan No. 12
10	Kelurahan Cideng	Jl. Petojo Selatan XI No 19 RT 007 RW 011
11	Kelurahan Petojo Utara	Jl. Pembangunan 2 Taman
12	Kelurahan Petojo Selatan	Jl. Petojo Melintang No 19
13	Kelurahan Kebon Kelapa	Jl. Batu Tulis VII No. 21 RT. 006/03 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat
14	Kelurahan Duri Pulo	Jl. Petojo Barat V
15	Kecamatan Sawah Besar	Jl. Karang Anyar No.12
16	Kelurahan Pasar Baru	Jl. KREKOT JAYA I NO. 4 C
17	Kelurahan Karang Anyar	Jl. B RAYA I RT. 007/RW. 05
18	Kelurahan Kartini	Jl. Kartini VIII Dalam No. 18
19	Kelurahan Gn Sahari Utara	Jl. Gunung Sahari VII A/30, Jakarta Pusat
20	Kelurahan Mangga Dua Selatan	Jl. Mangga Dua Dalam I
21	Kecamatan Kemayoran	Jl. Serdang III Rt. 006/05
22	Kelurahan Kemayoran	Jl. Kepu Barat No 5
23	Kelurahan Kebon Kosong	Jl. Dakota 5
24	Kelurahan Harapan Mulia	Jl. Cempaka Wangi II No 17 RT 011 /09 Kel Harapan Mulia Kecamatan Harapan Mulia
25	Kelurahan Serdang	Jl. Bendungan Jago No. 11 RT. 013/02
26	Kelurahan Gn. Sahari Selatan	Jl. Kran Raya No 77 RT 001 RW 06
27	Kelurahan Cempaka Baru	Jl. Cempaka Baru II No. 1 RT 008 RW 06 Kel Cempaka Baru
28	Kelurahan Sumur Batu	Jl. Howitzer Raya No.5 RT.010 RW.06 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
29	Kelurahan Utan Panjang	Jl. D Bendungan Jago No.49
30	Kecamatan Senen	Jl. Kramat Raya No 114 Kel. Kwitang
31	Kelurahan Senen	Jl. Senen Dalam Vi
32	Kelurahan Kenari	Jl. Jambrut Nomor 12
33	Kelurahan Paseban	Jl. Paseban Raya No. 71 F -G
34	Kelurahan Kramat	Jl. Kramat Pulo Dalam li Rt 001/06
35	Kelurahan Kwitang	Jl. Kramat Iv Ujung
36	Kelurahan Bungur	Jl. Kp. Kepu Gg. V No. 277
37	Kecamatan Cempaka Putih	Jl. Komplek Perkantoran Rawa Kerbau No.3, Kel. Cempaka Putih Timur
38	Kelurahan Cempaka Putih Timur	Jl. Cempaka Putih Tengah XIII
39	Kelurahan Cempaka Putih Barat	Jl. Cempaka Putih Barat No. 25
40	Kelurahan Rawasari	Jl. Pramuka Sari I NO.1 RT.014 RW.08
41	Kecamatan Menteng	Jl. Pegangsaan Barat No. 14
42	Kelurahan Menteng	Jl. Anyer No. 9
43	Kelurahan Pegangsaan	Jl. Taman Amir Hamzah No. 1 Pegangsaan
44	Kelurahan Cikini	Jl. Cikini VIII/7 RT. 006 RW. 01
45	Kelurahan Gondangdia	Jl. Jambu No 2 A RT 005/RW 02 Kelurahan Gondangdia
46	Kelurahan Kebon Sirih	Jl. Jaksa No. 8
47	Kecamatan Tanah Abang	Jl. KH. Mas Mansyur No. 130 Kota Adm. Jakarta Pusat
48	Kelurahan Gelora	Jl. Gerbang pemuda No.1
49	Kelurahan Bendungan Hilir	Jl. Penjernihan 1 No. 29 B
50	Kelurahan Karet Tengsin	Jl. Karet Pasar Baru Barat II No.7
51	Kelurahan Petamburan	Jl. Petamburan II No.50
52	Kelurahan Kebon Melati	Jl. Lontar Raya No.3 RT. 01/14
53	Kelurahan Kebon Kacang	Jl. KH.Mas Mansyur No. 30
54	Kelurahan Kampung Bali	Jl. Kampung Bali V/8 Rt.005/Rw.08
55	Kecamatan Johar Baru	Jl. Johar Baru Utara I NO. 1 RT. 013 RW. 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru

No	Bangunan Kantor	Alamat
56	Kelurahan Johar Baru	Jl. Johar Baru Utara III RT. 003 RW. 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru
57	Kelurahan Kampung Rawa	Jl. Rawa Selatan III/39 RT. 004 RW. 05 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru
58	Kelurahan Kelurahan Galur	Jl. Galur Jaya NO. 36 RT 001/04 Kel. Galur Kec. Johar Baru
59	Kelurahan Kelurahan Tanah Tinggi	Jl. Kramat Pulo Gundul NO. 137 RT. 006 RW. 013 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru

Tabel 5 Jumlah bangunan kantor di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2024)

Berdasarkan data terakhir, jumlah rumah dinas empat puluh enam rumah dinas yang terdiri dari satu rumah dinas Walikota, tujuh rumah dinas camat, dan tiga puluh delapan rumah dinas lurah. Data rumah dinas lebih detail, adalah sebagai berikut:

No	Rumah Dinas	Alamat	Keterangan
1	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jl. Taman Sunda Kelapa No.06	
2	Camat Gambir	-	Tidak ada Rumah Dinas
3	Lurah Gambir	-	Tidak ada Rumah Dinas
4	Lurah Cideng	Jl. Petojo Selatan IX No.8, RT 007/011	
5	Lurah Petojo Utara	Jl. Petojo Selatan II	
6	Lurah Petojo Selatan	Jl. Petojo Melintang	
7	Lurah Kebon Kelapa	Jl. Batu Tulis VII No. 21, RT. 006/ 03, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir	
8	Lurah Duri Pulo	Jl. Morotai No. 10, Kel. Cideng	
9	Kecamatan Sawah Besar	Jl. Mangga Dua Dalam Blok K No. 3 RT. 001/ 012, Kel. Mangga Dua Selatan	
10	Lurah Pasar Baru	Jl. Pintu Air No. 6	
11	Lurah Karang Anyar	Jl. F Karang Anyar No. 11 RT. 007 / 06	
12	Lurah Kartini	Jl. Laksana B4 No. 27 RT. 008/ 06	
13	Lurah Gn Sahari Utara	Jl. Serdang I, No.6, RT.06 / 05, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran	
14	Lurah Mangga Dua Selatan	Jl. Mangga Dua Dalam I	
15	Camat Kemayoran	Jl. Serdang III RT. 006/ 05	
16	Lurah Kemayoran	Jl. Serdang I	
17	Lurah Kebon Kosong	Jl. Dakota 5	
18	Lurah Harapan Mulia	Jl. Cempaka Wangi III No. 46 RT. 010 /09, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran	
19	Lurah Serdang	Jl. Serdang Baru Raya No. 2 RT. 017/ 05	
20	Lurah Gn. Sahari Selatan	-	Tidak ada Rumah Dinas

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Rumah Dinas	Alamat	Keterangan
21	Lurah Cempaka Baru	Jl. Cempaka Baru II No. 1 RT 008/ 06 Kel. Cempaka Baru	
22	Lurah Sumur Batu	Jl. Sumber Pelita RT.005/ 01 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran	
23	Lurah Utan Panjang	Jl. F Raya No.207A RT.008/ 04	
24	Camat Senen	Jl. Kalibaru timur IV No. 24 Kel. Bungur, Kec. Senen	
25	Lurah Senen	Jl. Taruna 14 No. 2, Kel. Serdang	
26	Lurah Kenari	Jl. Taruna Gg.14 RT.016/ 03, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran	
27	Lurah Paseban	-	Tidak ada Rumah Dinas
28	Lurah Kramat	Jl. Percetakan Negara II No.37 Kel. Johar Baru	
29	Lurah Kwitang	Jl. Inspeksi Kali Ciliwung RW. 01 Kel. Kwitang	
30	Lurah Bungur	Jl. Kalibaru Timur I No.26 RT.008/ 06	
31	Camat Cempaka Putih	Jl. Cempaka Putih Tengah XVII No. 16 A, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih	
32	Lurah Cempaka Putih Timur	Jl. Rawasari Barat	
33	Lurah Cempaka Putih Barat	Jl. Johar Baru Utara III RT. 001/ 03	
34	Lurah Rawasari	-	Tidak ada Rumah Dinas
35	Camat Menteng	Jl. Matraman Dalam 1 RT. 002/ 05 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng	
36	Lurah Menteng	-	Tidak ada Rumah Dinas
37	Lurah Pegangsaan	Jl. Taman Amir Hamzah No. 1 Kel. Pegangsaan	
38	Lurah Cikini	Jl. Kali Pasir Gang Tembok No. 28 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng	
39	Lurah Gondangdia	-	Tidak ada Rumah Dinas
40	Lurah Kebon Sirih	Jl. Jaksa No.8	
41	Camat Tanah Abang	Jl. Benhil Raya No. 146	
42	Lurah Gelora	Jl. Karet Pasar Baru	
43	Lurah Bendungan Hilir	-	Tidak ada Rumah Dinas
44	Lurah Karet Tengsin	Jl. Karet Pasar Baru Barat VII No. 17	
45	Lurah Petamburan	Jl. H. M.Sani	
46	Lurah Kebon Melati	Jl. Karet Pasar Baru Barat 7	
47	Lurah Kebon Kacang	Jl. Karet Pasar baru Barat	
48	Lurah Kampung Bali	Jl. Kampung Bali IX No.9 RT.009/ 09	
49	Camat Johar Baru	Jl. Kampung Rawa Selatan RT. 011/ 02 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru	
50	Lurah Johar Baru	Jl. Johar Baru Utara RT. 003/ 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru	
51	Lurah Kampung Rawa	Jl. Rawa Sawah IV RT. 002/ 02 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru	

No	Rumah Dinas	Alamat	Keterangan
52	Lurah Kelurahan Galur	Jl. Johar Baru Utara RT. 003/ 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru	
53	Lurah Kelurahan Tanah Tinggi	Jl. Johar Baru Utara RT. 003/ 03 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru	

Tabel 6 Jumlah bangunan rumah dinas di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Pemerintahan-Bagian Umum dan Protokol, 2024)

Ruang Terbuka untuk aktivitas anak dan masyarakat telah dibangun menggunakan APBD 2016 dan hingga saat ini tercatat sebanyak lima puluh RPTRA telah dibangun di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Beberapa kelurahan karena keterbatasan ruang saat ini masih belum memiliki RPTRA, antara lain Kelurahan Kebon Kacang, Gelora, Gambir, Kebon Kelapa, Kartini, Kebon Kosong, Gunung Sahari Selatan, Cempaka Baru, Menteng, Cikini, Kramat, Kwitang, dan Bungur. Kelurahan dengan jumlah RPTRA terbanyak adalah Kelurahan Bendungan Hilir memiliki lima RPTRA. Data lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RPTRA	ALAMAT
1	TANAH ABANG	Karet Tengsin	1. RPTRA Intiland Teduh	Jl. Karet Pasar Baru Barat I
			2. RPTRA Segas Segar Berseri	Jl. Karet Pasar Baru Barat I
		Bendungan Hilir	3. RPTRA Guntur	Jl. Danau Bratan RW 03
			4. RPTRA Keuangan	Taman Komp. Keuangan Jl. Penjernihan RW. 06
			5. RPTRA Rusben II	Rusun Bendungan Hilir 2 RW. 08
			6. RPTRA Melati 04	Jl. Danau Bekuan RW. 04
			7. RPTRA Taman Raning	Jl. Taman Eawa Pening I No. 2
		Kampung Bali	8. RPTRA Hati Suci	Jl. Hati Sudi RT. 002/ 07
			9. RPTRA H. Hasbi	Jl. H. Hasbi Jati Baru RT. 009/ 03
		Kebon Kacang	-	-
		Gelora	-	-
Kebon Melati	10. RPTRA Bonti	Jl. Awaludin III RT. 03/ 017		
Petamburan	11. RPTRA Rusun Petamburan	Rusun Petamburan, Jl. Administrasi II No.10, RW.9		
2	GAMBIR	Petojo Selatan	12. RPTRA Tanah Abang 3	Jl. Tanah Abang 3
		Cideng	13. RPTRA Kenanga	Jl. Makian No. 3 RT. 002/ 05
			14. RPTRA Mustika	Jl. Petojo Selatan XI RW. 011
		Duri Pulo	15. RPTRA Melati Duri Pulo	Jl. Taman Duri Pulo Jl. Petojo Barat V
		Petojo Utara	16. RPTRA Flamboyan Kejora	Jl. Pembangunan II RT. 007/ 02
			17. RPTRA Kejora	Jl. Pembangunan II No.12 Bb, RT.9/ 2
		Gambir	-	-
Kebon Kelapa	-	-		
3	SAWAH BESAR	Pasar Baru	18. RPTRA Pintu Air	Jl. Krekot RW. 02
			19. RPTRA Jaya Molek	Jl. Krekot Jaya Molek RW. 07
		Karang Anyar	20. RPTRA Karang Anyar	Jl. Karang Anyar Utara RW. 09
		Mangga Dua Selatan	21. RPTRA Madusela	Jl. Mangga Besar VIII

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RPTRA	ALAMAT
4	KEMAYORAN	Kartini	-	-
		Gunung Sahari Utara	22. RPTRA Sahara	Jl. Rajawali Selatan VI RT. 002/ 02
		Harapan Mulya	23. RPTRA Harapan Mulya	Taman Kebon Bibit Harapan Mulya
		Serdang	24. RPTRA Krida Serdang	Jl. Taman krida RW. 01
			25. RPTRA Serdang Baru	Taman Serdang Jl. Serdang Baru IX RT. 010/ 05
		Kemayoran	26. RPTRA Bandar Kemayoran	Jl. Kemayoran Timur Gang VIII No. 18 RT. 012/ 07
		Sumur Batu	27. RPTRA Mutiara Sumur Batu	Taman Mutiara RT. 013
		Utan Panjang	28. RPTRA Kampung Budaya	Taman Budaya Jl. Utan panjang 3 RT. 011/ 07
		Kebon Kosong	-	-
Gunung Sahari Selatan	-	-		
Cempaka Baru	-	-		
5	CEMPAKA PUTIH	Cempaka Putih Timur	29. RPTRA Kampung Benda	Jl. Cempaka Putih Tengah XV RW. 08
			30. RPTRA Beringin	Jl. Rawasari Barat IX RT. 010/ 01
			31. RPTRA Matahari	Rawasari Barat 6 No.79A, RT.4/ 1
			32. RPTRA Anggrek	Jl. Rawasari Selatan No. 1 RW. 2
		Cempaka Putih Barat	33. RPTRA Mardani Asri	Jl. Mardani Raya RT 01, RW. 05
Rawasari	34. RPTRA Rawasari Ceria	Jl. Percetakan Negara Gg. H, RW. 1		
6	MENTENG	Pegangsaan	35. RPTRA Amir Hamzah	Taman Amir Hamzah Jl. Amir Hamzah
			36. RPTRA Borobudur	Taman Borobudur Jl. Borobudur No. 9, RT. 09/ 02
		Gondangdia	37. RPTRA Gondangdia	Jl. Teuku Cik Ditiro II RW. 02 (rel kereta)
		Kebon Sirih	38. RPTRA Kebon Sirih	Kolong Rel KA Depan Gedung MNC RW. 07
		Menteng	-	-
Cikini	-	-		
7	JOHAR BARU	Kampung Rawa	39. RPTRA Rawa Indah	Jl. Rawa Selatan V, RT. 017/ 04
			40. RPTRA Rasela Indah	Jl. Rawa Selatan II, RT. 03/ 05
			41. RPTRA Rawa Ceria	Jl. Kp. Rw. Sawah No.7, RT.11/ 3
		Tanah Tinggi	42. RPTRA Rustanti	Rusun Tanah Tinggi Jl. Baladewa
			43. RPTRA Pulo Gundul	Jl. Kramat Pulo Gundul RW. 013
			44. RPTRA Pandawa	Taman II Jl. Abimanyu RT. 01/ 05
		Galur	45. RPTRA Komando Ceria	Taman Komando Jl. Rawa Tengah I
46. RPTRA Gempar Gemilang	Jl. Rw. Tengah, RT.3/ 7			
Johar Baru	47. RPTRA Johar Berseri	Jl. Kramat Jaya Baru 5, RT.14/ 1		
8	SEZEN	Senen	48. RPTRA Planet Senen	Ps. Senen Dlm VIII
		Kenari	49. RPTRA MH Thamrin	Jalan Kenari II
		Paseban	50. RPTRA An Nur	Jl. H. Murtadho No. 16 RT. 8/ 6
		Kramat	-	-
		Kwitang	-	-
Bungur	-	-		

Tabel 7 Jumlah RPTRA di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, 2024)

Berdasarkan Pergub Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang dimaksud dengan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang disingkat menjadi PPSU Tingkat Kelurahan adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/ masyarakat di wilayah Kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/ prasarana dan sarana/ aset publik maupun aset yang rusak, kotor dan/ atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya. Petugas PPSU yang juga sering disebut sebagai Pasukan Oranye merupakan salah satu terobosan yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, ditempatkan di Kelurahan untuk penanganan segera terkait sarana dan prasarana publik yang menjadi wewenang masing-masing wilayah. Jumlah petugas PPSU Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Petugas PPSU Tahun 2024
1	Gambir	1. Gambir	99
		2. Cideng	61
		3. Petojo Utara	53
		4. Petojo Selatan	60
		5. Kebon Kelapa	52
		6. Duri Pulo	44
2	Sawah Besar	7. Pasar Baru	65
		8. Karang Anyar	47
		9. Kartini	50
		10. Gn Sahari Utara	61
		11. Mangga Dua Selatan	67
3	Kemayoran	12. Kemayoran	45
		13. Kebon Kosong	60
		14. Harapan Mulia	48
		15. Serdang	53
		16. Gn. Sahari Selatan	63
		17. Cempaka Baru	51
		18. Sumur Batu	51
		19. Utan Panjang	41
4	Senen	20. Senen	78
		21. Kenari	58
		22. Paseban	51
		23. Kramat	57
		24. Kwitang	48
		25. Bungur	50
5	Cempaka Putih	26. Cempaka Putih Timur	75
		27. Cempaka Putih Barat	57
		28. Rawasari	53
6	Menteng	29. Menteng	128
		30. Pegangsaan	57
		31. Cikini	50
		32. Gondangdia	66
		33. Kebon Sirih	52
7	Tanah Abang	34. Gelora	89
		35. Bendungan Hilir	76

		36. Karet Tengsin	53
		37. Petamburan	53
		38. Kebon Melati	57
		39. Kebon Kacang	51
		40. Kampung Bali	60
8	Johar Baru	41. Johar Baru	70
		42. Kampung Rawa	42
		43. Kelurahan Galur	48
		44. Kelurahan Tanah Tinggi	62
		Total	2612

Tabel 8 Jumlah Eksisting Petugas PPSU Kelurahan per Desember 2024 (sumber: Kelurahan Kota Adm Jakarta Pusat)

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL

Berdasarkan Surat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta perihal hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 Nomor 0896/PA.01.00 tanggal 2 Desember 2024, Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan nilai 85,75 dengan nilai per komponen:

- Perencanaan kinerja: 25,50
- Pengukuran kinerja: 25,50
- Pelaporan kinerja: 12,75
- Evaluasi Internal 22,00

Temuan hasil evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terkait hasil evaluasi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- Dokumen perencanaan kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diformalkan merujuk pada Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LKIP, Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45/Se/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, dan Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor e-0032/SE/2024 Tentang Pedoman Perencanaan Target Kinerja Dalam Penyusunan RKPD.
Dokumen Perencanaan Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Renstra 2023-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam SK Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023-2026, Renja Tahun 2024, RKA Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diformalkan. Salinan dokumen Perjanjian Kinerja dilampirkan pada Lampiran LKIP 2024;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan pada <https://pusat.jakarta.go.id/ppid/>

- Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART dengan dasar Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0004 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Atribut Sasaran Kinerja Tahun 2024; Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45/SE/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; dan Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor e-0032/SE/2024 Tentang Pedoman Perencanaan Target Kinerja Dalam Penyusunan RKPD;
- Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 berdasarkan Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2023 dan tidak mengikuti rencana pada Dokumen Renstra 2023-2026 Tahun kedua.
 - Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi dari target Renstra 2024 sebesar 87,3 menjadi 93,93
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dari target Renstra 2024 sebesar 88,6 menjadi 97,52
 - Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi dari target Renstra 2024 sebesar 86 menjadi 90,35
- Telah disusun dokumen Perencanaan Kinerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor e-0032/SE/2024 Tentang Pedoman Perencanaan Target Kinerja Dalam Penyusunan RKPD.

Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sudah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading). Tujuan dan Sasaran Strategis telah diturunkan ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mencapai IKU Kota Administrasi Jakarta Pusat, pengampu masing-masing indikator telah disesuaikan berdasarkan eselon dan fungsinya;
- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman arahan dari tingkat provinsi yang berkesinambungan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- Kinerja individu yang tertuang pada akun etpp masing-masing pegawai disusun berdasarkan cascading kinerja yang telah ditetapkan. Pengampu indikator tujuan/ sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan telah disesuaikan berdasarkan eselon dan fungsinya.

2. Pengukuran Kinerja

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan setiap bulan melalui sistem etpp. pegawai.jakarta.go.id di mana validasi realisasi target dilakukan oleh masing-masing user/ atasan secara cascading sampai ke tingkat Walikota;
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan. Hasil realisasi kinerja yang diinput pengampu dan divalidasi oleh atasan langsung telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan, sesuai Pergub Nomor 69 Tahun 2022;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Tercantum pada Bab 3 Dokumen LKIP 2024;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. Berdasarkan Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, diputuskan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2023 dan tidak mengikuti rencana pada Dokumen Renstra 2023-2026 Tahun kedua;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. Tergambar dalam etpp.jakarta.go.id masing-masing pegawai dan LKIP 2024 Bab 3

3. Pelaporan Kinerja

- LKIP 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (Bab 3)
- LKIP 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (Bab 3)
- LKIP 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) (Bab 4)
- LKIP 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diinfokan bahwa capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menunjukkan adanya pengaruh dari budaya kerja organisasi yang ditetapkan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Bab 3)

4. Evaluasi Internal

- Perangkat Daerah telah berupaya memastikan penerapan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan mengadakan Sosialisasi Penyusunan dan Pengukuran Kinerja setiap tahun, Monev Pelayanan Publik Administrasi Kepegawaian dan Kinerja Pemerintahan, dan Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja setiap Triwulan.

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja			
	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa:	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa:		
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diformalkan dengan berpedoman mengikuti aturan, sebagai berikut: 1. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LKIP 2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45/Se/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 3. Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor e-0032/SE/2024 Tentang Pedoman Perencanaan Target Kinerja Dalam Penyusunan RKPD	
	b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu	b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan pada situs https://pusat.jakarta.go.id/ppid/	
c. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART	c. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART	berpedoman pada : 1. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0004 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Atribut Sasaran Kinerja Tahun 2024		

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Keterangan
			<p>3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45/SE/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025</p> <p>4. Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor e-0032/SE/2024 Tentang Pedoman Perencanaan Target Kinerja Dalam Penyusunan RKPD</p>	
	d. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (on the right track), menantang, dan realistis	d. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (on the right track), menantang, dan realistis	<p>Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 berdasarkan Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2023 dan tidak mengikuti rencana pada Dokumen Renstra 2023-2026 Tahun kedua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi dari target Renstra 2024 sebesar 87,3 menjadi 93,93 • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dari target Renstra 2024 sebesar 88,6 menjadi 97,52 • Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi dari target Renstra 2024 sebesar 86 menjadi 90,35 <p>Dokumen Perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Dokumen LKIP 2024</p>	
	e. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)	e. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)	<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan kinerja disusun berpedoman pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor e-0032/SE/2024 Tentang Pedoman Perencanaan Target Kinerja Dalam Penyusunan RKPD 2. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sudah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara 	

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Keterangan
			kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading). Tujuan dan Sasaran Strategis telah diturunkan ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mencapai IKU Kota Adm JP, pengampu masing-masing indikator telah disesuaikan berdasarkan eselon dan fungsinya.	
	f. Perencanaan Kinerja dapat telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	f. Perencanaan Kinerja dapat telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman arahan dari tingkat provinsi yang berkesinambungan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	
	g. Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi	g. Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi	Kinerja individu yang tertuang pada akun etpp masing-masing pegawai disusun berdasarkan cascading kinerja yang telah ditetapkan. Pengampu indikator tujuan/ sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan telah disesuaikan berdasarkan eselon dan fungsinya.	
2	Pengukuran Kinerja			
	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa:	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa:		
	a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja	a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja	Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan setiap bulan melalui sistem etpp. pegawai.jakarta.go.id di mana validasi realisasi target dilakukan oleh masing-masing user/ atasan secara cascading sampai ke tingkat Walikota	
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan	Hasil realisasi kinerja yang diinput pengampu dan divalidasi oleh atasan langsung telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan, sesuai Pergub Nomor 69 Tahun 2022	

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Keterangan
	c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	LKIP 2024 Bab 3	
	d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	Berdasarkan Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, diputuskan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2023 dan tidak mengikuti rencana pada Dokumen Renstra 2023-2026 Tahun kedua.	
	e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Tergambar dalam etpp.jakarta.go.id masing-masing pegawai dan LKIP 2024 Bab 3	
3	Pelaporan kinerja			
	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa:	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa:		
	a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	a. Pada LKIP 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (Bab 3)	
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	b. Pada LKIP 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (Bab 3)	
	c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	c. Pada LKIP 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) (Bab 4)	
	d. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	d. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	d. Pada LKIP 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diinfokan bahwa penentuan target IKU Tahun 2024 berdasarkan realisasi IKU di Tahun 2023. Faktor pendukung capaian di Tahun 2023 terus dipertahankan sesuai yang dinarasikan pada LKIP 2024 Bab 3	

No	Temuan Hasil Evaluasi SAKIP	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Keterangan
	e. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	e. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	e. Pada LKIP 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diinfokan bahwa capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menunjukkan adanya pengaruh dari budaya kerja organisasi yang ditetapkan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Bab 3)	
4	Evaluasi Internal			
	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang	Perangkat Daerah telah berupaya memastikan penerapan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan mengadakan : 1. Sosialisasi Penyusunan dan Pengukuran Kinerja setiap tahun. 2. Monev Pelayanan Publik Administrasi Kepegawaian dan Kinerja Pemerintahan 3. Rapat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja setiap Triwulan.	

Tabel 9 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal Tahun 2024

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022, terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut :

a. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

b. Bab II : Perencanaan Kinerja

- A. Renstra (Visi dan Misi): Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- B. Perjanjian Kinerja PD: dokumen perjanjian kinerja tahun yang dilaporkan.
- C. Tujuan dan Sasaran pada RPJMD: target dalam Dokumen RPD 2023-2026

c. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja: capaian kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2024 tabel capaian
- B. Capaian Strategis Kinerja: Penjelasan detail terkait dengan capaian strategis kinerja di masing-masing indicator

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisa faktor keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;

d. Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

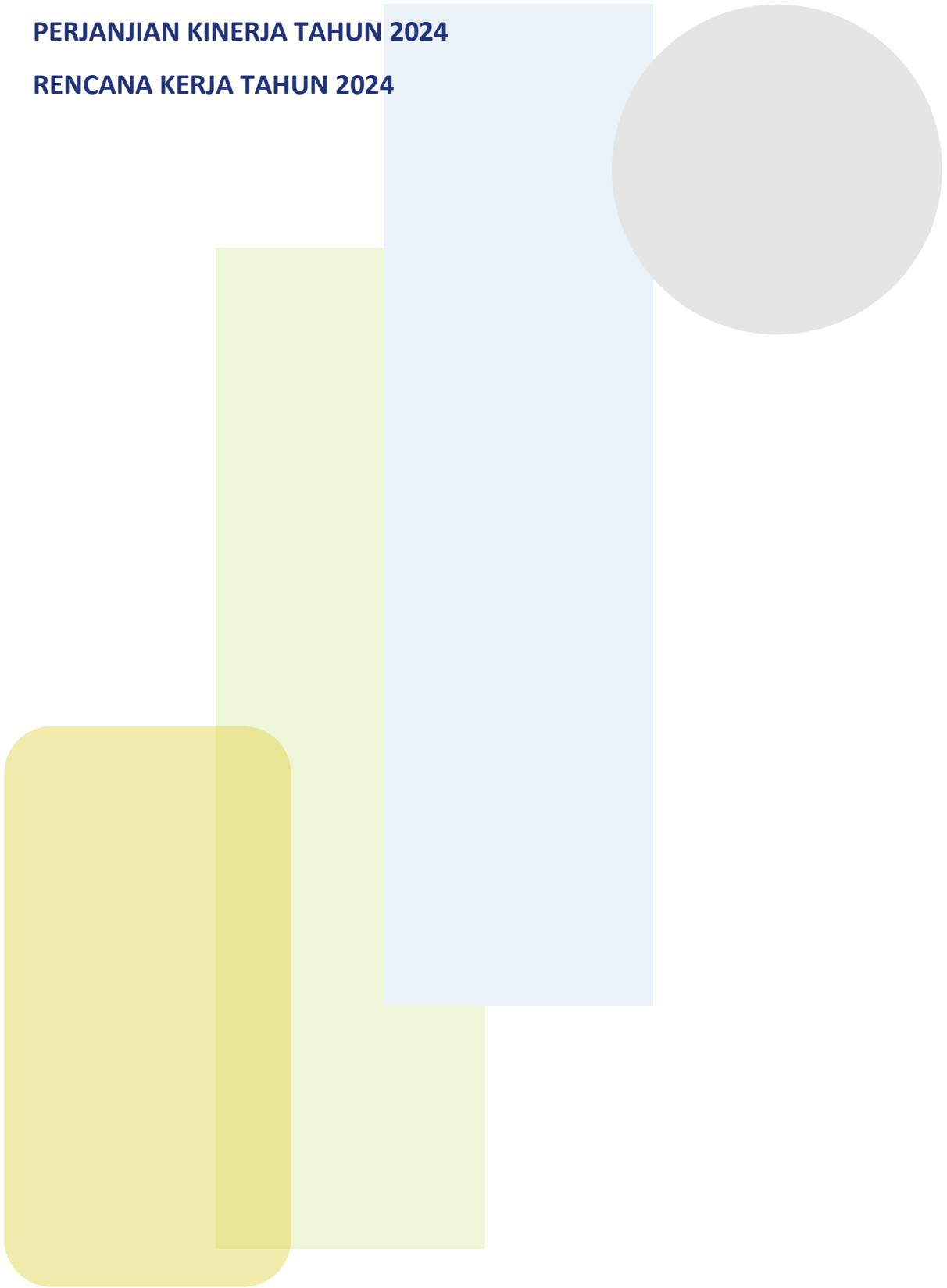
Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Prestasi
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II: PERENCANAAN KINERJA

- **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
- **RENCANA KERJA TAHUN 2024**



PERENCANAAN KINERJA

Komponen pembentuk isu strategis di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD DKI Jakarta 2005- 2025, RPJMN 2020-2024; hasil capaian TPB/ SDGs; dan isu aktual yang sedang berlangsung termasuk pandemi COVID-19 dan rencana pemindahan Ibukota.

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, telah dirumuskan sejumlah 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026, antara lain :

1. Ketahanan Terhadap Bencana
2. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik
3. Ketahanan Ekonomi Inklusif
4. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas
5. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara
6. Pemerataan Pembangunan

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan bangun (built environment), dimensi perekonomian (economic), dimensi manusia (human), dan dimensi pemerintahan (governance).

Tujuan/ Sasaran dimensi pemerintahan (governance) adalah sebagai berikut:

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR
TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS	INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Indeks Survei Penilaian Integritas
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

Tabel 10 Tujuan dan Sasaran Dimensi Pemerintahan (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)

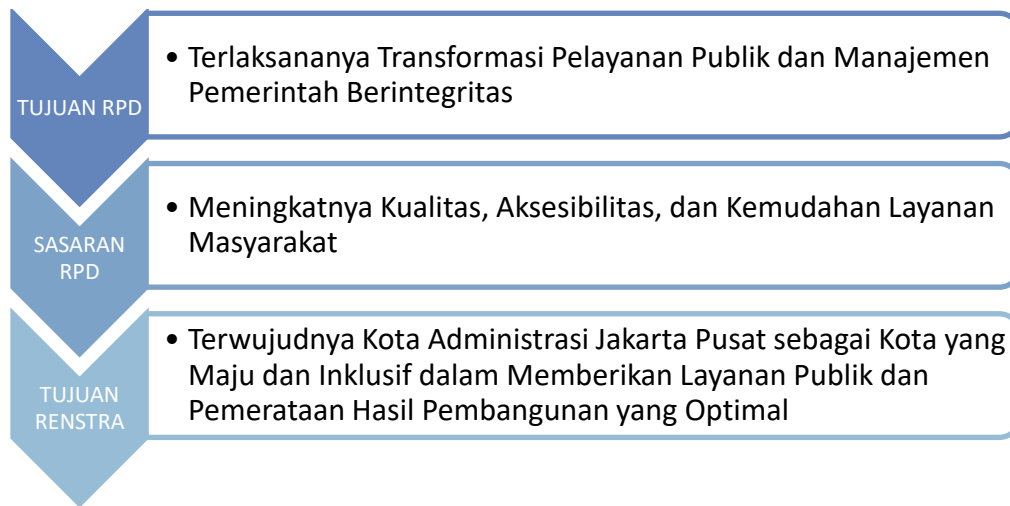
Kota Administrasi sebagai Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi antara lain mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta ke tengah masyarakat diberikan amanah tujuan/ sasaran dari dimensi tersebut.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026

Untuk menangani isu strategis Kota Administrasi (Pemerataan pembangunan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah yang optimal) dan menjawab tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Kota Administrasi perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu empat tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kota Administrasi adalah:

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal”

Adapun keterkaitan tujuan Kota Administrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Gambar 4 Skema keterkaitan tujuan Kota Administrasi dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)

Kemudian tujuan dan sasaran Kota Administrasi 2023-2026 dirumuskan menjadi, sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86.75	87.3	87.85	89.5
1		Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	88.5	88.6	88.7	88.8
			Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	85	86	87	88.5

Tabel 11 Tujuan dan sasaran Kota Administrasi 2023-2026 (sumber: Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat diberi amanah 3 (tiga) indikator kinerja utama yang terdiri dari tujuan renstra yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, serta sasaran renstra yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Kemudian berdasarkan Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, diputuskan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2023 dan tidak mengikuti rencana pada Dokumen Renstra 2023-2026 Tahun kedua.

Sehingga Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024 menjadi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
1	2	4	5
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93.93
2	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	97.52
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	90.35

Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024

Selain dua sasaran di atas, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat juga diberikan amanah tambahan sebagai kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2024. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Sasaran Strategis, yang terdiri dari Sasaran Utama pada tabel di atas, kemudian Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional, sehingga secara lengkap Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
1	2	4	5
Sasaran Strategis			
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93.93
2	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	97.52
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	90.35
Sasaran Khusus			
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3.25
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survey Kepuasan Layanan Masyarakat	92
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang	100%
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	100%
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan Manajemen Pengetahuan	100%
10	Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	100%
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%
Sasaran Operasional			
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%

Tabel 13 Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Penjelasan singkat mengenai Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat:

- ❖ Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi
- ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) didapat dari Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan penyelenggaraan Kelurahan (RT, RW, LMK).
- ❖ Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi, pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/ Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat
- ❖ Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program, perencanaan komunikasi publik strategis untuk program prioritas dan strategis perangkat daerah guna memastikan tersampainya informasi terkait kepada masyarakat
- ❖ Nilai kualitas data SDI, nilai kualitas data SDI ini terdiri atas 4 aspek yaitu: aspek ketepatan waktu, aspek kelengkapan data, aspek keunikan isi data, dan aspek validitas data
- ❖ Survei Kepuasan Layanan Masyarakat, survei yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. survei ini agar dibedakan dengan Sasaran Strategis Walikota yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat
- ❖ Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang
- ❖ Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri
- ❖ Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun, tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat 4 dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) jam pelajaran per tahun

- ❖ Persentase penyelesaian tahapan Manajemen Pengetahuan, tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan
- ❖ Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- ❖ Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi, dilaksanakan dengan mengukur variabel sebagai berikut
 - Pengukuran capaian keluaran kegiatan/ sub kegiatan. Komponen ini diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator keluaran (output) kegiatan dengan target indikator keluaran (output) kegiatan
 - Penyerapan Anggaran. Komponen ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran
 - Efisiensi keluaran kegiatan/ sub kegiatan. Komponen ini diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya
- ❖ Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur, penugasan dari Gubernur kepada Perangkat Daerah terkait guna menyelesaikan isu saat itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- ❖ Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat, pengawasan kinerja pemerintah melalui beberapa kanal yang diintegrasikan dengan sistem CRM atau Cepat Respons Masyarakat
- ❖ Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI kepada setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada Tahun 2024 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dikeluarkan dari Sasaran Kinerja Kepala Perangkat Daerah, mengikuti hasil rekomendasi evaluasi SAKIP.

RENCANA KERJA TAHUN 2024

Selain IKU di atas yang menjadi bagian dari Sasaran Strategis, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Walikota juga mengampu target kinerja sasaran khusus dan sasaran operasional.

Berikut adalah Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi yang sudah direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

INDIKATOR 1: INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI

INDIKATOR 2: INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI

INDIKATOR3: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Tingkat Kota (Setko, Kecamatan, Kelurahan)

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai kota yang maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil pembangunan yang optimal	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	93.93						
2	Meningkatnya Kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan	97.52	Pengelolaan Kota Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan kota administrasi di atas 80%	Persen	2.419.568.591	
						Persentase perkara/ sengketa hukum yang ditindaklanjuti	Persen		
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	90.35	Pengelolaan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	148.180.916.728	
					Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	2.924.111.822	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	450.808.963	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	204.935.919.229	

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
				Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Nilai	13.319.875.052	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	67.440.476.343	
				Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	2.563.025.174	
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	12.005.796.718	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	10.942.479.623	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	8.062.222.568	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	79.307.652	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	45.633.575.582	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	261.019.816.576	

Rencana Aksi (RENAKSI) Pencapaian Kinerja

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan Rencana Aksi	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
1	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Bagian Hukum Setko Adm JP	Sudin Citata Kota Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	100	
2	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Bagian Hukum Setko Adm JP	Sudin Citata Kota Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	Terlaksananya Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	100	
3	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat	Bagian Hukum Setko Adm. JP	Inspektur Pembantu Kota Adm JP, Sudin LH Kota Adm JP, Sudin Bina Marga Kota Adm JP, Sudin Sumber Daya	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan	Dokumen	100	

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan Rencana	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
				Rencana Aksi	Aksi			
	Kota Administrasi		Air Kota Adm JP, Sudin Kehutanan Kota Adm JP, Bagian Hukum Setko Adm JP, Bagian KKPP Setko Adm. JP, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm JP	Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi			
4	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Bagian Hukum Setko Adm. JP	Satpol PP, Kesbangpol Kota Adm JP, Kecamatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm JP	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Dokumen	100	
5	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP	Sudin PPAPP Kota Adm JP, PKK Tingkat Kota Adm JP	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Dokumen	100	
6	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP	Sudin PPAPP Kota Adm JP, PKK Tingkat Kota Adm JP	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen	100	
7	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP	Sudin Kesehatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen	100	
8	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP	Sudin Kesehatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Laporan	100	
9	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm JP	Sudin Kesehatan Kota Adm JP, Kelurahan Kota Adm. JP	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Dokumen	100	
10	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Bagian Perekonomian Setko Adm JP	BPN, Sudin Citata Kota Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Dokumen	100	
11	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Bagian KKPP Setko Adm JP	Suban Kepegawaian Kota Adm JP, Bagian Pemerintahan Setko Adm JP	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokumen	100	
12	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Bagian KKPP Setko Adm JP	SKPD terkait	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	100	
13	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Bagian KKPP Setko Adm JP	Inspektorat, Biro ORB, Kecamatan, Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	100	
14	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Bagian KKPP Setko Adm JP	Biro ORB, Bappeda, Dinas Kominfotik, Kecamatan, Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokumen	100	
15	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Bagian KKPP Setko Adm JP	Kecamatan, Kelurahan, Biro ORB	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan	Dokumen	100	

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan Rencana	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
				Rencana Aksi	Aksi			
					dievaluasi			
16	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Bagian KKPP Setko Adm JP	Bappeda	Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	100	
17	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Bagian KKPP Setko Adm JP	Biro ORB, Inspektorat, Setko Adm JP	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	100	
18	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Bagian Keuangan Setko Adm JP	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	100	
19	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Bagian Keuangan Setko Adm JP	Bappeda, Kecamatan, Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Dokumen	100	
20	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Bagian keuangan Setko Adm JP	Badan Kasda, Kecamatan, Kelurahan, Inspektorat	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	100	
21	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Bagian keuangan Setko Adm JP	Badan Kasda, Kecamatan, Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokumen	100	
22	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm JP	-	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen	100	
23	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm JP	-	Terlaksananya Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Dokumen	100	
24	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Bagian Pemerintahan Setko Adm JP	Kecamatan, Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen	100	
25	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Bagian Pemerintahan Setko Adm JP	-	Terlaksananya Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen	100	
26	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Bagian Pemerintahan Setko Adm JP	-	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	100	
27	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Bagian Pemerintahan Setko Adm JP	Seluruh SKPD Kota Adm JP	Terlaksananya Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen	100	
28	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Bagian Pemerintahan Setko Adm JP	-	Terlaksananya Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen	100	
29	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/ Pembangunan/Rehab Total/ Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Bagian Pemerintahan Setko Adm JP	Sudin Citata, PPBJ, Sudin Perumahan	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/ Pembangunan/ Rehab Total/ Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	100	
30	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Bagian PLH Setko Adm JP	Satpol PP, Sudin Citata, Bagian Hukum Setko Adm JP	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Dokumen	100	

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan Rencana	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
				Rencana Aksi	Aksi			
31	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Bagian PLH Setko Adm JP	BPN, Tim Kota Adm JP	Terlaksananya Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Dokumen	100	
32	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Bagian PLH Setko Adm JP	SKPD terkait	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Dokumen	100	
33	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan	Setko Adm JP, 3 Pilar	Terlaksananya Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga	100	
34	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Kelurahan	3 Pilar	Terlaksananya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	100	
35	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan	Sudin Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat	100	
36	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan	SKPD terkait	Terlaksananya Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	100	
37	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan	Sudin Kebudayaan, organisasi agama terkait	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	100	
38	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan	Sudin Kebudayaan, organisasi agama terkait	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan	100	
39	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan	Sudin Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan	100	
40	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan	3 Pilar	Terlaksananya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	100	
41	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Sudin Kebudayaan, organisasi agama terkait	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan	100	
42	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Sudin Kebudayaan, organisasi agama terkait	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan	100	
43	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan, Kelurahan	Bappeda	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	100	
44	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan	SKPD terkait	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	100	

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan Rencana	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
				Rencana Aksi	Aksi			
45	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan, Kelurahan	PKK Kecamatan dan PKK Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	100	
46	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan	-	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	100	
47	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Setko Adm JP	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	100	
48	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan, Kelurahan	Kepolisian, TNI, instansi vertikal ttingkat kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	100	
49	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setko Adm JP, Kecamatan	SKPD terkait	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	
50	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	
51	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	
52	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	
53	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	
54	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm JP	-	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	
55	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	
56	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	100	
57	Penyediaan Bahan/Material	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	100	
58	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	
59	Pemeliharaan Mebel		-	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	
61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab Renaksi	Instansi Terkait Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan Rencana Aksi	Ukuran Keberhasilan Rencana Aksi	Target/ Output	% Capaian Target Output	Ket
62	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	
63	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	
64	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100	
65	Pengadaan Mebel	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	100	
66	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100	
67	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100	
68	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100	
69	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	
70	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	100	
71	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	
72	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setko Adm JP, Kecamatan	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	100	
73	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100	
74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	
75	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	
76	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Keuangan Setko Adm. JP	-	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100	
77	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Setko Adm JP, Kecamatan, Kelurahan	BPKD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	

Rencana Aksi (Renaksi)

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Kegiatan	Jadwal (per-bulan)												Output	Program	Kegiatan	Dana
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai kota yang maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil pembangunan yang optimal	Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	4	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi													Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	17.000.000
2	Meningkatnya Kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	4	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi													Dokumen			70.848.108
			4	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi													Dokumen			107.100.000
			1	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi													Dokumen			1.440.000
			2	elaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi													Dokumen			630.000
			2	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi													Dokumen			540.000
			1	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi													Dokumen			540.000
			2	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi													Laporan			45.340.000

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Kegiatan	Jadwal (per-bulan)												Output	Program	Kegiatan	Dana	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			4	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi														Dokumen			2.700.000
				Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi														Dokumen			3.600.000
			4	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi														Dokumen			4.360.000
			4	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi														Dokumen			2.517.480
			1	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi														Dokumen			7.592.400
			1	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi														Dokumen			2.164.500
			2	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi														Dokumen			1.875.900
			4	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi														Laporan			1.318.680
			1	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi														Laporan			3.197.355
			4	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi														Dokumen			44.047.290
			1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi														Dokumen			91.390.840
			4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi														Dokumen			9.372.194
			4	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi														Dokumen			4.490.000
			4	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi														Dokumen			526.149.057
			4	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi														Dokumen			302.168.000
			1	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi														Dokumen			1.890.000
			12	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi														Dokumen			926.122.381
			Sesuai jml masing2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi														Lembaga			21.792.206
			4	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi														Dokumen			70.068.000
			1	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)														Dokumen			120.738.000

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Kegiatan	Jadwal (per-bulan)												Output	Program	Kegiatan	Dana			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
			1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/ Pembangunan/Rehab Total/ Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi														Dokumen			12.726.200		
			4	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan														Dokumen			2.700.000		
			4	Penagihan Kewajiban Faso Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi														Dokumen			6.300.000		
			4	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi														Dokumen			3.250.000		
	Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Sesuai jml masing2	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan														lembaga	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	133.751.141.286		
12			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan																Laporan			6.261.295.250	
Sesuai jml masing2			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan																	Kelompok Masyarakat			1.624.572.258
1			Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan																	Laporan			316.300.969
4			Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan																	Laporan			562.201.595
1			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan																	Laporan			172.886.278
1			Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan																	Laporan			40.972.702
	Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	12	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan														Laporan		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	1.529.246.000		
4			Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan																Laporan			226.492.547	
1			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan																	Laporan			210.233.043
	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														Laporan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.808.963		

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Kegiatan	Jadwal (per-bulan)												Output	Program	Kegiatan	Dana	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														Laporan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	204.935.919.229
		Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sesuai jml masing2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													Lembaga Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.123.947.047	
			Sesuai jml masing2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													Lembaga Kemasyarakatan			195.928.005	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sesuai jml masing2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													Pokmas		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	67.440.476.343	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													Laporan	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.563.025.174	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													Laporan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.229.000	
			Sesuai jml masing2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													Paket			1.429.450.670	
			Sesuai jml masing2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													Paket			1.712.445.980	
			Sesuai jml masing2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													Paket			258.002.496	
			Sesuai jml masing2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													Paket			753.251.409	
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu													Laporan			2.439.236.922	
			1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													Dokumen			19.955.000	
			1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													Dokumen			31.380.704	
			Sesuai jml masing2	Penyediaan Bahan/Material													Paket			4.431.228.976	
			Sesuai jml masing2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor													Paket			581.615.561	
		Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sesuai jml masing2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													Unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.341.528.610	

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rincian Kegiatan	Jadwal (per-bulan)												Output	Program	Kegiatan	Dana
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			Sesuai jml masing2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													Unit			2.493.748.341
			Sesuai jml masing2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													Unit			876.611.137
			Sesuai jml masing2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													Unit			1.049.205.656
			Sesuai jml masing2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													Unit			4.181.385.879
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Pengadaan Mebel													Paket		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.925.462.465
			0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													Unit			1.284.320.513
			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													Unit			20.409.712
			Sesuai jml masing2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													Unit			73.515.695
			Sesuai masing2 kelurahan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													Unit			4.758.514.183
		Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													Paket		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.307.652
		Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													Laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.271.711.170
			12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													Laporan			20.973.077.640
			12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													Laporan			20.839.693.484
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat													Laporan			549.093.288
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	530	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													Orang/bulan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	260.857.868.020
			61	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													Dokumen			161.948.556

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Indikator kinerja di luar indikator kinerja utama (IKU) seperti sasaran khusus dan sasaran operasional, rencana kerja/ rencana aksi adalah sebagai berikut:

Sasaran Khusus

Kota Administrasi

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab Renaksi	Kegiatan	Renaksi	Target				Keterangan
					B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Bagian Keuangan Setko Adm JP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Opini Laporan Keuangan	N/A	3	N/A	N/A	WTP
2	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	PPK Setko Adm JP	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemanfaatan e-Order	100%	100%	100%	100%	
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm JP Bagian PLH Setko Adm JP	Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%	100%	
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Bagian Keuangan Setko Adm JP Bagian KKPP Setko Adm JP	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	N/A	N/A	N/A	A (82)	
5	Meningkatnya pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm JP	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase arsip aktif dalam daftar arsip aktif	N/A	100%	100%	100%	
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm JP	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan gubernur	100%	100%	100%	100%	
7	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Bagian Pemerintahan Setko Adm JP	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Survey Kepuasan Layanan Masyarakat	92	N/A	92	N/A	
8	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm JP	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/ UKPD	N/A	10%	55%	100%	
9	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Bagian PLH Setko Adm JP	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang	N/A	15%	30%	100%	

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab Renaksi	Kegiatan	Renaksi	Target				Keterangan
					B03	B06	B09	B12	
				SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan Jakarta Satu					
10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Bagian Keuangan Setko Adm JP, Bagian Umum dan Protokol Setko Adm JP, Bagian Pemerintahan Setko Adm Jp, Kecamatan, Kelurahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	N/A	N/A	N/A	80%	
11	Terimplementasinya Pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Bagian KKPP Setko Adm JP	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Implementasi Pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	N/A	N/A	N/A	100%	
12	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Bagian KKPP Setko Adm JP	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	N/A	N/A	50%	50%	
13	Implementasi penerapan manajemen resiko	Bagian Keuangan Setko Adm JP	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Implementasi penerapan manajemen resiko	N/A	40%	80%	100%	
14	Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi	Bagian Keuangan Setko Adm JP	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	N/A	N/A	N/A	71%	

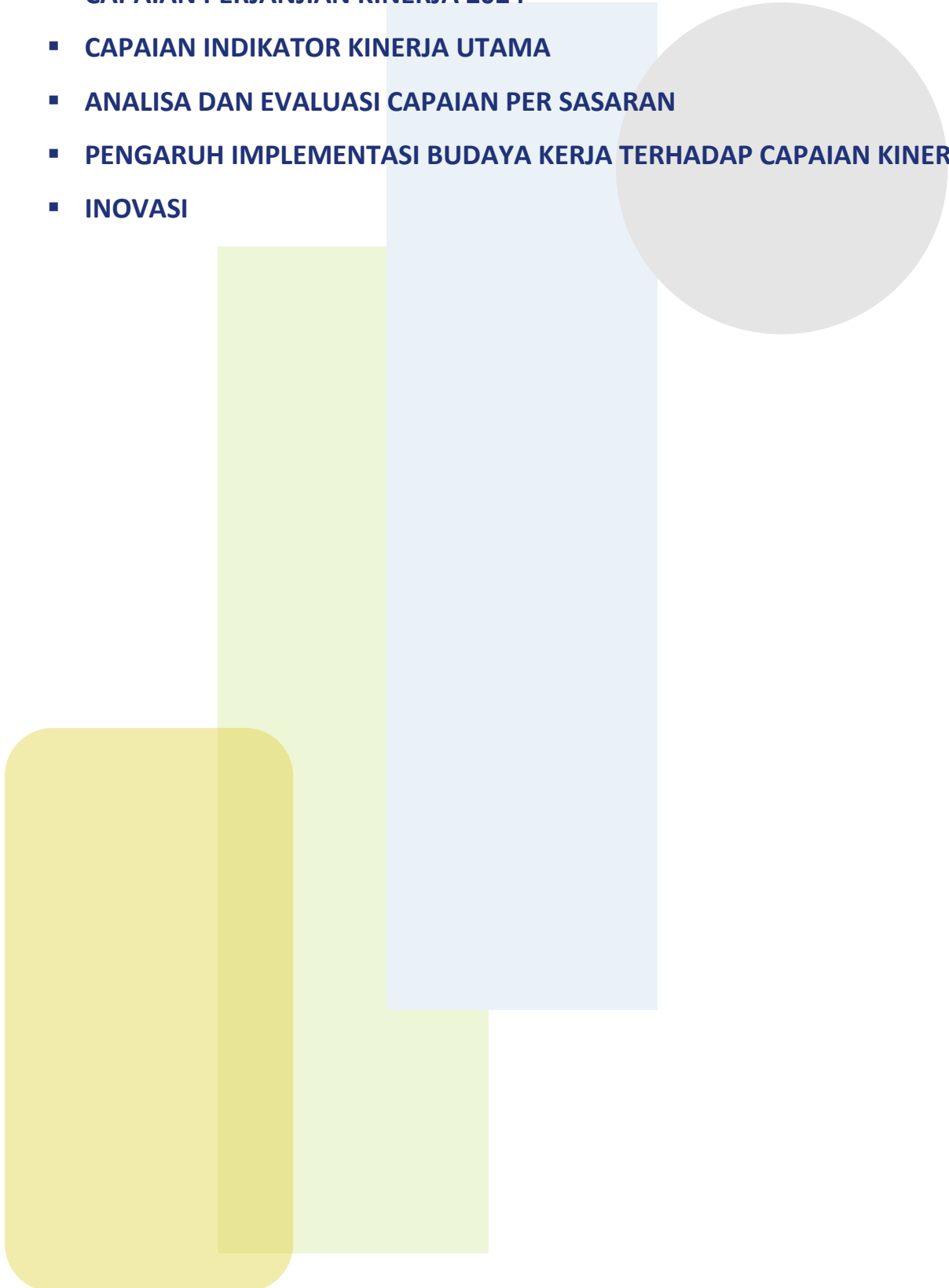
Sasaran Operasional

Kota Administrasi

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab Renaksi	Kegiatan	Renaksi	Target				Keterangan
					B03	B06	B09	B12	
1	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Bag KKPP Setk Adm JP	Tupoksi sesuai Pergub 57 Tahun 2022	Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Bag KKPP Setk Adm JP		Koordinasi Penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	
3	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Bag Keuangan Setk Adm JP		Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	25%	25%	25%	25%	



BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

- **CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2024**
 - **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
 - **ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN PER SASARAN**
 - **PENGARUH IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA**
 - **INOVASI**
- 

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah tersebut dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatannya. Akuntabilitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan amanat dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan ke dalam alporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diturunkan ke Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 mengacu pada dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026, hasil rekomendasi evaluasi SAKIP dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengemban turunan tujuan dari RPD Provinsi DKI Jakarta yang diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa satu tujuan dan dua sasaran strategis. Dengan tambahan sasaran khusus dan sasaran operasional.

Selain Indikator Kinerja Utama yang merupakan tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat juga mengemban sasaran khusus dan sasaran operasional dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 14 (empat belas) sasaran dan 15 (lima belas) indikator tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2024 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

1	Tujuan Strategis	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Sebanyak	1	Indikator
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Sebanyak	2	Indikator
3	Sasaran Khusus	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Sebanyak	1	Indikator
4	Sasaran Khusus	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Sebanyak	1	Indikator
5	Sasaran Khusus	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Sebanyak	1	Indikator

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

6	Sasaran Khusus	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Sebanyak	1	Indikator
7	Sasaran Khusus	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Sebanyak	1	Indikator
8	Sasaran Khusus	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Sebanyak	1	Indikator
9	Sasaran Khusus	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Sebanyak	1	Indikator
10	Sasaran Khusus	Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	Sebanyak	1	Indikator
11	Sasaran Khusus	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Sebanyak	1	Indikator
12	Sasaran Operasional	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Sebanyak	1	Indikator
13	Sasaran Operasional	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Sebanyak	1	Indikator
14	Sasaran Operasional	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Sebanyak	1	Indikator

Tabel 14 Rincian 14 (empat belas) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator kinerja 2024

Sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja tambahan. Reviu dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Tabel T-E.1 (dengan penyesuaian) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	$\geq 90.01\%$	Sangat Tinggi
2	$75.01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65.01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50.01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 5\%$	Sangat Rendah

Tabel 15 Skala Nilai Peringkat Kerja (sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan penyesuaian)

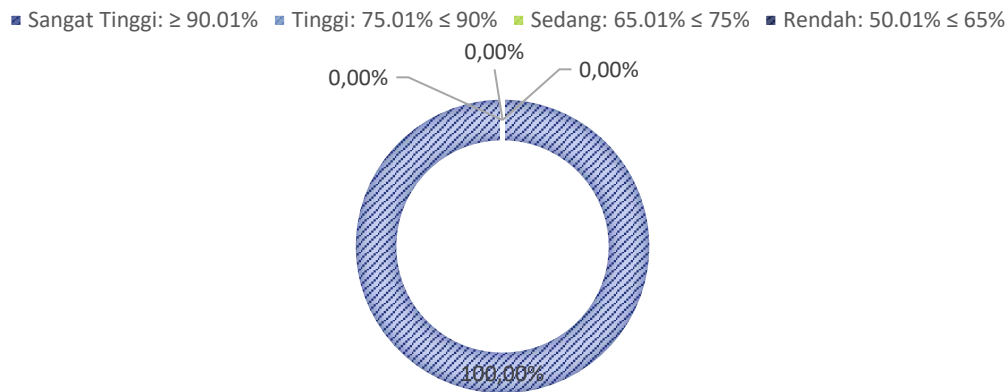
Secara umum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026, Renstra 2023-2026, serta amanat yang diberikan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SATUAN	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Sasaran Strategis					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Nilai	93.93	97.77	104.08
2	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Nilai	97.52	98.98	101.5
		Nilai	90.35	96.55	106.86
Sasaran Khusus					
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Nilai	100	WTP (3)	100
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Persentase	3.25	4	123.08
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Persentase	92	92	100
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Predikat (Nilai)	100	100	100
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase	80	92.44	115.55
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase	100	100	100
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Nilai	100	100	100
10	Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	Persentase	100	100	100
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase	71	88.24	124.28
Sasaran Operasional					
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100	99.99	99.99
14	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100

Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Utama dan tambahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 sebagaimana grafik dan tabel berikut:



Grafik 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, Sasaran Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: Data diolah Bagian KKPP, 2025)

No	Predikat	Rata-Rata % Capaian	Jumlah Indikator
1	2	3	4
1	Sangat Tinggi	$\geq 90.01\%$	15
2	Tinggi	$75.01\% \leq 90\%$	0
3	Sedang	$65.01 \leq 75\%$	0
4	Rendah	$50.01\% \leq 65\%$	0
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$	0
6	N/A		0
Jumlah			15

Tabel 17 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis, sasaran khusus, sasaran operasional pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-50	50.01-65	65.01-75	75.01-90	≥ 90.01
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran Strategis								
Indikator Kinerja Utama (IKU)								
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	1	104.08					√

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-50	50.01-65	65.01-75	75.01-90	≥ 90.01
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	2	104.08					√
Sasaran Khusus								
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	1	100					√
4	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	1	123.08					√
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	100					√
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	100					√
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	115.55					√
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	1	100					√
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	100					√
10	Implementasi Penerapan Manajemen Resiko	1	100					√
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	124.28					√
Sasaran Operasional								
12	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	100					√
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	99.99					√
14	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	100					√

Tabel 18 Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama dan tambahan, atau indikator sasaran strategis, khusus dan operasional, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama dan tambahan pada:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

IKU:

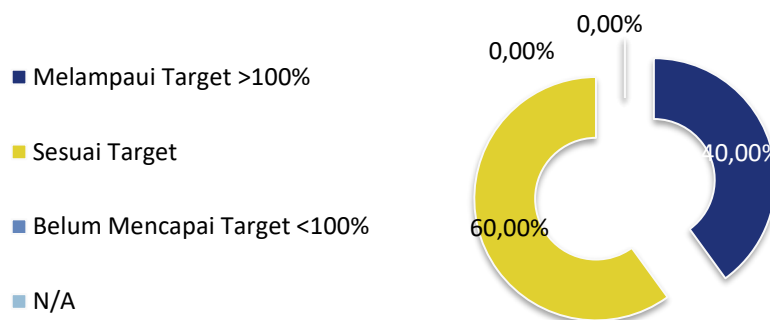
- A. Tujuan Strategis: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal.
- Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, capaian 104,08%
- B. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, capaian 101,5%
 - Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi, capaian 106,86%

Indikator Kinerja lainnya:

- C. Sasaran Khusus: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah
- Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program, capaian 100%
- D. Sasaran Khusus: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas
- Nilai kualitas data SDI, capaian 123.08%
- E. Sasaran Khusus: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
- Survey Kepuasan Layanan Masyarakat, capaian 100%
- F. Sasaran Khusus: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
- Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang, capaian 100%
- G. Sasaran Khusus: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, capaian 115.55%
- H. Sasaran Khusus: Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun
- Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun, capaian 100%

- I. Sasaran Khusus: Meningkatnya Manajemen Pengetahuan
 - Persentase penyelesaian tahapan Manajemen Pengetahuan, capaian 100%
- J. Sasaran Khusus: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko
 - Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, capaian 100%
- K. Sasaran Khusus: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi
 - Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi, capaian 124.28%
- L. Sasaran Operasional: terselesaikannya tindak lanjut arahan Gubernur
 - Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur, capaian 100%
- M. Sasaran Operasional: Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat
 - Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat, capaian 99.99%
- N. Sasaran Operasional: terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
 - Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), capaian 100%

Hasil capaian seluruh Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024, sebagai berikut:



Grafik 5 Capaian seluruh Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Sebanyak 60% indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat telah melampaui target dengan sisa 40% mencapai target. Hasil dari capaian di atas turut didukung program Kota Administrasi Jakarta Pusat. Program-program tersebut telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan Dokumen RPD 2023-2026.

Indikator-indikator kinerja di luar IKU/ Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat, tidak termasuk dalam kinerja yang diambil dari cascading Dokumen RPD 2023-2026, tetapi indikator-indikator tersebut adalah indikator kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tidak terpisahkan dan mendukung Indikator Kinerja Utama Walikota secara keseluruhan sehingga diperlukan penjelasan di dalam laporan ini.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Guna pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sebelum pembahasan lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja. Secara umum akuntabilitas kinerja adalah jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

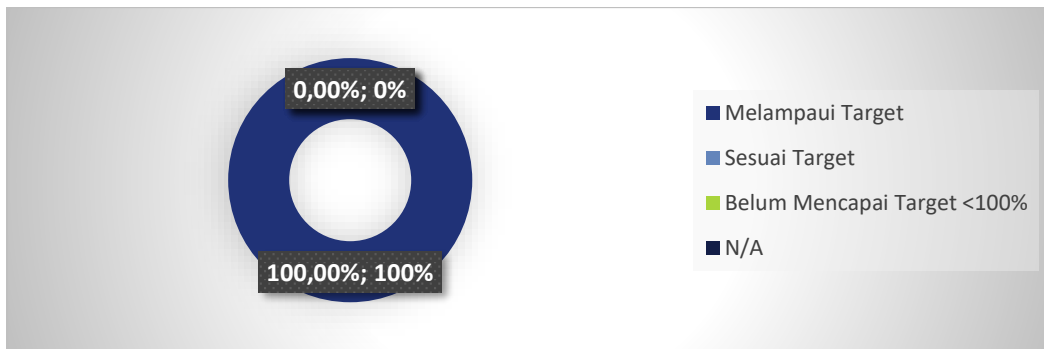
Kewajiban melakukan akuntabilitas kinerja dimiliki oleh perorangan, Badan Hukum, Pimpinan Kolektif. Berakuntabilitas menjadi hal wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku pengemban amanat Pemerintah Daerah dan amanah masyarakat. Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPD 2023-2026, Renstra 2023-2026, dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2026, Renstra 2023-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tercermin pada Perjanjian Kinerjanya, menjadi:

- Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan
- Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi



Grafik 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Grafik di atas merupakan hasil capaian Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 yang terdiri dari Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.

ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN PER SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran 1: Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal

Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal merupakan Tujuan Strategis yang diamanatkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam dokumen Renstra 2023-2026. Indikator Tujuan Strategis tersebut adalah Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/ kabupaten administrasi.

Berikut beberapa perbandingan untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat di Tahun 2024:

Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Capaian kinerja Tujuan Strategis 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93.93	97.77	104.08%

Tabel 19 Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
1	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	97.46	98.07

Tabel 20 Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat per-semester Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 berdasarkan Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2023 dan tidak mengikuti rencana pada Dokumen Renstra 2023-2026 Tahun kedua. Dari target baru sebesar 93.93 capaian Indeks kepuasan layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 mencapai 104.08%. Realisasi semester I sebesar 97.46 dan semester II 98.07, menunjukkan peningkatan per semester.

Perbandingan dengan periode sebelumnya

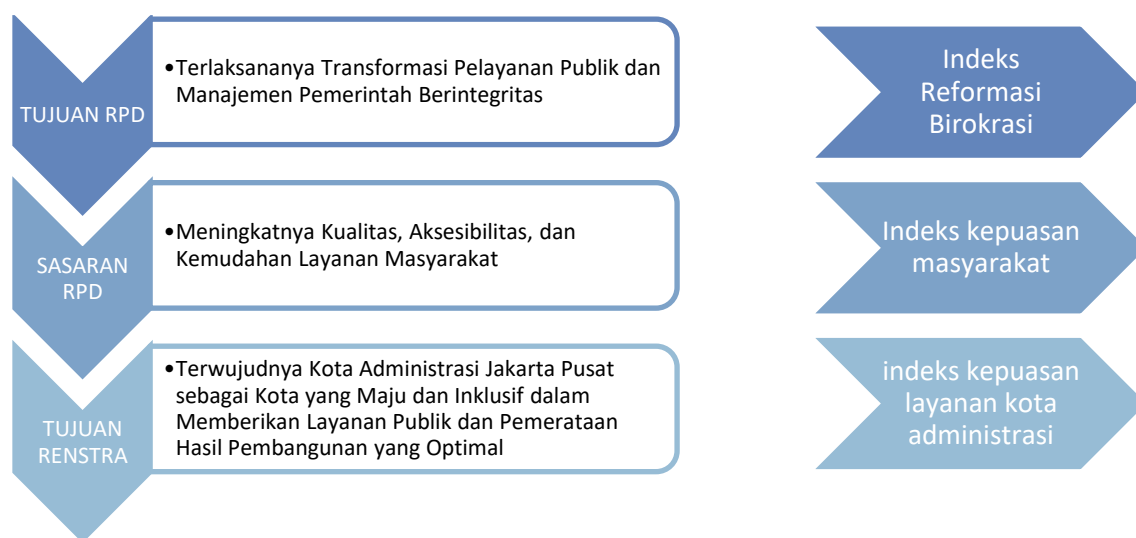
Sebagai perbandingan Indikator Tujuan Strategis periode sebelumnya adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang setelah proses dievaluasi dinilai terlalu tinggi untuk dijadikan indikator tujuan strategis kota mengingat posisi kota di provinsi DKI Jakarta adalah Kota Administrasi yang tidak memiliki otoritas seperti kota lain di Indonesia. Oleh sebab itu dirumuskan indikator Tujuan Strategis yang baru dalam dokumen Renstra 2023-2026 berupa indeks kepuasan layanan kota Administrasi untuk menjawab kekhususan kelembagaan kota/ kabupaten di Jakarta. Untuk melihat capaian kinerja tujuan strategis periode sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Reformasi Birokrasi	85	78.88	92.88	91	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
2	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	-	-	-	-	-	-	86.75	93.93	108.28	86.75	97.77	104.08

Tabel 21 Perbandingan Capaian Kinerja tujuan strategis periode sebelumnya diwakili Tahun 2021-2022 dengan Tahun 2023 - 2024

Perbandingan dengan Target RPD 2023-2026

Pada Governance Dimension dalam dokumen RPD 2023-2026, sasaran strategis yang menjadi acuan Kota Administrasi dalam penyusunan tujuan strategisnya adalah “Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan Masyarakat”. Sasaran strategis tersebut menjadi acuan Tujuan Renstra Kota Administrasi dengan Indikator yang merupakan konsolidasi dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.



No	Indikator Kinerja	Target RPD 2023-2026	Target Tujuan Renstra Kota Adm JP 2024	Target Perkin JP 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	-	87.3	93.93	97.77

Tabel 22 Perbandingan target Indeks kepuasan layanan kota administrasi dengan target dalam RPD 2023-2026

Pada Perjanjian Kinerja 2024 target Indikator Kinerja Utama disesuaikan adanya rekomendasi evaluasi SAKIP yang menemukan bahwa realisasi tahun sebelumnya telah melebihi target. Realisasi sebesar 93,93 dijadikan sebagai target untuk tahun berikutnya yaitu Tahun 2024 dan jauh lebih tinggi

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

dibandingkan perencanaan pada tahun kedua di Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 87,3.

Perbandingan dengan Standar Nasional

Dengan kekhususan bentuk Kota Administrasi, maka tugas dan fungsi Walikota Kota Administrasi berbeda dengan tugas dan fungsi Walikota terpilih. Hal tersebut membuat Indikator dan target Kota Administrasi memiliki kekhususan yang tidak dapat ditemukan perbandingannya dengan standar nasional. Di bawah adalah data perbandingan dengan Kota dan Kabupaten Administrasi lain yang memiliki target sama.

No	Indikator Kinerja	Jakarta Pusat 2024	Jakarta Barat 2024	Jakarta Selatan 2024	Jakarta Timur 2024	Jakarta Utara 2024	Pulau 1000 2024	Benchmark Nasional 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks kepuasan layanan kota administrasi	97.77	95.99	95.61	96.66	96.95	93.32	-

Tabel 23 Perbandingan dengan kota dan kabupaten administrasi; dan standar nasional 2024

Sasaran 2: Meningkatnya kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal

Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal Indikatornya adalah:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
2. Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik pada unsur kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK, penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengerahan juru pemantau jentik (Jumantik), pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RT, LMK dan FKDM).

Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	97.52	98.98	101.5

Tabel 24 Realisasi Indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Tahun 2024 melebihi target dengan capaian 101.5%.

Realisasi per semester, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	98.63	98.98

Tabel 25 Realisasi Indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)” Kota Administrasi Jakarta Pusat Semester I dan II Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) mengalami peningkatan dari Tahun 2023 dan terus meningkat per semester di Tahun 2024. Realisasi Tahun 2023 sebesar 97.52 dari target 88.5, dan realisasi Tahun 2024 adalah 98.63 di semester I dan 98.98 di semester II, ada kenaikan di setiap semester.

Perbandingan dengan periode sebelumnya

Target Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan Tahun 2024 sama dengan realisasi di Tahun 2023 yaitu 97,52 dan lebih tinggi dari perencanaan tahun kedua pada Dokumen Renstra 2023-2026 yaitu 88,6. Survey dilaksanakan di semester I dan semester II untuk 7 (tujuh) indikator pelayanan.

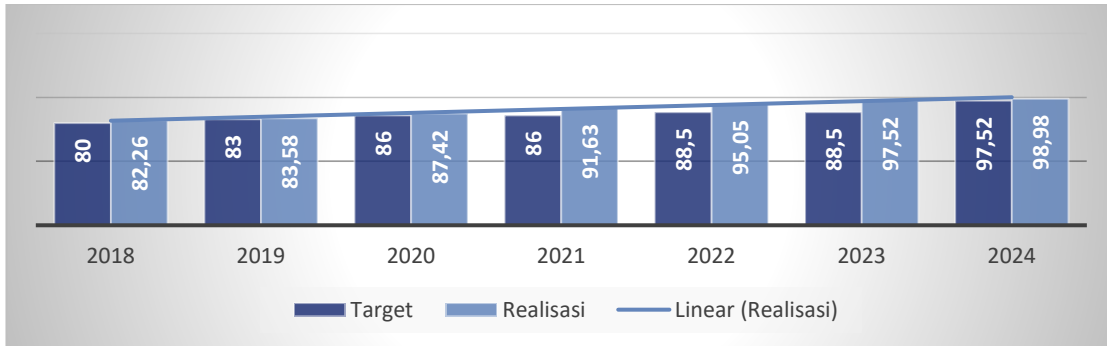
No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	80	82.26	102.8	83	83.58	100.7	86	87.42	101.6	86*	91.63	106.5	88.5	95.05	107.4

Tabel 26 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2018-2022

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		T	T	T	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	88.5	97.52	110.19	97.52	98.98	101.5

Tabel 27 Capaian Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2023-2024



Grafik 7 Tren Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Adm Jakarta Pusat Tahun 2018-2024



Gambar 5 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I, 2024 (sumber: Kelurahan Kwitang)

Perbandingan dengan Target RPD 2023-2026

Target Pada Dokumen RPD 2023-2026 dan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026 yaitu sebesar 88,6, sementara target pada Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 telah disesuaikan mengikuti rekomendasi hasil monev SAKIP, mengikuti realisasi dari tahun sebelumnya yaitu 97,52 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024).

Pada Tahun 2024, dari 44 Kelurahan yang melakukan pengukuran IKM semua Kelurahan masuk dalam Kategori Predikat Sangat Baik atau 100% memperoleh nilai di antara 88,31-100,00.

Untuk survei pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui sistem jaksurvei, hasil agregat IKM Kota pada Tahun 2024 menjadi rata-rata 98,98. Realisasi ini telah melampaui target RPD untuk nilai IKM sebesar 88,6 di tahun 2023. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan tren positif dengan realisasi yang selalu melebihi target. Capaian indikator mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah 102.83%; 100.7%; 101.65%; 106.55%, 107.4%, 110,19%, dan 101.5%.



Gambar 6 Tim Penggerak PKK Kelurahan melakukan monitoring Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) (sumber: PKK Kelurahan Cideng)



Gambar 7 Area RPTRA Harapan Mulya yang dijadikan tempat ketahanan pangan keluarga dan sarana pengetahuan bagi anak (sumber: Sudin Kominfo JP)

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan. Total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Contoh untuk dimensi kinerja, nilai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (TS), nilai 3 (Setuju), dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan nilai

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

dasar 25 untuk mendapatkan selang penilaian antara 25-100 sehingga diperoleh nilai IKM. Nilai IKM kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori A (sangat baik), B (baik), C (kurang baik), dan D (tidak baik), sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,07-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,54-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Tabel 28 Tabel Nilai IKM (PermanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)



Gambar 8 Monitoring pemberantasan sarang nyamuk (PSN), Kelurahan Kwitang (sumber Sudin Kominfotik Kota Adm JP)

Gambar 9 Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Posyandu Melati RW 08 Kelurahan Tanah Tinggi (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP)



Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan nilai IKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain, serta nilai IKM beberapa kota di Indonesia, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Nilai IKM Tahun 2024						Nilai IKM Bandung Tahun 2024	Nilai IKM Cirebon Tahun 2024	Nilai IKM Depok Tahun 2024
		Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Kep. 1000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	98.98	96.80	97.91	96.18	97.53	95.93	88.72	86.85	84.75

Tabel 29 Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain serta nilai IKM beberapa kota di Indonesia (sumber: monev2024.bapedadki.net/ dan hasil pencarian melalui internet)

Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2024 berada di atas nilai IKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi lain; serta lebih tinggi dibandingkan nilai IKM Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kota Depok Tahun 2024. Nilai IKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta sudah berada pada kategori “Sangat Baik” dan nilai IKM Kota Bekasi, kota Madiun, dan Kota Depok berada pada kategori “Baik.”



Gambar 10 Penertiban bangunan liar dan lapak PKL Kelurahan Petojo Utara (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP)

Gambar 11 Penataan kawasan oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Petamburan (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP)



Gambar 12 Penilaian RT/ RW terkait administrasi kependudukan tingkat kelurahan (sumber: Sudin Kominfotik Kota Adm JP)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Survei pelayanan publik pada perangkat daerah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM). Terdiri dari 9 (Sembilan) unsur, yaitu: persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

No	Unsur Pelayanan	Kode Unsur Pelayanan
1	2	3
1	Persyaratan	U1
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	U2
3	Waktu penyelesaian	U3
4	Biaya/ tarif	U4
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	U5
6	Kompetensi pelaksana	U6
7	Perilaku pelaksana	U7
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	U8
9	Sarana dan prasarana	U9

Tabel 30 Unsur Pelayanan

Pelaksanaan SKM dilakukan dengan menggiatkan koordinasi pelaksanaan dengan tingkat Kelurahan, Kecamatan, UP Statistik Dinas Kominfo, dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta. Survey dilaksanakan melalui link jaksurvei dengan tarikan data langsung dikelola oleh UPT Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 13 Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Wilayah Semester 1 Tahun 2024

Berdasarkan hasil SKM Tahun 2024 diperoleh data dari 44 Kelurahan yang melakukan pengukuran IKM, nilai rata-rata seluruh Kelurahan masuk dalam Kategori Mutu A. Dari analisa nilai rata-rata terendah ada pada unsur U2 (sistem, mekanisme dan prosedur) sebesar 99.18 dan U1 (persyaratan) sebesar 99,20. Patut dicatat bahwa nilai terendah ini sudah berada jauh di atas batas kategori A yaitu 88.31, dan hanya ada perbedaan angka di belakang koma untuk menentukan peringkat nilai rata-rata tertinggi dan terendah dari kesembilan unsur yang ditanyakan. Secara keseluruhan ketujuh pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan sudah bisa dinilai maksimal.

No	Kelurahan	SKM 2024			Mutu SKM 2024
		Triwulan I	Triwulan II	Rata-rata	
1	2	3	4	5	6
1	Bendungan Hilir	98.87	99.26	99.06	A
2	Bungur	99.75	99.99	99.87	A
3	Cempaka Baru	99.77	98.59	99.18	A
4	Cempaka Putih Barat	99.87	99.94	99.90	A
5	Cempaka Putih Timur	100	100	100.00	A
6	Cideng	98.34	99.39	98.86	A
7	Cikini	99.88	100.00	99.94	A
8	Duri Pulo	95.20	99.65	97.42	A
9	Galur	100	99.96	99.98	A
10	Gambir	97.18	99.10	98.14	A
11	Gelora	99.96	99.95	99.95	A
12	Gondangdia	99.75	99.75	99.75	A
13	Gunung Sahari Selatan	95.92	99.75	97.83	A
14	Gunung Sahari Utara	99.26	99.97	99.61	A
15	Harapan Mulia	99.91	91.42	95.66	A
16	Johar Baru	99.38	99.78	99.58	A
17	Kampung Bali	99.81	99.34	99.57	A
18	Kampung Rawa	99.94	99.60	99.77	A
19	Karang Anyar	99.99	99.93	99.96	A
20	Karet Tengsin	100	99.88	99.94	A
21	Kartini	99.99	99.58	99.78	A
22	Kebon Kacang	99.25	99.99	99.62	A
23	Kebon Kelapa	95.55	96.96	96.25	A
24	Kebon Kosong	99.85	99.96	99.90	A
25	Kebon Melati	99.54	99.03	99.28	A
26	Kebon Sirih	100	100	100.00	A
27	Kemayoran	95.26	99.60	97.43	A
28	Kenari	98.93	98.43	98.68	A
29	Kramat	99.63	99.90	99.76	A
30	Kwitang	98.09	97.15	97.62	A
31	Mangga Dua Selatan	99.91	100.00	99.95	A
32	Menteng	97.51	99.55	98.53	A
33	Pasar Baru	99.26	96.89	98.07	A
34	Paseban	99.99	99.89	99.94	A
35	Pegangsaan	99.96	100.00	99.98	A
36	Petamburan	98.60	96.85	97.72	A
37	Petojo Selatan	99.31	100.00	99.65	A
38	Petojo Utara	82.36	99.21	90.78	A
39	Rawasari	99.16	99.86	99.51	A
40	Senen	99.55	100.00	99.77	A
41	Serdang	95.54	99.70	97.62	A
42	Sumur Batu	95.59	98.78	97.18	A
43	Tanah Tinggi	97.11	99.28	98.19	A
44	Utang Panjang	99.99	100.00	99.99	A

Tabel 31 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 (diolah UPT Pengelola Statistik, 2024)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan total jumlah responden yang masuk yaitu sebesar 66.433 responden selama Tahun 2024, unsur utama yang diprioritaskan untuk perbaikan adalah persyaratan. Diketahui masih ada masyarakat di sekitar yang belum menyadari bahwa ketujuh pelayanan yang diberikan dan disurvei ini tidak memerlukan persyaratan tertentu dan tidak dipungut biaya. Sehingga disusun oleh masing-masing kecamatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang antara lain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan layanan pada Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan sudah dilaksanakan.

Hasil survei kepuasan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sangat baik ini juga ditunjang oleh kesiapan wilayah dalam menangani aduan masuk melalui kanal-kanal resmi dan diproses melalui sistem CRM (Cepat Respons Masyarakat) sehingga aduan khususnya seputar prasarana bisa ditangani dengan segera oleh petugas PPSU Kelurahan.

Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi

Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi adalah penilaian outcome yang dibuat Provinsi DKI Jakarta untuk menjawab kekhususan struktur kota di Jakarta. Dengan Pemimpin yang ditunjuk dan bukan pimpinan politik seperti kota lain di Indonesia, Kota dan Kabupaten menjadi salah satu Perangkat Daerah di bawah Provinsi DKI Jakarta dengan bentuk Kota/ Kabupaten Administrasi. Konsekuensinya adalah suku dinas dan suku badan kota memiliki hubungan koordinasi dan bukan berada di bawah komando Walikota. Dengan hubungan unik seperti ini diperlukan usaha koordinasi yang baik untuk memastikan wilayah Kota tetap terlayani dengan baik oleh suku dinas dan suku badan di wilayah tersebut, dan anggaran teknis yang sudah direncanakan terlaksana sesuai jadwal.

Perbandingan target dengan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Indeks Efektivitas Koordinasi	90.35	96.55	106.86

Tabel 32 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)

Pada Tahun pertamanya di Tahun 2023 Indikator Kinerja “Indeks Efektivitas Koordinasi” mencapai target dengan rata-rata 90,35 dari target 85 atau capaian rata-rata 106,3%. Target di Tahun 2024 dinaikkan sesuai realisasi Tahun 2023 menjadi 90.35 dan hasilnya di atas target yaitu 96.55 dengan capaian 106.86%.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
1	Indeks Efektivitas Koordinasi	96.29	96.81

Tabel 33 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)

Realisasi Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2024 adalah 96.29 di semester I dan 96.81 di semester II, ada kenaikan di setiap semester.

Realisasi Indeks Efektivitas Koordinasi berdasarkan Asisten adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
1	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	95.70	95.90
2	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	97.60	97.43
3	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	95.56	97.11

Tabel 34 Realisasi Indikator “Indeks efektivitas koordinasi” per-Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat semester I dan II Tahun 2024 (sumber: monev2024.bapedadki.net/)

Pada semester II berdasarkan hasil survei nilai tertinggi Efektivitas Koordinasi ada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan realisasi 97,60. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat pada semester I Tahun 2023 sebesar 82,18 mengalami kenaikan signifikan pada semester I Tahun 2024 menjadi 95,56.

Pada semester II berdasarkan hasil survei nilai tertinggi Efektivitas Koordinasi ada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan realisasi 97.43. Secara keseluruhan nilai koordinasi ketiga asisten di Tahun 2024 telah berada di atas target.

1. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan

Secara detail, pada semester I nilai variabel tertinggi untuk koordinasi Asisten Pemerintahan ada pada Indikator Produk Pelayanan dan Perilaku pelaksana. Akan tetapi nilai variabel terendah juga ada pada Indikator Perilaku Pelaksana. Pada semester II nilai tertinggi didapatkan dari Indikator Produk Pelayanan, nilai terendah pada Perilaku Pelaksana.

Indikator	Variabel	Nilai Variabel	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
Persyaratan Pelayanan	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	96.43	96.43
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	96.43	96.43

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Waktu	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	96.43	96.43
Biaya	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	96.43	96.43
Produk pelayanan	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	92.86	100
	Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama	100	100
Kompetensi pelaksana	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	92.86	96.43
	Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	96.43	96.43
	Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	96.43	92.86
Perilaku pelaksana	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	100	92.86
	Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	82.14	85.71
Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	96.43	96.43
Sarana dan prasarana	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	96.43	96.43

Tabel 35 Nilai efektivitas koordinasi bidang Pemerintahan per-variabel Tahun 2024 (sumber: Dinas Kominfo JP)

Tiga saran dan masukan teratas yang diterima dari survei untuk koordinasi Asisten Pemerintahan, masuk dalam kategori:

- Optimalisasi koordinasi
- Pertahankan kinerja
- Meningkatkan kinerja



Gambar 14 Rapat Koordinasi bidang Asisten Pemerintahan Sekko Adm Jakarta Pusat TW I Tahun 2024 (sumber: Bagian KKPP)

2. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Untuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada semester I mendapatkan hasil survei tertinggi di antara ketiga asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Semester I Tahun 2024. Nilai variabel tertinggi pada Indikator Kompetensi Pelaksana, Perilaku pelaksana, dan Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan. Nilai variabel terendah ada pada Indikator Produk Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.

Pada semester II Asisten Perekonomian dan Pembangunan masih mendapatkan hasil survei tertinggi di antara ketiga asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat. Nilai variabel tertinggi pada Indikator Persyaratan Pelayanan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu, Biaya, Perilaku pelaksana, Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan, dan Sarana dan Prasarana. Nilai variabel terendah ada pada Indikator Kompetensi Pelaksana.

Indikator	Variabel	Nilai Variabel	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
Persyaratan Pelayanan	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	97.73	97.73
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	97.73	97.73
Waktu	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	97.73	97.73
Biaya	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	97.73	97.73
Produk pelayanan	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	97.73	97.73
	Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama	93.18	95.45
Kompetensi pelaksana	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	97.73	95.45
	Mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan	95.45	97.73
	Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	100	97.73
Perilaku pelaksana	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	100	97.73
	Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	93.18	97.73
Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	100	97.73
Sarana dan prasarana	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	97.73	97.73

Tabel 36 Nilai efektivitas koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan per-variabel Tahun 2024 (sumber: Dinas Kominfo JP)

Saran dan masukan teratas yang diterima dari survei untuk koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, masuk dalam kategori mempertahankan kinerja.



Gambar 15 Rapat Koordinasi bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan I Tahun 2024 (sumber: bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup)

3. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Pada penilaian efektivitas koordinasi semester I nilai variabel tertinggi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat ada pada Indikator Sistem, mekanisme dan Prosedur, dan Biaya. Nilai variabel terendah ada pada Indikator Persyaratan Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.

Pada semester II nilai variabel tertinggi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat ada pada Indikator Persyaratan Pelayanan, Sistem, mekanisme dan Prosedur, Waktu, Biaya, Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan, dan Sarana dan Prasarana. Nilai variabel terendah ada pada Indikator Perilaku Pelaksana.

Indikator	Variabel	Nilai Variabel	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
Persyaratan Pelayanan	Mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi	91.67	97.92
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi	97.92	97.92
Waktu	Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai	95.83	97.92
Biaya	Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi	97.92	97.92
Produk pelayanan	Tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi	93.75	95.83
	Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama	95.83	95.83
Kompetensi pelaksana	Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan	95.83	95.83
	Mampu memproses informasi yang masuk dan	93.75	97.92

Indikator	Variabel	Nilai Variabel	
		Semester I	Semester II
1	2	3	4
Perilaku pelaksana	memberikan umpan balik yang relevan		
	Mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya	93.75	93.75
	Sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi	97.92	95.83
Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi	89.58	93.75
	Menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi	95.83	97.92
Sarana dan prasarana	Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi	97.92	97.92

Tabel 37 Nilai efektivitas koordinasi bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat per-variabel Tahun 2024 (sumber: Dinas Kominfotik JP)

Tiga saran dan masukan teratas yang diterima dari survey untuk koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, masuk dalam kategori:

- Optimalisasi koordinasi
- Inovasi
- Pertahankan kinerja



Gambar 16 Rapat Koordinasi bidang Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm Jakarta Pusat Triwulan II Tahun 2024 (sumber: bagian Kesejahteraan Rakyat)

Perbandingan dengan periode sebelumnya

Indeks Efektivitas Koordinasi adalah indikator kinerja baru pada Dokumen Renstra 2023-2026 sebagai perbaikan untuk menunjukkan kualitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat terutama di tingkat Sekretariat Kota.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018-2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks efektivitas Koordinasi	-	-	-	85	90.35	106.29	90.35	96.55	106.86

Tabel 38 Realisasi Indikator "Indeks efektivitas koordinasi" Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023-2024 dibandingkan periode sebelumnya (sumber: monev2024.bapedadki.net/)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Target Indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi belum dirumuskan pada periode 2018-2022. Realisasi Tahun 2023 adalah 90.35 yang menjadi target untuk Tahun 2024 dengan realisasi 96.55. Capaian Tahun 2023 106.29% dan Tahun 2024 106.86%.

Perbandingan dengan Target RPD 2023-2026

Pada Governance Dimension dalam dokumen RPD 2023-2026, sasaran strategis yang menjadi acuan Kota Administrasi dalam penyusunan tujuan strategisnya adalah “Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan Masyarakat”. Sasaran strategis tersebut menjadi acuan Tujuan Renstra Kota Administrasi dengan Indikator yang merupakan konsolidasi dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Pada Tahun 2024 target yang direncanakan pada Dokumen Renstra 2023-2026 disesuaikan untuk Perjanjian Kinerja mengikuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga target dari 86 diangkat menjadi 90.35.

No	Indikator Kinerja	Target RPD 2023-2026	Target Sasaran Renstra Kota Adm JP 2024	Target Perjanjian Kinerja Kota Adm JP 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Efektivitas Koordinasi	-	86	90.35	96.55

Tabel 39 Perbandingan target Indeks efektivitas koordinasi dengan target dalam RPD 2023-2026

Indikator Indeks Efektivitas Koordinasi ini merupakan pengembangan dari tujuan strategis pada dokumen RPD 2023-2026 dan diadaptasi dengan sifat tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Perbandingan dengan Standar Nasional

Indikator sasaran strategis ini direncanakan khusus untuk kota dan kabupaten administrasi di mana suku dinas dan suku badan memiliki hubungan koordinatif dengan sekretariat kota di mana keefektifan pola hubungan tersebut berpengaruh pada kinerja Walikota/ Bupati. Karena alasan ini maka indikator sasaran strategis Indeks Efektivitas Koordinasi tidak memiliki perbandingan nasional. Berikut perbandingan realisasi Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2024 antara Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Indikator Kinerja	Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2024						Standar Nasional
		Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Kep. 1000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Efektivitas Koordinasi	96.55	94.42	95.42	95.81	96.38	90.71	-

Tabel 40 Perbandingan dengan standar nasional 2024

Hasil tertinggi pada Tahun 2024 dari Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan nilai 96.55 dan nilai terendah untuk Kota Administrasi adalah 94.42 dari Kota Administrasi Jakarta Selatan dan secara keseluruhan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar 90.71.

Belum ditemukan perbandingan nasional dan internasional untuk indikator kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi.

Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

Dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pengguna memanfaatkan teknologi sistem informasi terkait efektivitas pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

- Perencanaan: menggunakan <https://rpd.bapedadki.net/>, <https://musrenbang.jakarta.go.id/>, aktivitas.bapeda.net, <https://eharga.jakarta.go.id/>, Smart Planning Budgeting (apbd.jakarta.go.id);
- Sistem Informasi Monev di Tahun 2024: (monev2024.bapedadki.net),
- Kegiatan Strategis Daerah yang mendukung IKU (ksd.jakarta.go.id),
- Penetapan kinerja individu dan realisasinya yang mendukung kinerja organisasi: [e-tpm](https://etpp.jakarta.go.id) (etpp.jakarta.go.id), dan
- Penerimaan pengaduan dari masyarakat yang bersumber dari tiga belas kanal yang telah disediakan disatukan ke dalam sistem Cepat Respon Masyarakat (crm.jakarta.go.id).

Dengan menggunakan sistem/ aplikasi di atas Pemerintah Kota Administrasi dapat berkinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

Analisa Program dan Kegiatan/ KSD Pendukung

Implementasi kepuasan layanan kota administrasi, dengan indikator sasaran strategis yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Tahun 2024 dilaksanakan melalui 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 779.977.900.621,00 dan direalisasikan Rp. 746.367.815.588,00. Capaian realisasi sebesar 95,69%, turun dari capaian Tahun 2023 sebesar 96,63%, tetapi masih lebih tinggi dari serapan anggaran Tahun 2022 sebesar 93,77%.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Guna mencapai target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Pusat yang terdiri dari satu tujuan strategis dan satu sasaran strategis, dalam perencanaannya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyusun sub kegiatan-sub kegiatan yang dibagi ke dalam lima program dan empat belas kegiatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Program	No	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	1	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi
3	Program Pengelolaan Kecamatan	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		3	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
		4	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
5	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel 41 Program dan Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024

Secara keseluruhan kelima program mendukung tersebut mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan difokuskan menggunakan Program Pengelolaan Kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dan Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dan Efektivitas Koordinasi difokuskan dalam Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai nomenklatur digunakan sebagai pendukung sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan operasional kinerja.

Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 di atas telah dirumuskan dengan seksama untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kelima program dan empat belas kegiatan tersebut secara keseluruhan dijalankan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan secara cascading mulai dari tujuan dan sasaran strategis, ke program, kegiatan, dan ke sub kegiatan.

Selain perencanaan program dan kegiatan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga melaksanakan Kegiatan Strategis Daerah yang dirumuskan dalam Keputusan Gubernur Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi dan diturunkan ke Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di Tahun 2024, antara lain:

No	KSD	Sub KSD	Renaksi	Target (%)	Realisasi (%)
1	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	PERWUJUDAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PREDIKAT A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	100	100
			Penyusunan Pedoman Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	100	100
			Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	100	100
			Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	100	100
		PENINGKATAN PROFESIONALITAS SDM PEMPROV DKI JAKARTA	Pembaharuan Keppub 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100	100
			Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024	100	100
TRANSFORMASI DIGITAL	Implementasi Manajemen Risiko SPBE	100	100		
2	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat	100	100
3	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN	PENYEDIAAN JALAN DAN INFRASTRUKTUR PELENGKAPNYA	Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Provinsi DKI Jakarta	100	100
			Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang	100	100
		PENATAAN KAWASAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH WALIKOTA/BUPATI	Implementasi Hasil Kajian Penataan Kawasan	100	100
			Penataan RW kumuh sebagai pilot project Penataan Kawasan	100	100
			Implementasi Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan	100	100

Tabel 42 Target dan Realisasi KSD Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat A menetapkan rencana aksi untuk semua Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan pelaksanaan kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran dan pemantauan, pelaporan dan evaluasi AKIP oleh APIP telah sesuai ketentuan dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara langsung mendukung proses pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hasil dari pelaksanaan Sub KSD ini selain efisiensi anggaran adalah capaian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dari evaluasi SAKIP 2024 yang mendapatkan Predikat A.

Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan serta kualitas PPSU/ PJLP di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Sekretariat Kota dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Target yang diberikan adalah Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN PJLP Tahun 2025 sesuai Keputusan Gubernur 1195 Tahun 2022 untuk pembaharuan Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sub KSD Transformasi Digital mendukung target provinsi dalam penyusunan Manajemen Risiko SPBE.

Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mendorong keefektifan koordinasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat khususnya koordinasi di bawah Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dalam hal penanggulangan kemiskinan dengan Suku Dinas terkait.

Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapannya dan Sub KSD Penataan Kawasan yang Dikoordinasikan oleh Walikota/ Bupati mendorong keefektifan koordinasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat khususnya koordinasi di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam hal penataan kawasan dengan Suku Dinas terkait.

Faktor Keberhasilan atau Kegagalan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dapat terus terealisasi dengan baik pada tahun kedua. Sebagai agregat dari target sasaran strategis di bawahnya, keberhasilan capaian tujuan strategis ditunjang tercapainya target IKU 2 dan 3 (Sasaran Strategis) yaitu indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) dan indikator indeks efektivitas koordinasi kota administrasi.

Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat karena menunjukkan hasil kerja yang telah dilaksanakan aparat Sekretariat, Kecamatan, dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk mengantisipasi kenaikan target di tahun berikutnya maka diperlukan peningkatan layanan koordinasi kepada Suku Dinas dan Suku Badan terkait oleh para asisten dan kepala bagian di bawahnya, serta peningkatan layanan kepada masyarakat terutama terkait komponen-komponen yang disurveikan.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara keseluruhan terhadap 7 pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, antara lain:

1. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan unit/instansi terkait;
2. Kinerja yang baik dari para Camat dan Lurah beserta seluruh jajarannya dalam memberikan layanan kemasyarakatan;
3. Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan aparat kecamatan dan kelurahan.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan nilai Indeks Efektivitas Koordinasi secara keseluruhan, antara lain:

1. Koordinasi kolaborasi yang baik dengan unit/instansi terkait;
2. Kinerja yang baik dari para Bagian maupun Suku Dinas dan Suku Badan di bawah Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya meskipun lintas koordinasi (bagian masuk dalam struktur Sekretariat Kota, suku dinas masuk dalam struktur Dinas terkait, dan suku badan masuk dalam struktur Badan terkait);
3. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup baik sampai sejauh ini.

Peningkatan angka realisasi dan capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat telah puas dengan pelayanan yang diberikan jajaran Kota Administrasi Jakarta Pusat khususnya untuk 7 pelayanan yang disurvei. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Efektivitas Koordinasi pada Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan pada dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dan Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2023-2026.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sebagai antisipasi target yang semakin tinggi ke depannya, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk Indikator kinerja Survei Kepuasan Masyarakat, antara lain:

1. Perlunya sosialisasi dan penekanan informasi kepada warga bahwa 7 layanan yang terdapat di kelurahan di antaranya PPSU, ketertiban Umum, Posyandu, PKK, Jumantik, RPTRA, serta Penyelenggaraan RT/ RW, LMK dan FKDM tidak dipungut biaya;
2. Perlu dilakukan sistem piket terhadap aplikasi pemantauan laporan atau permohonan pelayanan sehingga setiap laporan/ permohonan pelayanan dapat lebih cepat direspons dan diselesaikan;
3. Perlu dilakukan monitoring secara rutin untuk mengawasi kinerja petugas di lapangan.

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk Indikator kinerja efektivitas Koordinasi, antara lain:

1. Mempertahankan kualitas koordinasi;
2. Mengoptimalkan koordinasi melalui inisiasi menggunakan whatsapp, zoom, atau alternatif lain.

Rencana Aksi di Tahun yang Akan Datang

Sebagai tindak lanjut dari analisa faktor keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat merumuskan rencana aksi di Tahun 2025 untuk terus mendorong capaian target IKU mengingat target yang akan ditetapkan di Tahun 2025 akan lebih tinggi dari target di Tahun 2024.

Dari saran-saran di atas dapat ditarik benang merah untuk penyusunan rencana aksi IKU menjadi beberapa hal, antara lain sosialisasi/ pemberian informasi kepada masyarakat, pemantauan laporan atau permohonan layanan yang masuk, monitoring kinerja petugas di lapangan, mempertahankan kualitas koordinasi dengan kegiatan terjadwal dan insidental. Hal-hal tersebut dipertimbangkan untuk masuk ke dalam Rencana Aksi di Tahun 2025.

Rencana Aksi ini merupakan rancangan di awal tahun dan masih bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat Semester 1 dan 2 Tahun 2025	1 Dokumen	RA1. Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Pusat Barat Semester 1 dan 2 Tahun 2025	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat semester 1 dan 2 Tahun 2025	T/O1.1.1. Dokumen Laporan Hasil Indeks Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semester 1 dan 2 Tahun 2025	1 Dokumen
		Pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan	1 Laporan	RA2 Memantau dan melaporkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan	KK2.1 Telaksananya pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan	T/O2.1.1 Laporan pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan	1 Laporan
2	Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang optimal	Identifikasi permasalahan melalui hasil survey kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Dokumen	RA1. Menyusun laporan identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	KK1.1 Tersusunnya laporan identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	T/O1.1.1 Daftar laporan identifikasi permasalahan melalui hasil survei kepada masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Dokumen
		Rencana tindak lanjut permasalahan	1 Laporan	RA2. Menyusun rencana tindak lanjut permasalahan	KK2.1 Terlaksananya penyusunan rencana tindak lanjut permasalahan	T/O2.1.1. Laporan rencana tindak lanjut permasalahan	1 Laporan
		Penyelesaian tindak lanjut permasalahan	1 Laporan	RA3. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut permasalahan	KK3.1 Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut permasalahan	T/O3.1.1 Laporan hasil penyelesaian tindak lanjut permasalahan	1 Laporan
		Identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat	100%	RA1. Menyusun identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat di bawah masing-masing asisten	KK1.1 Tersusunnya identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat di bawah masing-masing asisten	T/O1.1.1 Daftar identifikasi permasalahan efektivitas koordinasi walikota kota administrasi jakarta pusat di bawah masing-masing asisten	1 Dokumen

	Hasil tindak lanjut permasalahan	100%	RA4. Menyusun rencana tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	KK4.1 Tersusunnya rencana tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	T/O4.1.1. Laporan rencana tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	1 Laporan
	Hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan	100%	RA7. Melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	KK7.1 Terlaksananya pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	T/O7.1.1 Laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut permasalahan di bawah masing-masing asisten	1 Laporan

Tabel 43 Rencana Aksi JPT Tahun 2025

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana data kebutuhan dan eksisting pegawai per tanggal 31 Januari 2024 jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 487 orang, jumlah ini turun sebanyak 6 orang (-1,23%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2023 yang berjumlah 493 orang, lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (-1,01%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2022 yang berjumlah 508 orang, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah pegawai sebesar (-5,3%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengalami efisiensi jumlah pegawai di tahun 2021 sebesar (-2.8%) dari jumlah pegawai pada tahun 2020.




Grafik 8 Jumlah pegawai Sekretariat, kecamatan, dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 2020-2024 (Sumber data: Bagian KKPP, 2024)

Berdasarkan data tersebut kota administrasi secara empiris telah melaksanakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan efisiensi penggunaan SDM.

a) Rekrutmen calon ASN Tahun Anggaran 2024

Pada tahun 2024 terdapat rekrutmen Calon ASN berkenaan dengan kebijakan nasional terkait pengadaan Calon ASN Tahun Anggaran 2024 yang dibuka untuk PNS dan PPPK, sebagian besar kebutuhan Calon ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diisi dari PNS. Kebutuhan Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta ini berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2024 yang proses seleksinya dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan Maret 2025 dan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2024 yang proses seleksinya dilaksanakan mulai tanggal 30 September 2024 sampai dengan Februari 2025. Kota Administrasi Jakarta Pusat akan memperoleh 62 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 77 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 7 pegawai yang akan mengisi formasi Jabatan Fungsional dan 132 pegawai yang akan mengisi formasi Jabatan Struktural sesuai kebutuhan analisis pegawai dan analisis beban kerja sebagai berikut:

	JABATAN FUNGSIONAL				
	ANALIS HUKUM	ANALIS KEBIJAKAN	ARSIPARIS	PENYULUH HUKUM	PERENCANA
FORMASI TERISI	1	6	1	44	87
JUMLAH	7		132		

Tabel 44 Pengisian formasi jabatan untuk pengangkatan Tahun 2025

b) Rekrutmen selektif dan terbatas

Pada tahun 2024 tidak ada rekrutmen ASN melalui mekanisme pindah instansi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS tenaga administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

c) Redistribusi pegawai

Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM melalui optimalisasi jumlah SDM yang telah tersedia di internal Kota Administrasi Jakarta Pusat. Melalui redistribusi pegawai diharapkan alokasi sumber daya manusia dapat lebih tepat, sehingga formasi jabatan yang lowong dapat terisi sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karier pegawai. Redistribusi pegawai antar unit eselon III dan IV dilaksanakan melalui mekanisme Internal Job Vacancy dan mutasi/promosi karena penugasan atau atas permintaan sendiri. Hasil redistribusi pegawai selama tahun 2024 sebagai berikut:

Unit Kerja	JPT Pratama		Jabatan Administrator		Jabatan Pengawas		JF (Ahli Muda)	
	ABK	Eksisting	ABK	Eksisting	ABK	Eksisting	ABK	Eksisting
Sekretariat Kota	3	2	11	10	6	6	18	18
Kecamatan	N/A	N/A	24	24	48	47	N/A	N/A
Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	220	214	N/A	N/A
TOTAL	ABK				Eksisting			
	330				321			

Tabel 45 Hasil redistribusi pegawai selama tahun 2023

Jumlah Pejabat JPT Pratama, Administrator, Pengawas, JF Ahli Muda dan JF Keterampilan Mahir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2024 mengalami selisih kebutuhan pegawai sebesar 3%. Pemenuhan kebutuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan melalui mekanisme seleksi yang telah ditentukan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan Kepala BKN Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil.

d) Mutasi/ Promosi antar Unit

Redistribusi pegawai pada Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Mutasi/ Promosi antar unit pada tahun 2024 sejumlah 87 orang yang dilaksanakan pelantikan pada tanggal 20 Februari 2024, 30 Mei 2024, 9 Juli 2024, 5 Agustus 2024, dan 12 November 2024.

e) Peningkatan Kompetensi SDM

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada Tahun 2024 pengikutsertaan diklat pegawai terdata sebanyak 47 orang dengan jenis pengembangan kompetensi sebagai berikut:

No	Jenis Pengembangan Kompetensi	Jumlah Pegawai
1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	36
2	Diklat Pembangunan Berkelanjutan	8
3	Diklat Arsiparis	1
4	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	1
5	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	1
TOTAL		47

Tabel 46 pengikutsertaan diklat pegawai 2024

Selain keikutsertaan dalam pengembangan kompetensi di atas, instrumen-instrumen dan jenis pendidikan kilat lain tidak berdasarkan undangan juga dibuka bagi para pegawai. Keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan kompetensi ini dituangkan dalam target sasaran khusus 40 jam pelajaran yang akan dijelaskan lebih mendetail pada sasaran khusus dengan indikator kinerja “Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun” di bawah.

Pengangkatan Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyetaraan Jabatan di seluruh Perangkat Daerah dan melakukan revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi menjadi satu Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menjadi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Rekapitulasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyetaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 18 (delapan belas) Orang. Gambaran konsolidasi JF di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana berikut:

No	JF	Jabatan	Tugas
1	JF Ahli Muda	Ketua Sub Kelompok Bina Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pembinaan serta evaluasi Kecamatan dan Kelurahan; 2) melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; 3) melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan di tingkat Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan umum; 5) melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Administrasi; dan 6) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Administrasi.
2	JF Ahli Muda	Ketua Sub Kelompok Tata Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian di wilayah Kota Administrasi; 5) melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi dan asosiasi pemerintah Kota; dan 6) melaksanakan pengoordinasian dan pembentukan Pos Komando bencana tingkat Kota administrasi.
3	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat terkait perkara nonlitigasi bidang non aset di wilayah Kota Administrasi; dan 2) memfasilitasi pengoordinasian, konsultasi hukum, mediasi perkara nonlitigasi bidang non aset di wilayah Kota Administrasi.
4	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi bantuan hukum perkara litigasi bidang non aset di pengadilan; 2) menyusun pertimbangan hukum terhadap aparatur dan unit kerja pada wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pendokumentasian Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Walikota; 4) memberikan pelayanan pendampingan bantuan hukum terhadap aparatur dan unit kerja pada wilayah Kota Administrasi; dan

No	JF	Jabatan	Tugas
			5) memfasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum sesuai lingkup tugasnya.
5	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan aparat di wilayah Kota Administrasi; dan 3) melaksanakan pembinaan hak asasi manusia di wilayah Kota Administrasi.
6	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Kota Administrasi; 2) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Kota Administrasi; 3) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Kota Administrasi; 4) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Kota Administrasi; 5) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin, kode etik, perilaku, budaya kerja dan etos kerja pegawai Kota Administrasi; 6) melaksanakan pengembangan pegawai Kota Administrasi; 7) melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumen kepegawaian Kota Administrasi; 8) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Administrasi; 9) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di wilayah Kota Administrasi; dan 10) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di wilayah Kota Administrasi.
7	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan bisnis proses, standar, dan prosedur Kota Administrasi; 2) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional ketatalaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya; 3) melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kinerja Kota Administrasi; dan 5) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
8	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelayanan publik sesuai dengan lingkup tugasnya; 2) melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengukuran survei kepuasan masyarakat tingkat Kota Administrasi; 5) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil Rapat Pimpinan Gubernur;

No	JF	Jabatan	Tugas
			<p>6) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>7) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi; dan 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi.</p>
9	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian	<p>1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi; dan</p> <p>4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pariwisata, pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian di wilayah Kota Administrasi.</p>
10	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi; dan</p> <p>4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Administrasi.</p>
11	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	<p>1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi; dan</p>

No	JF	Jabatan	Tugas
			4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan) di wilayah Kota Administrasi;
12	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) di wilayah Kota Administrasi.
13	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi), pertanahan, dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi; dan 5) memfasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah.

No	JF	Jabatan	Tugas
14	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi; dan 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan) dan kehutanan di wilayah Kota Administrasi.
15	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan program dan anggaran Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5) mengoordinasikan pengelolaan manajemen risiko Kota Administrasi 6) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di wilayah Kota Administrasi; dan 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di wilayah Kota Administrasi.
16	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; 2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; 3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi; dan 5) melaksanakan pengelolaan perpustakaan kedinasan Kota Administrasi.
17	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Pendidikan,	<ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan pendidikan dan

No	JF	Jabatan	Tugas
		Kebudayaan dan Mental Spiritual	<p>kebudayaan di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>5) melaksanakan pengoordinasian dengan PD/UKPD, Lembaga Pemerintah Pusat, Lembaga Keagamaan dan/atau instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan mental spiritual, pembentukan forum/ lembaga keagamaan di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>6) melaksanakan penyelenggaraan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan mental spiritual di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>7) melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan terhadap para pengurus masjid/musholla serta qori/qori'ah di wilayah Kota Administrasi; dan</p> <p>8) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan untuk sarana dan prasarana mental spiritual di wilayah Kota Administrasi.</p>
18	JF Ahli Muda	Ketua Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	<p>1) melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>2) melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>3) melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;</p> <p>4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi; dan</p> <p>5) melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan penguatan kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kota Administrasi.</p>

Tabel 47 konsolidasi JF di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022

- a. Kelas dan Tunjangan Jabatan Fungsional Pada masa transisi, tunjangan jabatan JF Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersifat tetap (budget neutral) sampai dengan terbitnya Perpres mengenai tunjangan JF yang baru. Berdasarkan identifikasi, penyesuaian kelas dan tunjangan jabatan bagi JF

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

hasil konsolidasi akan berdampak ke aspek fiskal berupa kenaikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja JF Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

b. Penilaian Kinerja

Sesuai dengan PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Terdapat perubahan penilaian kinerja JF, yang semula menggunakan activity based (sesuai butir kegiatan) menjadi output-based berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Penghargaan Dalam Pencapaian IKU

Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menyelesaikan tugasnya di Tahun 2024 menelurkan sederet prestasi yang layak dibanggakan. Sebagai salah satu bentuk dokumentasi keberhasilan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pelaksanaan peran serta tujuan dan sasaran strategis yang telah diamanahkan, beberapa penghargaan terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama berhasil diraih di Tahun 2024, antara lain:

- Layanan kegiatan kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terus meningkatkan kinerjanya dan tercatat dalam beberapa prestasi seperti Juara I Tingkat Nasional Lomba Vlog Pokja IV dan Juara terbaik kedua Nasional Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana



Gambar 17 Juara I Tingkat Nasional Lomba Vlog Pokja IV: TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat (sumber: Sudin Kominfotik JP)



Gambar 18 Juara Terbaik ke-2 Nasional Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (sumber: Sudin Kominfotik JP)

- Posyandu Mawar Melati Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih di Tahun 2024 berhasil meraih gelar sebagai Posyandu Inovasi Terbaik Tingkat Provinsi. Keberhasilan ini juga berkat binaan dari Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih yang terlaksana karena adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Administrasi melalui kecamatan dengan Sudin Kesehatan melalui Puskesmasnya.



Gambar 19 Posyandu Inovasi Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2024: Posyandu Mawar Melati Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih (sumber: Sudin Kominfotik JP)

- Melita Seviasari, Kader Posyandu Aster 7c Kelurahan Cideng berhasil meraih Juara I Kader Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2024.



Gambar 20 Juara 1 Kader Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2024: Melita Selviasari (Posyandu Aster 7c kelurahan Cideng) (sumber: Sudin Kominfotik JP)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

- Penataan Kawasan Kelurahan sebagai salah satu bentuk perwujudan pemeliharaan prasarana dan sarana umum juga merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan Penataan Kawasan ini dilombakan oleh Provinsi untuk memacu semangat masing-masing Kelurahan untuk menata wilayah. Di Tahun 2024 Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Paseban berhasil meraih penghargaan Penataan Kawasan Terbaik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.



Gambar 21 Kampung Bali mendapatkan Penghargaan Penataan Kawasan Terbaik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (sumber: Sudin Kominfo JP)



Gambar 22 Kelurahan Paseban menjadi kelurahan terbaik dalam rangka penataan kawasan di wilayah Jakarta Pusat (Apresiasi dan Evaluasi Kinerja Kewilayahan bagi Camat dan Lurah di Desember 2024) (sumber: Sudin Kominfo JP)

- Dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayah salah satu Lurah di Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Kategori Non Litigation Peace Maker



Gambar 23 Paralegal Justice Award 2024 Kategori Non Litigation Peace Maker (sumber: Sudin Kominfo JP)

- Dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta karena berhasil menjaga kondusivitas wilayah selama Pemilihan Umum.



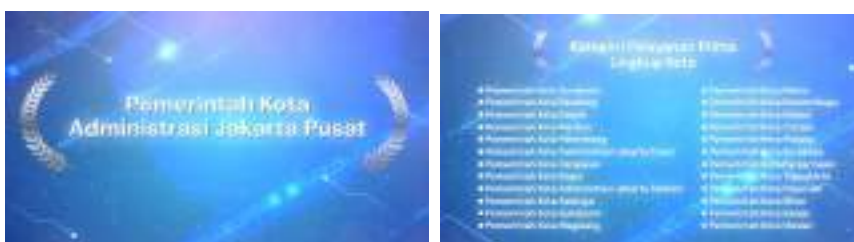
Gambar 24 Penghargaan dari KPU DKI Jakarta atas suksesnya Pemilu Tahun 2024

- Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia terkait penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024 dengan nilai 97,98 masuk Zona Hijau Kualitas Tertinggi. Penghargaan tersebut didukung koordinasi dan pembinaan yang intensif dan efektif oleh Asisten Pemerintahan kepada Suku Dinas/ Puskesmas yang masuk dalam penilaian.



Gambar 25 penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024 dengan nilai 97,98 masuk Zona Hijau Kualitas Tertinggi

- Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih peringkat 6 Nasional Kategori Pemerintah Daerah pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan Indeks Pelayanan Publik Kota 4.66 Kategori A / Pelayanan Prima



Gambar 26 Penghargaan PEKPPP oleh KemenPAN dan RB Tahun 2024

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

- Walikota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menerima Pin Siddhakarya Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta, Siddhakarya merupakan penghargaan tertinggi Tingkat Provinsi di bidang produktivitas. Hal tersebut menunjukkan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kota Administrasi Jakarta Pusat berhasil dijalankan dengan kinerja baik.



Gambar 27 Walikota Administrasi Jakarta Pusat menerima Pin Siddhakarya Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta, Siddhakarya merupakan penghargaan tertinggi Tingkat Provinsi di bidang produktivitas (sumber: Sudin Kominfotik JP)

- Berkat kinerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat Kelurahan kebon Kosong diapresiasi dengan Juara 4 Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi di Tahun 2024.



Gambar 28 Kelurahan Kebon Kosong meraih Juara 4 Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2024 (sumber: Bagian Pemerintahan JP)

- Tiga RT/ RW di Kota Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan penghargaan Lomba Tertiba Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun 2024



Gambar 29 Lomba RT/ RW Terbaik Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun 2024 (sumber: Bagian Pemerintahan JP)

SASARAN KHUSUS

Jumlah Sasaran Khusus yang diamanatkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 turun mengikuti hasil rekomendasi evaluasi SAKIP di mana beberapa sasaran dinilai sudah bisa dicapai setiap tahun dan ada juga yang dinilai bukan merupakan impact/ setara eselon II, sehingga sasaran khusus yang masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran 3: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah

Sasaran 3: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah. Indikatornya adalah Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program.

Tahun 2024 sasaran dengan Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program ini mencapai target yang ditetapkan.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	100%	100

Tabel 48 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program Tahun 2024

Program unggulan Tahun 2024 yang dipilih adalah kegiatan-kegiatan berkaitan dengan tema “penanganan angka stunting”.



Gambar 30 Kegiatan Penanganan Angka Stunting

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program.	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Capaian Kinerja Sasaran		100%			100%			100%			100%			100%		

Tabel 49 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program Tahun 2020-2024

Formula Pengukuran realisasi target Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respons perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah:

- a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
- b) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.
- c) Persentase respons terhadap krisis komunikasi.
- d) Persentase respons interaktif terhadap pertanyaan/ komentar warganet yang relevan.

Perhitungan :

- a) Bobot 35% : PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.
- b) Bobot 30% : PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi program prioritas dan strategis.
- c) Bobot 20% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.
- d) Bobot 15% : PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/ komentar warganet yang relevan.

Sasaran 4: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas

Sasaran 4: Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas, Indikatornya adalah: Nilai Kualitas data SDI.

Target ini merupakan target tahun kedua untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam kategori data SDI dan tahun pertama dengan menggunakan perhitungan nilai kualitas data, dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Nilai Kualitas Data SDI	3.25	100%	100

Tabel 50 Realisasi Indikator kinerja Nilai Kualitas data SDI Tahun 2024

Data-data yang ditargetkan untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, antara lain:

No	Nama Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis
1	2	3	4
1	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2024 Juli 2024
2	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Februari 2024
3	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	Triwulan	Januari 2024 April 2024 Juli 2024 Oktober 2024
4	Indeks Kepuasan terhadap Pengelolaan kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM) pada Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2024 Juli 2024
5	Indeks Kepuasan terhadap Layanan PPSU Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2024 Juli 2024
6	Indeks Kepuasan terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2024 Juli 2024
7	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2024 Juli 2024
8	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2024 Juli 2024
9	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Ketertiban Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2024 Juli 2024
10	Data Jumlah Kantor Lurah/ Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang Memenuhi Standar di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Februari 2024
11	Data Jumlah Kantor Camat/ Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang Memenuhi Standar di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Februari 2024
12	Data Jumlah RT, RW, FKDM dan LMK Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Februari 2024
13	Data Jumlah RT, RW, FKDM dan LMK yang Terbina Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Februari 2024
14	Data penanganan perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	April 2024
15	Data penyelesaian sengketa hukum Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	April 2024
16	Data Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Maret 2024
17	Data Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Maret 2024

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

18	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kecamatan)	Semester	Januari 2024 Juli 2024
19	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kota Administrasi)	Semester	Januari 2024 Juli 2024
20	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Triwulan	Januari 2024 April 2024 Juli 2024 Oktober 2024
21	Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat	Semester	Januari 2024 Juli 2024
22	Data Kawasan Tertata Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahunan	Maret 2024

Tabel 51 Daftar Data Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai Keppub Nomor 61/ 2024

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, Indikatornya adalah Survei Kepuasan Layanan Masyarakat. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Survei Kinerja Walikota/ Bupati, Camat dan Lurah. Responden survei Walikota, Camat, Lurah telah ditentukan berdasarkan tingkatan masing-masing, seperti untuk survei Walikota, responden antara lain: Camat, Dewan Kota, FKDM kota, TP PKK Kota, FPK, FKUB, Karang Taruna Kota, FORMAPEL, Ketua MUI Kota, Ketua DMI Kota, DANDIM, KAPOLRES, Ketua HIPMI Kota, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua KADIN, Ka. Kejaksaan Negeri. Survei dilaksanakan melalui sistem Jaksurvei dan nilai secara otomatis masuk ke dalam perhitungan TPP.

Survei Kepuasan Layanan Masyarakat ini merupakan indikator kinerja sasaran khusus di tahun pertama periode Renstra 2023-2026.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	92	100

Tabel 52 Realisasi Indikator kinerja Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2024

Realisasi SKLM yang ditargetkan di triwulan 1 dan 3 Tahun 2024 terealisasi 97,95 dan 92 dan divalidasi 92 atau mencapai target.

Sasaran 6: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran 6: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel, Indikatornya adalah Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang. Definisi target adalah "Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/ UKPD dan UPB.

Target ini merupakan target tahun pertama untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan target tahun sebelumnya adalah inventarisasi pada bangunan/ gedung, dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang	100%	100%	100

Tabel 53 Realisasi Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang

Para Kepala Perangkat Daerah, termasuk Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pengguna aset ditargetkan untuk melaporkan hasil inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. Target Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat terlaksana dengan baik.



Gambar 31 Kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa KIP B peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024

Sasaran 7: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Sasaran 7: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Indikatornya adalah Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai oleh APBN/ APBD.

Dengan demikian barang atau jasa yang telah memiliki Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan memperoleh preferensi dari panitia lelang.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Provinsi DKI

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jakarta membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Para Kepala Perangkat Daerah selaku anggota agar menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah mengenai Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Target ini merupakan target tahun kedua untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	97.11	121.39	80	92.44	115.55

Tabel 54 Realisasi Indikator kinerja Persentase realisasi belanja barang/ jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri 2023-2024

Pada Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih capaian sebesar 115.55%, lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2023 di mana Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih capaian 121,39% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Capaian Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 diapresiasi oleh Pj. Gubernur sebagai Peringkat Pertama dalam kategori Kota/ Kabupaten.



Gambar 32 Peringkat Pertama Kategori Kota/ Kabupaten dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sasaran 8: Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun

Sasaran 8: Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun, Indikatornya adalah Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi untuk ASN dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Badan Kepegawaian Daerah kemudian mengeluarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri bagi Pegawai di Lingkungan BKN. SE CMB dibentuk untuk pengembangan kompetensi non-klasikal yang merupakan tuntutan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 di mana pegawai mempunyai hak dan kewajiban terkait pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP setahun.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi dengan mengeluarkan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) jam pelajaran per tahun.

Target ini merupakan target tahun pertama untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan target 40 jam pelajaran setelah tahun sebelumnya berada di target 20 jam pelajaran. Realisasi dan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100%	100%	100	-	-	-
1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	-	-	-	100%	100%	100

Tabel 55 Realisasi Indikator kinerja Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun 2023-2024

Selain pengembangan kompetensi dengan diklat-diklat utama (pengadaan barang dan jasa, manajemen kinerja organisasi, kepemimpinan pengawas, bendahara pengeluaran, manajemen penanggulangan bencana, dan kepemimpinan administrator), para pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat juga diberikan akses untuk mendaftarkan diri pada diklat atau sistem pembelajaran online lainnya untuk memenuhi target pengembangan kompetensi minimal 40 jam pelajaran per tahun, seperti Rabu Belajar, SiJule, dan Kopi Sedap.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat



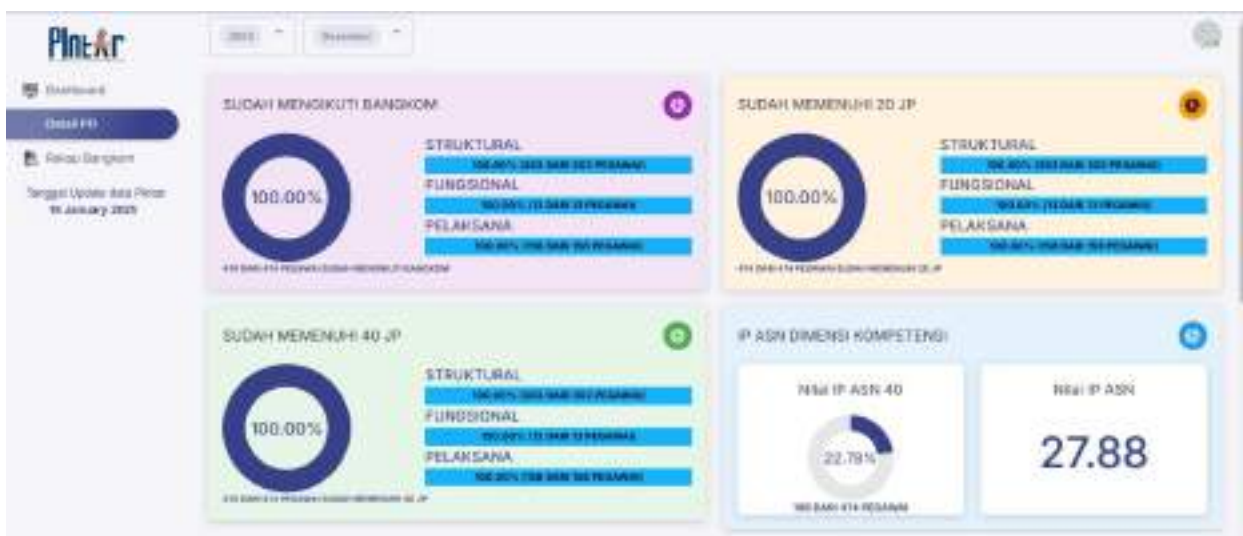
Gambar 33 Sistem Jakarta U-learning (SiJule)

Dengan memanfaatkan berbagai alternatif pengembangan kompetensi, 100% pegawai Sekretariat Kota, Kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berhasil memenuhi target 40 jam pelajaran, sebanyak 22.78% ASN mendapat nilai IP ASN 40 dan nilai IP ASN keseluruhan 27.88.



Gambar 34 Podcast Rabu Belajar

Rabu Belajar Eps 166 "Transformasi Penyelenggaraan Keterlibatan Umum Menuju Jakarta Kota Global"



Gambar 35 Rangkuman data pengembangan kompetensi pegawai Sekretariat, Kecamatan, dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Sasaran 9: Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

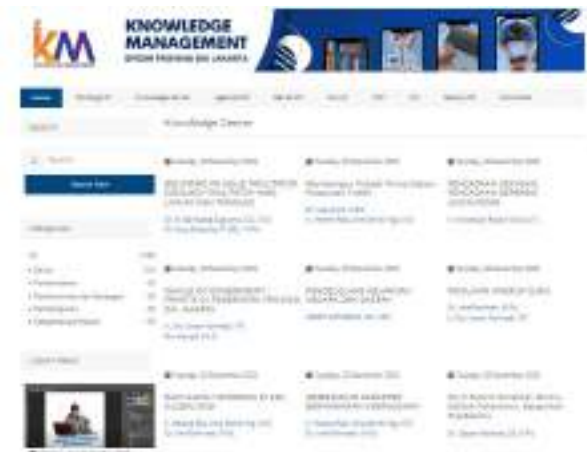
Sasaran 9: Meningkatnya Manajemen Pengetahuan, Indikatornya adalah Persentase penyelesaian tahapan Manajemen Pengetahuan. Target ini merupakan target tahun kedua untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase penyelesaian tahapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100	100%	100%	100

Tabel 56 Realisasi indikator kinerja Persentase penyelesaian tahapan Manajemen Pengetahuan 2023-2024

Target Manajemen Pengetahuan dilaksanakan berdasarkan Peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Target yang diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah adalah 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan yang dikirimkan melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id/>

Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai target 100%.



Gambar 36 Knowledge Center BPSDM DKI

Sasaran 10: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Sasaran 10: Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, Indikatornya adalah Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan Pergub Nomor 122 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masing-masing Kepala Perangkat Daerah ditargetkan untuk memberikan output:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II
2. Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV

Target ini merupakan target tahun kedua untuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100	100%	100%	100

Tabel 57 Realisasi indikator kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko 2023-2024

Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai target 100%.

Sasaran 11: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Sasaran 11: Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, Indikatornya adalah Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Definisi Operasional: Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi

- a) Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b) Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 tahun anggaran.

Kinerja Anggaran dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur beberapa variabel:

1. pengukuran capaian keluaran kegiatan/ sub kegiatan
2. penyerapan anggaran
3. efisiensi keluaran kegiatan/ sub kegiatan

Pembobotan nilai kinerja atas aspek implementasi yang dihasilkan:

≤ 60 = rendah

> 60 s.d. 70 = cukup

>70 s.d. 90 = baik

> 90 s.d. 100 = sangat baik

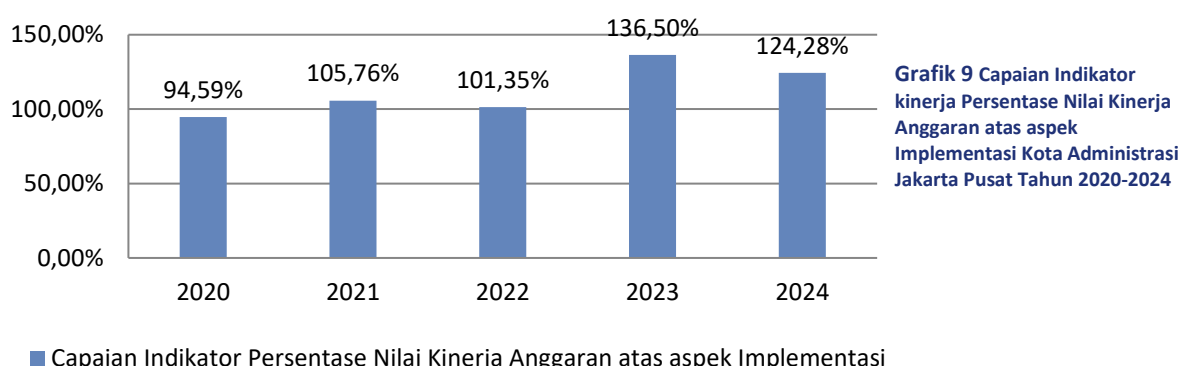
Indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) non-cascading yang tidak termasuk dalam Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan baru ditambahkan sebagai indikator Kinerja Perangkat Daerah mulai Tahun 2021.

Sebagai indikator kinerja tahun kedua pada periode 2023-2026 untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	96.93%	136.5	71%	88.24%	124.28

Tabel 58 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Tahun 2023-2024

Realisasi Target Indikator Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Tahun 2024 melebihi target 71% dengan realisasi 88,24% atau capaian 124,28%.



Membandingkan realisasi target kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kota lain dapat membantu kota mengetahui posisi kinerja saat ini dan dasar perbaikan ke depan. Sayangnya, indikator kinerja tersebut belum dipublikasikan oleh kota-kota lain di Indonesia sehingga perbandingan tersebut sulit dilakukan.

Faktor Keberhasilan atau Kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang mendukung Sasaran Khusus Tahun 2024 meraih capaian di atas 100%, antara lain :

1. pemahaman yang semakin baik mengenai tugas dan fungsi masing-masing sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
2. kolaborasi semakin terbina antar unit terkait

- adanya evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengetahui progres masing-masing target yang diperjanjikan termasuk sasaran khusus dan memberikan laporan capaian secara berkala pada pimpinan.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Pusat telah memberikan upaya maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Khusus yang ditetapkan dengan didukung koordinasi dan kerja sama yang baik dari semua unit perangkat daerah terkait di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

SASARAN OPERASIONAL

Sasaran 12: Terelesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Sasaran 12: Terelesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur, Indikatornya adalah Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

Formula pengukuran yang digunakan adalah Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%. Merupakan sasaran operasional yang diberikan kepada semua Kepala Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penyelesaian urusan yang menjadi temuan pada saat Rapat Pimpinan Pj. Gubernur.

Tahun 2024 realisasi Indikator Kinerja Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai target 100%.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100

Tabel 59 Realisasi Indikator Kinerja Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur Tahun 2024

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun kelima Tindak Lanjut Rapim Gubernur dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Capaian Kinerja Sasaran		100%			100%			100%			100%			100%		

Tabel 60 Capaian Kinerja Terelesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2024

Sasaran 13: Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Sasaran 13: Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat, Indikatornya adalah Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.

Masyarakat Jakarta merupakan contoh masyarakat yang berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Setiap harinya, ada banyak aspirasi yang masuk dari warga Jakarta berupa kritik, saran dan apresiasi positif atas bentuk pelayanan serta sarana dan prasarana di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM menyebutkan beberapa kanal aduan resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu JAKI, SMS, email, Qlue, Facebook, Twitter, Balai Warga, Lapor 1708, Pengaduan Balaikota, Pengaduan Inspektorat, Pengaduan Walikota, Pengaduan Kecamatan, Pengaduan Kelurahan dan Pengaduan melalui akun media sosial Gubernur.

Di Tahun 2024 realisasi Indikator Kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai target 100%.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99.99%	99.99

Tabel 61 Realisasi Indikator Kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat Tahun 2024

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 beserta perbandingannya dengan capaian sebelumnya yaitu Tahun 2020-2023, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	99.92%	99.92	100%	99.99%	99.99	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	99.99%	99.99
Capaian Kinerja Sasaran		99.92%			99.99%			100%			100%			100%		

Tabel 62 Capaian Kinerja Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2024

Sasaran 14: terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Sasaran 14: Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), Indikatornya adalah Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mencapai target Opini BPK atas Laporan Keuangan.

Sejak Tahun 2023 formula pengukuran yang digunakan adalah 90% dari Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD di bawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat). Realisasi Indikator Kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 mencapai target 100%.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100

Tabel 63 Realisasi Indikator Kinerja Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Tahun 2024

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam RPD 2023-2026 dan tahun ketujuh Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) diberikan kepada Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018-2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Capaian Kinerja Sasaran		100%			100%			100%		

Tabel 64 Capaian Kinerja Terseselaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2024

Sejak Tahun 2018 hasil pemeriksaan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	Selesai Ditindaklanjuti	Keterangan
1	2	3	4
1	2018	<ul style="list-style-type: none"> 7 temuan 13 BAST (tahun 2017-2018) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Nomor 5.1 LHP atas LKPD TA 2016 2. Temuan Nomor 4.2.2 LHP atas Pemanfaatan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 3. Temuan Nomor 3.1 LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 4. Temuan Nomor 3.3.a LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 5. Temuan Nomor 3.4.a LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 6. Temuan Nomor 3.5 LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018 7. Temuan Nomor 3.9 LHP Nomor 12/LHP/XVIII.JKT.3/11/2018

No	Tahun	Selesai Ditindaklanjuti	Keterangan
1	2	3	4
2	2019	<ul style="list-style-type: none"> • 8 temuan • 12 BAST 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Nomor 5.1 LHP atas LKPD TA 2016 2. Temuan Nomor 7.2 LHP atas LKPD TA 2018 3. Temuan Nomor 2.1 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di bidang pemenuhan sarana dan prasarana 4. Temuan Nomor 2.2 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di bidang pemenuhan sarana dan prasarana 5. Temuan Nomor 1.1 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di loket PTSP 6. Temuan Nomor 1.4 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di loket PTSP 7. Temuan Nomor 3.2 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di bidang Kesejahteraan Masyarakat 8. Temuan Nomor 1.3 LHP Nomor 15/LHP/XVIII.JKT.2/12/2018 atas Pelayanan Kelurahan di loket PTSP
3	2020	<ul style="list-style-type: none"> • 4 temuan • 8 BAST 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHP kinerja penyediaan dan pengelolaan Rusunawa TA 2016 dan Semester I TA 2017 2. LHP atas efektivitas pengurangan dan penanganan sampah TA 2017 s.d. 2019 3. Temuan LHP LKPD 2019 Pengungkapan piutang fasos fasum atas kewajiban pemegang SIPPT: Sistem Informasi terintegrasi untuk pengelolaan piutang fasos fasum 4. Temuan LHP LKPD 2019 Pengungkapan piutang fasos fasum atas kewajiban pemegang SIPPT: penatausahaan dan penagihan kewajiban fasos fasum
4	2021	<ul style="list-style-type: none"> • 13 temuan • 8 BAST 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Nomor 3.c LHP atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 2. LHP atas efektivitas pengurangan dan penanganan sampah TA 2017 s.d. 2019 3. Temuan LHP atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 4. Temuan Nomor 6.3 LHP LKPD 2019: pengelolaan dana bergulir 5. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas Pemprov DKI Jakarta No 9b atas realisasi belanja daerah TA 2014 6. Pemeriksaan atas Pengelolaan Kas Pemprov DKI Jakarta No 18b atas realisasi biaya pengendalian teknis TA 2014 7. Temuan Nomor 2.1 LHP LKPD 2020 8. Temuan Nomor 2.3 LHP LKPD 2020 9. Temuan Nomor 2.1 LHP LKPD 2020 10. LHP kinerja penyediaan dan pengelolaan Rusunawa TA 2016 dan Semester I TA 2017 11. Temuan Nomor 11 LHP LKPD 2013 12. Temuan Nomor 3.17 LHP LKPD 2020 13. Temuan Nomor 65.5.1 LHP LKPD 2016
5	2022	<ul style="list-style-type: none"> • 7 temuan • 4 BAST 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Nomor 34.4.7 LHP LKPD 2019: Sistem Informasi terintegrasi untuk pengelolaan piutang fasos fasum 2. Temuan Nomor 34.4.7 LHP LKPD 2019: penatausahaan dan penagihan kewajiban fasos fasum 3. LHP BPK atas Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Kelurahan pada Pemprov DKI Jakarta TA 2018 4. Temuan Nomor 35.5.1 LHP LKPD 2017: pengelolaan dana bergulir 5. Temuan 2.1 LHP LKPD 2021 6. Temuan LHP atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta 7. Temuan Nomor 54 a dan 54 b LHP LKPD 2008 8. Temuan 2.1 (b.2) LHP LKPD 2021
6	2023	<ul style="list-style-type: none"> • 1 temuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Nomor 54 a LHP LKPD 2008: penyampaian informasi mengenai sistem informasi SIPRAJA 2. Temuan Nomor 4.15 LHP LKPD 2022: melakukan perhitungan ulang atas ukuran gedung dan bangunan di KIB C dan jalan, irigasi dan jaringan di KIB D, menyelesaikan proses rekomendasi kelengkapan data penerima fasos fasum 3. Pengiriman surat tagihan pemenuhan kewajiban fasos fasum dan persertifikatan kepada Direktur PT Siongs Group 4. BAST sebagian kewajiban fasos fasum berupa bidang tanah dengan peruntukan marfa jalan (Mjl)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Tahun	Selesai Ditindaklanjuti	Keterangan
1	2	3	4
7	2024	<ul style="list-style-type: none"> 4 temuan 1 BAST 	<ol style="list-style-type: none"> PSU 2023 3.9 u Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menindaklanjuti dengan surat e-0326/PU.04.00 Tanggal 19 Juni 2023 hal Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum dan Pensertifikatan kepada Direktur PT. Sionsg Group Jl. Gunung Sahari XI No. 23 Kelurahan GSU Kecamatan Sawah Besar BAST sebagian kewajiban fasos fasum berupa bidang tanah dengan peruntukan marga jalan (Mjl) yang terletak di jalan gunung sahari XI Kelurahan GSU Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 238/-1.711.534 Rekomendasi LHP PSU yang bersumber dari pihak ketiga Penyerahan Kewajiban SIPPT/ IPPR pada 34 pemegang izin SIPPT/ IPPR, ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-028/UD.02.04 Tanggal 10 Juni 2024 hal Laporan Kajian Terhadap Permasalahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54/ Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Atas rekomendasi LKPD 2018 telah ditindaklanjuti dengan Penyelesaian Sertifikat PT Wisma Nusantara Internasional yaitu Hak Pakai No. 104 yang terbit pada 19-02-2020 Atas LKPD 2023 rekomendasi 3.10 telah ditindaklanjuti dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengatribusi biaya atas pekerjaan rehab berat dan total yang dilakukan pada Kel. Kebon Kacang (TA 2022), Kel Utan Panjang (TA 2022), Kel Gelora (TA 2022 dan sisa pekerjaan TA 2023), Kec Johar Baru (TA 2023) dan Rudin Lurah Kampung Rawa (TA 2022)

Tabel 65 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2024

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selalu berusaha menindaklanjuti setiap temuan pada perangkat daerahnya sesuai dengan kewenangannya dan meraih capaian 100% setiap triwulan.

Faktor Keberhasilan atau Kegagalan

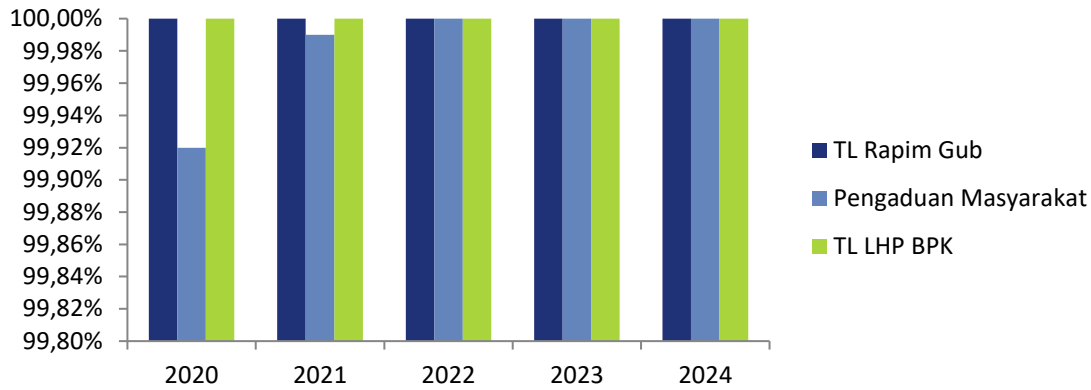
Bila menganalisa realisasi sasaran operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat, didapat bahwa:

Tahun	Rata-rata Capaian		
	TL Rapim Gub	Pengaduan Masyarakat	TL LHP BPK
1	2	3	4
2020	100%	99,92%	100%
2021	100%	99,99%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	99,99%	100%

Tabel 66 Perbandingan Rata-rata Capaian Sasaran Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2024

Performa penyelesaian tindak lanjut Gubernur dan tindak lanjut hasil temuan BPK tetap konsisten sampai tahun 2024 di rata-rata capaian 100%. Performa Pengaduan Masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya mulai dari capaian 99,92% di tahun 2020 sampai 99,99% di tahun 2024. Diharapkan performa tiga sasaran operasional tersebut dapat dipertahankan di tahun depan.

Secara grafik rata-rata capaian Sasaran operasional dapat dilihat pada grafik di bawah:



Grafik 10 Perbandingan realisasi Sasaran Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil evaluasi tabel dan capaian, beberapa hal yang menjadi pendukung tercapainya target sasaran operasional Tahun 2024 tetap konsisten dengan capaian angka rata-rata pembulatan 100%, antara lain :

1. Para Unit Kerja terkait telah memahami tugas masing-masing sehingga dapat dengan cepat dan tanggap menangkap koordinasi dan menyelesaikan pengaduan.;
2. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menerapkan Budaya Kerja Organisasi bagi Pegawainya dengan nilai-nilai yaitu Berintegritas, Kolaboratif, Akuntabel, Integritas dan Berkeadilan dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Dukungan stakeholder dalam mendukung rencana kinerja serta realisasi di lapangan mencapai hasil kolaboratif yang memuaskan;
4. koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan.

Pada dasarnya semua program terkait dalam menyukseskan Sasaran Operasional ini karena Sasaran Operasional secara keseluruhan mendukung tugas dan fungsi Walikota yang diwujudkan dalam tujuan dan sasaran strategis Kota. Program yang terutama terkait dengan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu upaya

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota Administrasi dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan pengelolaan SDM yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal dan efisiensi anggaran.

Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2024

Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian provinsi DKI Jakarta apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024 dianggarkan awal sebesar Rp. 773.301.068.379,00; setelah perubahan menjadi Rp. 779.977.900.621,00 dan direalisasikan Rp. 746.367.815.588,00 atau mencapai 95,69%, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	771.925.168.744	738.766.664.773	95,70
2	Belanja Modal	8.052.731.877	7.601.150.815	94,39
	Jumlah	779.977.900.621	746.367.815.588	95,69

Tabel 67 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024

Pada Tahun 2024 Belanja Operasi dianggarkan Rp. 771.925.168.744,00 dan terealisasi sebesar Rp. 738.766.664.773,00. Belanja Modal dianggarkan Rp. 8.052.731.877,00 dan terealisasi Rp. 7.601.150.815,00.



Grafik 11 Realisasi dan Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024

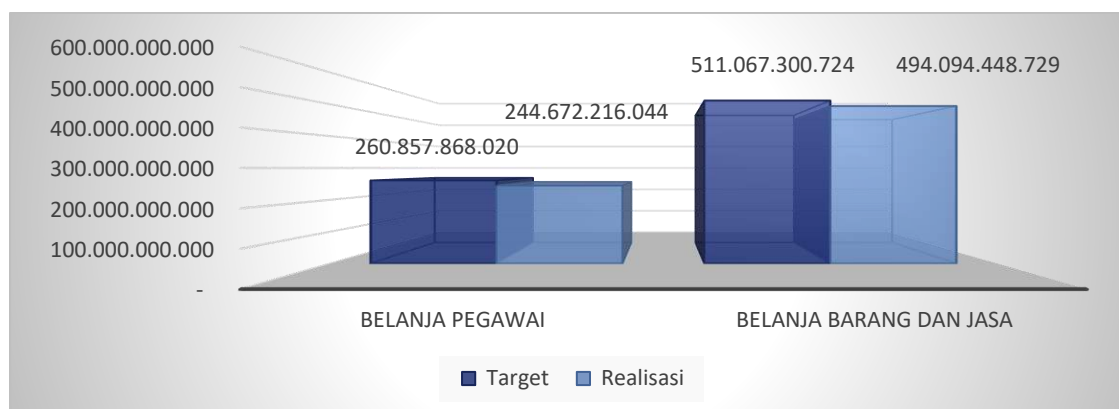
Kelompok Belanja Operasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 terbagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	260.857.868.020	244.672.216.044	93,80
2	Belanja Barang dan Jasa	511.067.300.724	494.094.448.729	96,68
Jumlah		771.925.168.744	738.766.664.773	95,70

Tabel 68 Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp. 260.857.868.020,00 terealisasi sebesar Rp. 244.672.216.044,00 atau 93,80%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 Rp. 511.067.300.724,00 terealisasi sebesar Rp. 494.094.448.729,00 atau 96,68%.



Grafik 12 Realisasi Belanja Operasional Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024

Dari grafik di atas diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024. Rincian Anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut:

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	326.846.988.416	337.743.198.719	314.837.446.643	93,22
2	Program Pengelolaan Kota Administrasi	2.409.391.848	2.419.568.591	2.176.792.680	89,97
3	Program Pengelolaan Kecamatan	360.728.853.673	356.491.756.742	350.346.694.010	98,28

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	80.782.559.268	80.760.351.395	76.536.293.864	94,77
5	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.533.275.174	2.563.025.174	2.470.588.391	96,39

Tabel 69 Anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 berdasarkan Program

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Tahun 2024 efektif untuk mendukung Tujuan dan Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional juga dapat dilaksanakan dengan baik.

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 26 sasaran semua menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, di mana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Evaluasi Nilai Efisiensi Anggaran menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

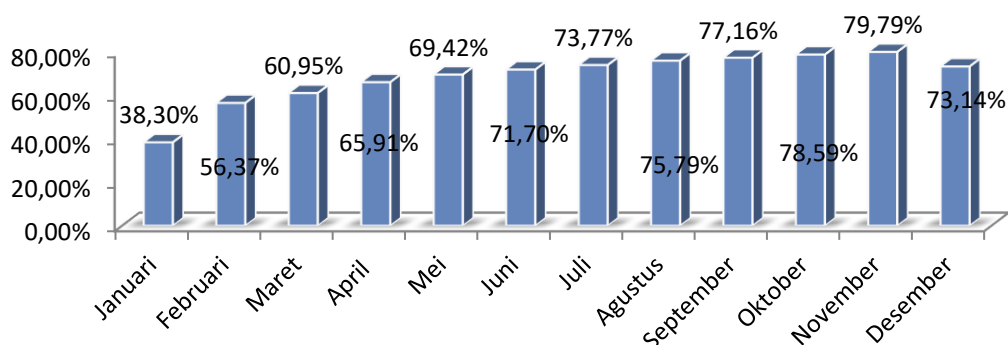
Setelah pengolahan data (rumus yang digunakan dan data-data pendukung dapat dilihat pada lampiran), didapatkan hasil sebagai berikut:

Konsistensi:

No	Bulan	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	TK Konsistensi/bl	Konsistensi pada bulan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	18.348.744.183	29.670.721.738	38,30%	38,30%
2	Februari	67.980.676.061	85.351.151.432	74,45%	56,37%
3	Maret	124.635.572.785	161.908.411.368	70,09%	60,95%
4	April	194.194.776.748	231.460.565.193	80,81%	65,91%
5	Mei	251.162.678.229	292.720.837.737	83,45%	69,42%
6	Juni	311.801.628.401	364.512.899.130	83,09%	71,70%
7	Juli	375.463.287.857	427.301.848.098	86,19%	73,77%
8	Agustus	440.024.753.637	484.316.626.953	89,93%	75,79%
9	September	483.691.950.183	541.233.752.067	88,10%	77,16%
10	Oktober	550.578.002.337	597.551.870.072	91,47%	78,59%
11	November	605.581.234.245	655.023.532.468	91,84%	79,79%
12	Desember	779.977.900.621		0,00%	73,14%
				1036,99%	

Tabel 70 Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Konsistensi



Grafik 13 konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Konsistensi penyerapan anggaran yang digunakan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada akhir tahun 2024 sebesar 73,14% dengan range konsistensi sepanjang tahun antara 38%-79%. Penyerapan anggaran Tahun 2024 sebesar 95,69% dengan target Rp. 779.977.900.621,00 dan direalisasikan Rp. 746.367.815.588,00.

Efisiensi Output Program

Program	OP	COP per OP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	100.00%	356.491.756.742	350.346.694.010	356.491.756.742	6.145.062.732	4.35%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00%	80.760.351.395	76.536.293.864	80.760.351.395	4.224.057.531	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.00%	2.563.025.174	2.470.588.391	2.563.025.174	92.436.783	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100.00%	337.743.198.719	314.837.446.643	337.743.198.719	22.905.752.076	
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	112.19%	2.419.568.591	2.176.792.680	2.714.563.502	537.770.822	
			779.977.900.621	746.367.815.588	780.272.895.532	33.905.079.944	

Tabel 71 Efisiensi output program

Nilai efisiensi output program 4.35% dan setelah konversi sebesar 60.87%.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Capaian Output Program dalam dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Sasaran	Program	Kinerja Indikator Tahun 2024			Anggaran Tahun 2024			Capaian Output Program	Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebagai Kota yang Maju dan Inklusif Dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal. Indikator: Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi		93.93	97,77	104,08					Mencapai target
Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Indikator 2: Indeks Efektivitas		97.52	98,98	101,50					Mencapai target
		90.35	96,55	106,86					Mencapai target

Sasaran	Program	Kinerja Indikator Tahun 2024			Anggaran Tahun 2024			Capaian Output Program	Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Koordinasi Kota administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							101.45%	
	Indikator:								
	1. Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	83	83	100%					
	2. Indeks Kepuasan Penunjang Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	4	4	100%					
	Rata-rata			100%	337.743.198.719	314.837.446.643	93,22		
	Program Pengelolaan Kota Administrasi								
	Indikator:								
	1. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	86	95,62	111,18%					
	2. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	86	97,52	113,39%					
	3. Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	86	96,34	112,02%					
	Rata-rata			112.19%	2.419.568.591	2.176.792.680	89,97		
	Program Pengelolaan Kecamatan								
	Indikator:								

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sasaran	Program	Kinerja Indikator Tahun 2024			Anggaran Tahun 2024			Capaian Output Program	Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1. Indeks Kepuasan terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK, dan FKDM)	4	4	100%					
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PPSU	4	4	100%					
	Rata-rata			100%	356.491.756.742	350.346.694.010	98,28		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				80.760.351.395	76.536.293.864	94,77		
	Indikator:								
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	4	4	100%					
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				2.563.025.174	2.470.588.391	96,39		
Indikator:									
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	100%						

Tabel 72 Analisa Capaian Output Program Anggaran Tahun 2024

Capaian output Program Pengelolaan Kecamatan 100%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100%, dan Program Pengelolaan Kota Administrasi 112.19%. Capaian Output Program keseluruhan 104,07% dan diambil nilai maksimal 100%.

Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat:

No	Sasaran Strategis	IKSS	Target IKSS	Realisasi IKSS	Realisasi IKSS (%)	Capaian IKSS per SS	Capaian IKSS per Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93,93	97,77	104,08	104,08%	104,08%
2	Meningkatnya Kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	97,52	98,98	101,50	104,08%	
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	90,35	96,55	106,86		

Tabel 73 Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat

Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 sebesar 104,08% dan diperhitungkan maksimal 100%.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat (rumus perhitungan dapat dilihat pada lampiran), dirangkum sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat:

No	Aspek Implementasi	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot		Konstanta	(6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyerapan Anggaran	95,69%	9,70%	9,28%			
2	Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan	73,14%	18,20%	13,31%			
3	Capaian Output Program	100,00%	43,50%	43,50%			
4	Nilai Efisiensi	60,87%	28,60%	17,41%			
Nilai Kinerja Atas Aspek Implementasi					83,50%	33,30%	27,81%
Nilai Kinerja Atas Aspek Manfaat					100,00%	66,70%	66,70%
Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi Eselon 2					94,51%		

Tabel 74 Nilai Kinerja Anggaran Aspek Manfaat dan Implementasi 2024 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penyerapan anggaran 95,69%, Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 73,14%, capaian output program 100%, nilai efisiensi 60,87%, nilai kinerja atas aspek implementasi 27,81%, nilai kinerja atas aspek manfaat 66,70%, dan nilai kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 94,51% atau turun dari nilai kinerja Tahun 2023 sebesar 95,24%.

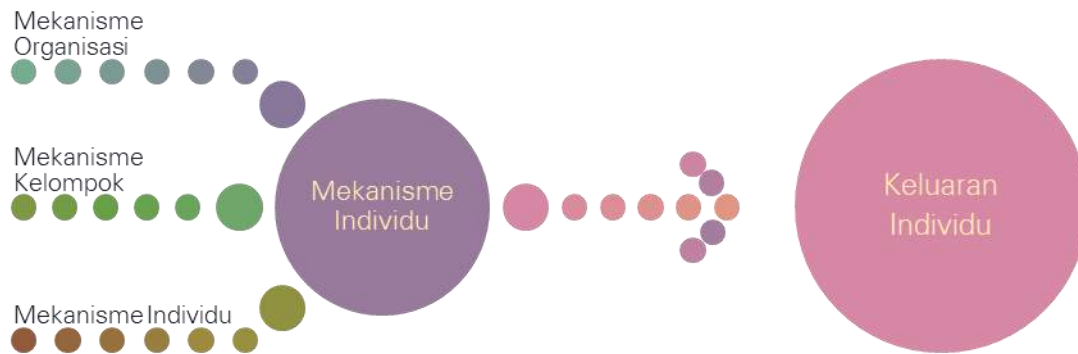
PENGARUH IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA

Sumber Daya Manusia adalah unsur terpenting dalam suatu organisasi karena kualitas sebuah organisasi ditentukan oleh kualitas kinerja pegawainya.

Rae Andre (2006) menyebutkan bahwa kinerja merupakan perilaku mental dan fisik individu, yang berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan, dalam mengejar tujuan organisasi. Dengan demikian kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas seperti standar hasil pekerjaannya, target pekerjaannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Colquitt (2009) kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama: Keluaran Individu (performa kerja individu dan komitmen organisasi), kedua: mekanisme individu (kepuasan kerja, stress, motivasi, kepercayaan, keadilan, etika, pembelajaran, dan pengambilan keputusan), ketiga: mekanisme organisasi (budaya organisasi, struktur organisasi), keempat: mekanisme kelompok

yang terdiri dari kepemimpinan (gaya dan perilaku kepemimpinan, kekuasaan dan negosiasi pemimpin) dan tim (proses dan komunikasi, karakteristik dan keanekaragaman), dan kelima: karakteristik individu (kemampuan, kepribadian & nilai budaya).



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa budaya dan struktur sebuah organisasi bersama dengan karakteristik kepemimpinan dan interaksi di dalam sebuah unit dan karakter anggota unit tersebut akan mempengaruhi kepuasan kerja dan motivasi si individu untuk terus mempercayai nilai-nilai dan etika organisasinya, mau terus belajar dan memiliki kepercayaan diri untuk mengambil keputusan sesuai kewenangan dan keahliannya yang pada akhirnya menjadi output hasil kerjanya dan tercermin dalam outcome organisasi itu sendiri.

Kesesuaian seseorang dengan budaya kerja yang dikembangkan manajemen organisasinya akan meningkatkan semangat kerja dan mendorong untuk meraih prestasi tinggi. Sebaliknya apabila budaya kerja dirasa tidak sesuai dengan pribadi akan menimbulkan keengganan untuk bekerja keras dan bahkan mungkin akan meninggalkan organisasi tersebut.

Atas dasar tersebut maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja dengan nilai-nilai yang diyakini dan ingin diimplementasikan adalah Berintegritas, Kolaboratif, Akuntabel, Inovatif, dan Berkeadilan. Peraturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang antara lain mengatur nilai dasar ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut terus disosialisasikan kepada segenap jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat diimplementasikan dalam keseharian bekerja.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memiliki tugas dan fungsi mengelola wilayahnya melalui jalur komando sampai ke Kelurahan juga jalur koordinasi dengan suku dinas suku badan terkait dituntut untuk terus memberikan pelayanan dan/ atau layanan terbaik kepada masyarakat maupun instansi terkait di wilayahnya. Kegiatan seperti pengelolaan prasarana dan sarana umum menggunakan

petugas PPSU, pencegahan demam berdarah dengan mengirimkan para jumantik ke rumah-rumah, monitoring kesehatan dan ekstra pelayanan berupa pemberian asupan gizi tambahan melalui Posyandu balita dan lansia, pemberdayaan perempuan melalui PKK, pemberian ruang belajar dan berkreasi untuk anak-anak melalui RPTRA, penjagaan keamanan dan ketertiban umum, serta pengelolaan kelurahan dengan penyelenggaraan RT/ RW, LMK, dan FKDM adalah beberapa layanan yang diberikan Kelurahan kepada masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi dengan suku dinas dan suku badan tingkat kota merupakan perwujudan usaha Pemerintah Kota sesuai tugas fungsinya untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang diamanatkan oleh provinsi.

Selain diadakannya pelatihan Berakhlak telah diselenggarakan pula Survei Budaya organisasi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan 7-10 Desember 2023 dengan hasil yang dikeluarkan pada bulan Maret 2024 lalu. Survei didesain untuk menanyakan nilai pribadi, nilai budaya saat ini dan yang diharapkan di Pemprov DKI, serta nilai budaya saat ini dan nilai budaya yang diharapkan di Perangkat Daerah masing-masing.

Tujuan survei adalah:

- mengetahui sejauh mana perilaku BerAKHLAK diimplementasikan dalam budaya organisasi saat ini;
- mengetahui keselarasan antara nilai pribadi, nilai organisasi saat ini dan yang diharapkan, sebagai indikasi keterikatan dan kesesuaian arah transformasi;
- mengetahui indeks kesehatan budaya organisasi berdasarkan 5 (lima) analisa yang komprehensif;
- mengetahui aspirasi pegawai terhadap budaya saat ini maupun budaya organisasi ke depan, agar dapat lebih baik; dan
- mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan baik yang jelas maupun tersembunyi (hidden issues).

Data selanjutnya dianalisa menjadi 6 tipe indeks yang terdiri dari:

1. Indeks Implementasi BerAKHLAK, analisis tingkat implementasi nilai BerAKHLAK, yang diamati dan dialami oleh para karyawan dalam perilaku kerja sehari-hari;
2. Indeks keseimbangan, indeks kesehatan budaya berdasarkan sebaran nilai terhadap 6 area kesadaran pada budaya organisasi saat ini;
3. Indeks keselarasan nilai pribadi dan organisasi, analisa tingkat keterikatan karyawan terhadap budaya kerja organisasi saat ini;

4. Indeks keselarasan budaya saat ini dan diharapkan, analisa tingkat kepercayaan yang ada di diri karyawan terhadap arah organisasi di masa mendatang;
5. Indeks energi positif, analis tingkat positif energi indeks yang mendukung produktivitas karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan;
6. Total indeks kesehatan budaya organisasi tingkat kesehatan budaya organisasi secara keseluruhan, berdasarkan analisa gabungan dari kelima indeks yang ada

Hasil Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

1. Indeks Implementasi BerAKHLAK: 61,2% (kategori B) ;
2. Indeks keseimbangan: 74,9% (kategori B);
3. Indeks keselarasan nilai pribadi dan organisasi: 49,9% (kategori C);
4. Indeks keselarasan budaya saat ini dan diharapkan: 74,9% (kategori B);
5. Indeks energi positif: 95,2% (kategori A);
6. Total indeks kesehatan budaya organisasi tingkat kesehatan budaya organisasi secara keseluruhan: 71,2% (kategori B).

Rincian dari Indeks Implementasi BerAKHLAK, adalah sebagai berikut:

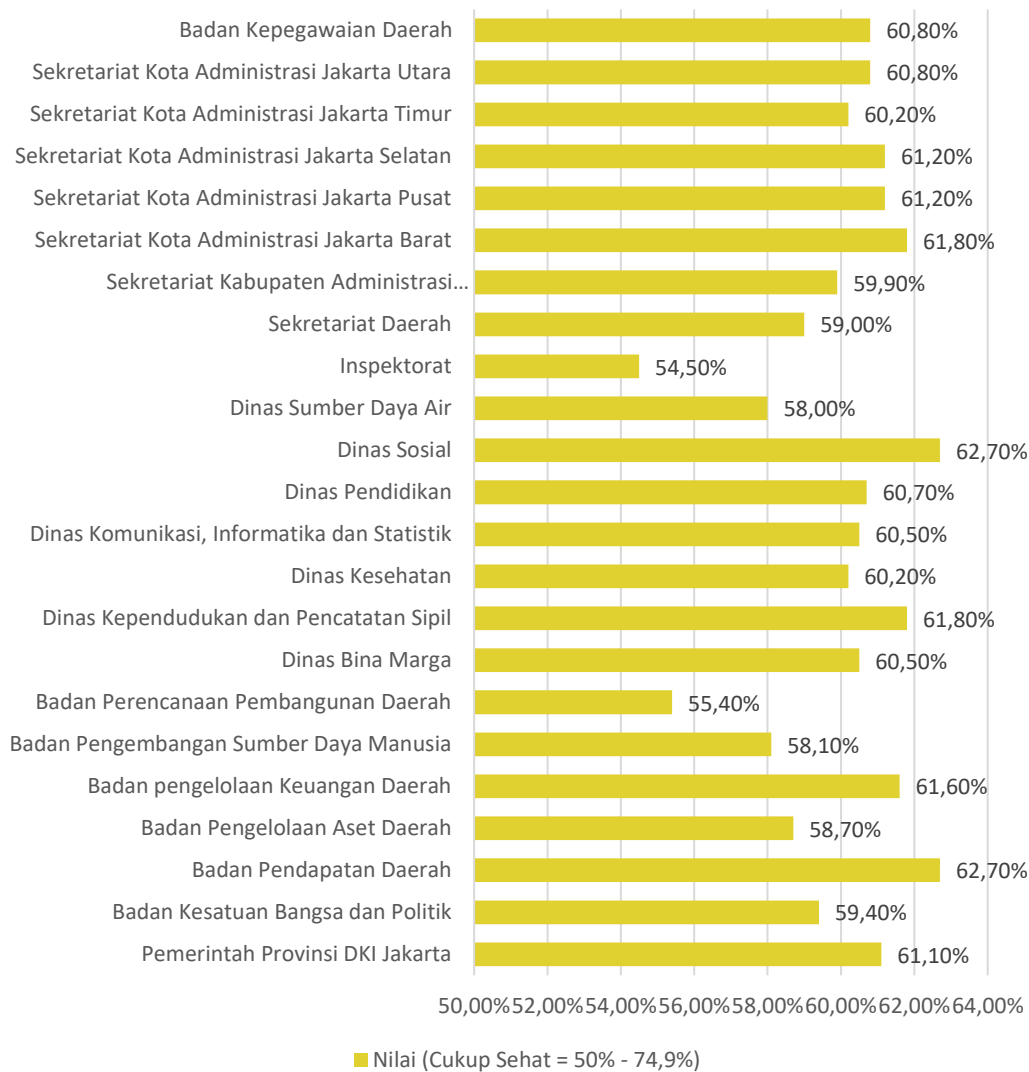
Nilai	Turunan Nilai/ Perilaku	Persentase Implementasi per Nilai	
		Jakarta Pusat	Provinsi DKI Jakarta
Berorientasi Pelayanan	Melakukan Perbaikan yang Berkelanjutan	65,6% Cukup Sehat	64,0% Cukup Sehat
	Solutif		
	Dapat Diandalkan		
	Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan		
	Melayani Sepenuh Hati		
	Ramah		
Akuntabel	Berintegritas	74,3% Cukup Sehat	73,2% Cukup Sehat
	Jujur		
	Bertanggung Jawab		
	Cemat		
	Efektif dan Efisien		
	Disiplin		
Kompeten	Pembelajar	58,0% Cukup Sehat	60,8% Cukup Sehat
	Profesional		
	Sharing Knowledge		
	Memberikan kinerja Terbaik		
	Menjaga Kualitas		
Harmonis	Bersikap Positif	52,9% Cukup Sehat	54,2% Cukup Sehat
	Bertoleransi		
	Merangkul Keragaman		
	Peduli		
	Saling Menghargai		
	Saling Menolong		

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Loyal	Berdedikasi	58,3% Cukup Sehat	64,9% Cukup Sehat
	Memegang Teguh Ideologi Pancasila dan UUD 1945		
	Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara		
	Menjaga Nama Baik		
	Menaati Aturan/ Kebijakan		
Adaptif	Berinisiatif (Proaktif)	48,2% Tidak Sehat	40,1% Tidak Sehat
	Kreatif dan Inovatif		
	Siap Menghadapi Ketidakpastian		
	Antusias		
	Siap Menghadapi Perubahan		
Kolaboratif	Terbuka Dalam Komunikasi	71,0% Cukup Sehat	70,6% Cukup Sehat
	Mengelola Sumber Daya		
	Adil		
	Bekerjasama		
	Berkolaborasi Lintas Group		
	Memberdayakan SDM (Empowering)		

Tabel 75 Perbandingan Rincian Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 dengan Provinsi DKI Jakarta (sumber: ACT)

Sebagai perbandingan berikut nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK Provinsi DKI Jakarta dan beberapa Perangkat Daerah lain berdasarkan hasil survei yang sama:



Grafik 14 Perbandingan Indeks Implementasi BerAKHLAK 2023 Provinsi DKI Jakarta dan beberapa PD (sumber: ACT)

Secara keseluruhan Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK Kota Administrasi Jakarta Pusat masih berada di atas rata-rata Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 61,20% dibandingkan nilai 61,10% dan berada di peringkat kedua bersama Jakarta Selatan di antara Kota dan Kabupaten Administrasi. Berdasarkan rincian Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK, nilai Kota Administrasi Jakarta Pusat yang masih berada di bawah nilai Provinsi DKI Jakarta ada pada nilai Kompeten, Harmonis, Loyal, dan Adaptif dengan penekanan pada unsur Adaptif yang mendapatkan nilai “Tidak Sehat” secara rata-rata di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai usaha perbaikan berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melaksanakan kegiatan Pelatihan Pencapaian Indeks Berakhlak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 14-15 Agustus 2024. Diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini kualitas implementasi BerAKHLAK di lingkungan Provinsi DKI Jakarta pada umumnya dan Kota

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Administrasi Jakarta Pusat pada khususnya dapat terus berkembang dan meningkatkan kinerja para ASN di lingkungan kerja masing-masing.



Gambar 37 Pelatihan Pencapaian Indeks Berakhlak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

INOVASI

Dari segi inovasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menghasilkan beberapa inovasi yang berguna bagi kepentingan organisasi. Pada Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Pusat menelurkan inovasi pelayanan administrasi Kelurahan dan Kecamatan secara online dengan nama PM-Sakti. Inovasi tersebut begitu diapresiasi oleh tingkat provinsi sehingga pada Tahun 2022 telah diadopsi untuk digunakan di seluruh Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi, dan masih berlanjut sampai saat laporan ini disusun. Inovasi-inovasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024, antara lain:

No	Nama Inovasi	Unit Kerja
1	SI Lapor Mpok Atik	Kelurahan Cempaka Putih Barat
2	Hyminaphogot	Kelurahan Harapan Mulya
3	Dadu (Dunia Anak Terpadu)	Kelurahan Senen
4	Ingat Lingkar	Kelurahan Cempaka Putih Barat
5	Kasipem Nyambang Warga	Kelurahan Kebon Sirih
6	Kampung Moderasi Beragama	Kelurahan Petojo Utara
7	Kekos Pedia	Kelurahan Kebon Kosong
8	Si Peta Jalan Cepat	Kelurahan Cempaka Putih Barat
9	Sekar Wangi	Kelurahan Kebon Sirih

10	Sidiwas	Kelurahan Johar Baru
11	Kampung Tangguh	Kelurahan Petojo Utara

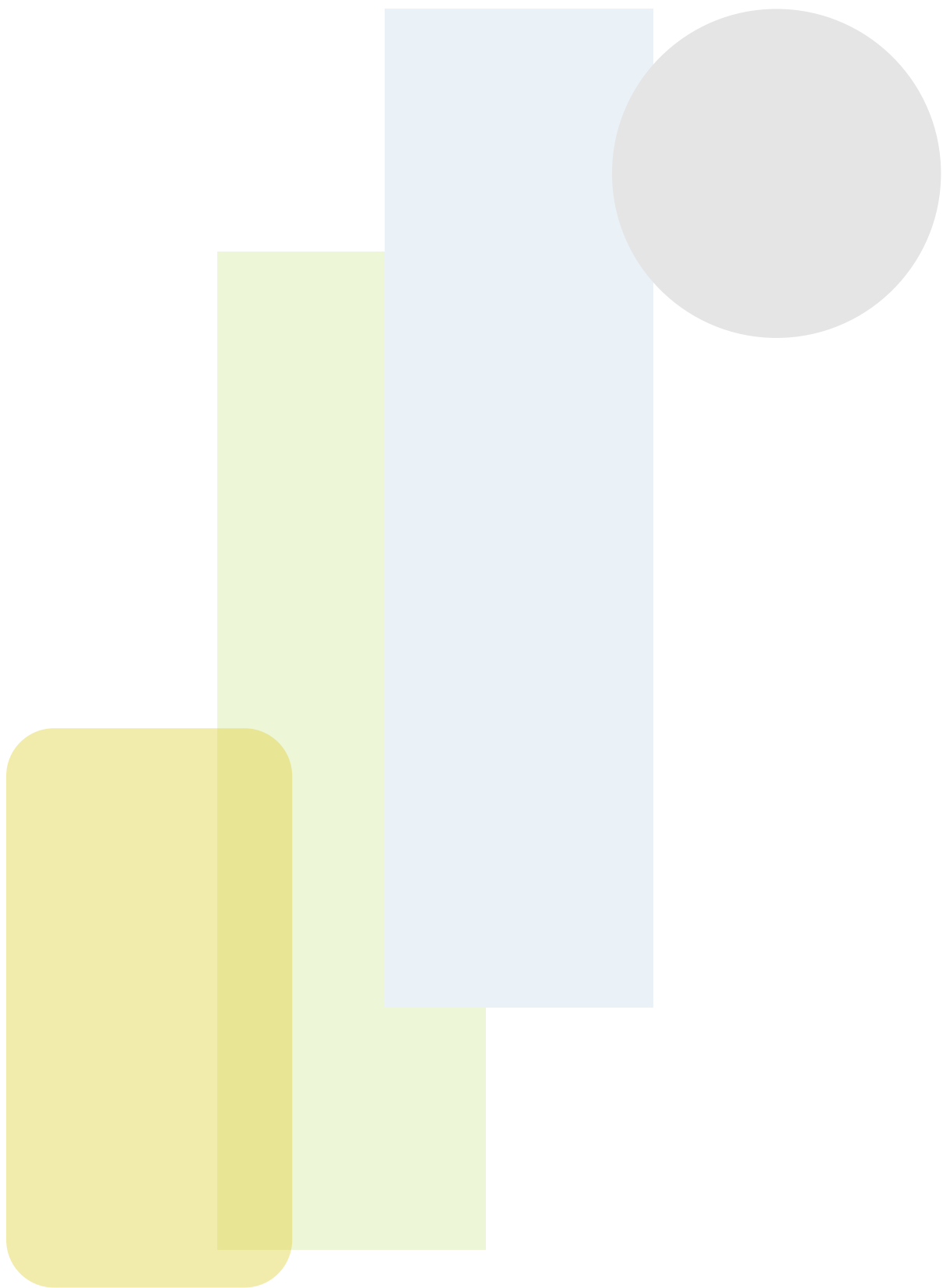
Tabel 76 Inovasi Kota Administrasi Jakarta Pusat



Gambar 38 Inovasi Dadu, Dunia Anak Terpadu dari RPTRA Planet Senen (sumber: Sudin Kominfo Kota Adm JP)



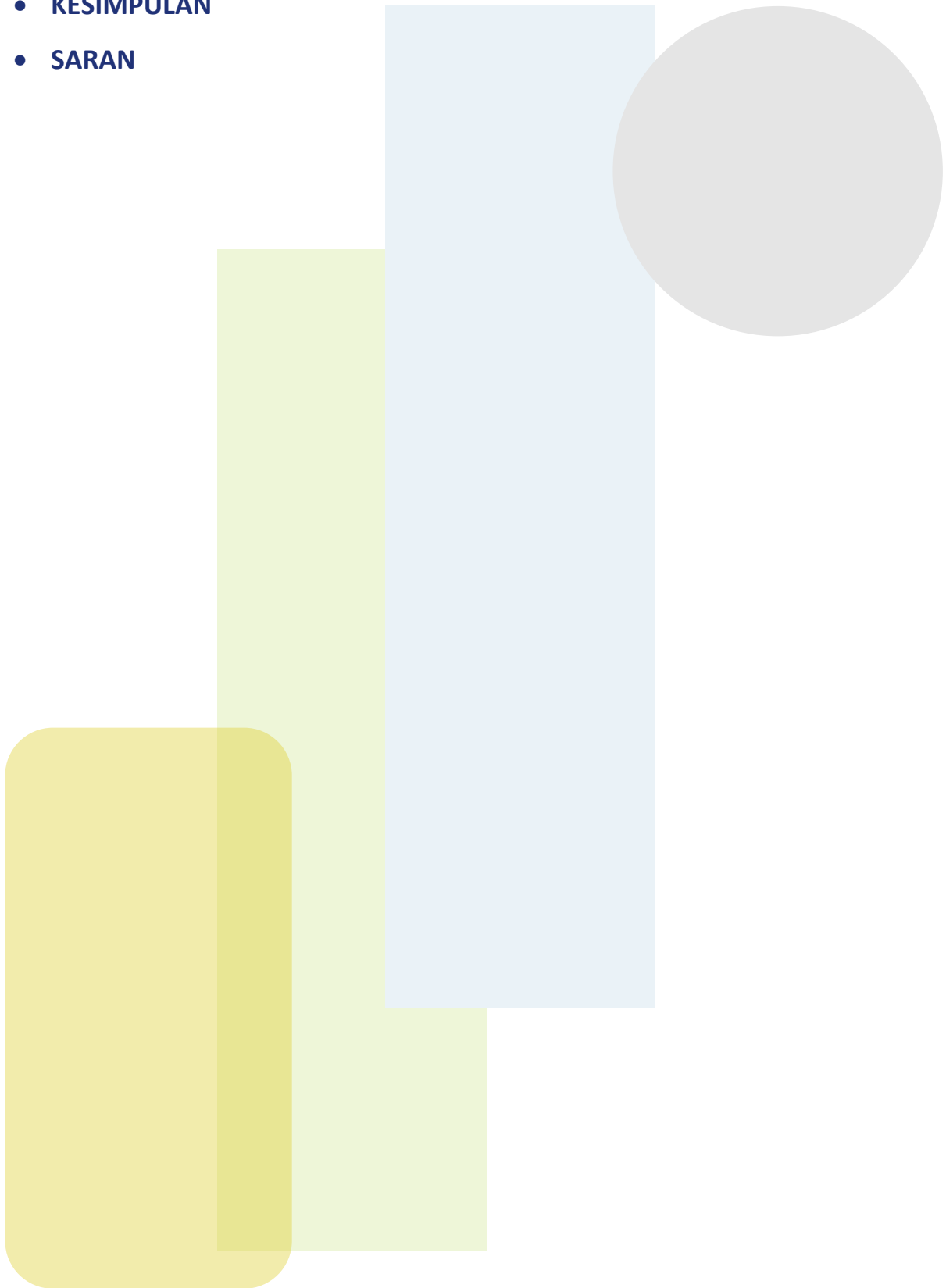
Gambar 39 Inovasi Hymynaphogot Kelurahan Harapan Mulya Raih Juara 2 Dalam Ajang Jakarta Innovation Award 2024





BAB IV: PENUTUP

- **KESIMPULAN**
- **SARAN**



PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan fungsinya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus memperkuat layanan kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan perbaikan-perbaikan internal yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 mencapai target dengan capaian indikator kepuasan layanan kota administrasi sebesar 104.08%, capaian indikator kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan sebesar 101.5%, dan capaian Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi sebesar 106.86%. Sasaran khusus dan Sasaran operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 juga mencapai target dengan capaian rata-rata 100%.

Penyerapan anggaran Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 sebesar 95,69%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 73,14%, capaian output program 100%, nilai efisiensi 60,87%, nilai kinerja atas aspek implementasi 27,81%, nilai kinerja atas aspek manfaat 66,70%, dan nilai kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 94,51%.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengikuti penyederhanaan birokrasi dengan konsolidasi jabatan fungsional di tingkat Sekretariat Kota, peningkatan pola kerja kolaboratif antar bagian dan/ atau dengan suku dinas terkait. Transformasi tersebut didukung dengan menggunakan semua tools yang tersedia seperti aplikasi zoom, whatsapp group, serta aplikasi lainnya, secara optimal.

Pada manajemen SDM, jumlah pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat sejak tahun 2020 sampai 2024 turun 11,45%. Strategi yang dilakukan antara lain dengan mengadakan rekrutmen calon ASN untuk PNS dan PPPK, sebagian besar kebutuhan Calon ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diisi dari PNS. Kebutuhan Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta ini berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

SDM eksisting terus dibina dengan mengadakan pengembangan kompetensi dan mendorong minimal target 40 jam pelajaran dalam satu tahun untuk masing-masing pegawai.

Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilaksanakan mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Telah dilakukan penurunan/ cascading kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Walikota sampai ke tingkat sub kegiatan, sistem kerja kolaboratif antar bagian dan/ atau suku dinas/ badan, dan evaluasi kinerja per triwulan.

Evaluasi perencanaan kinerja periode 2018-2022 telah dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2023-2026 guna mendukung keberhasilan sasaran strategis Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.

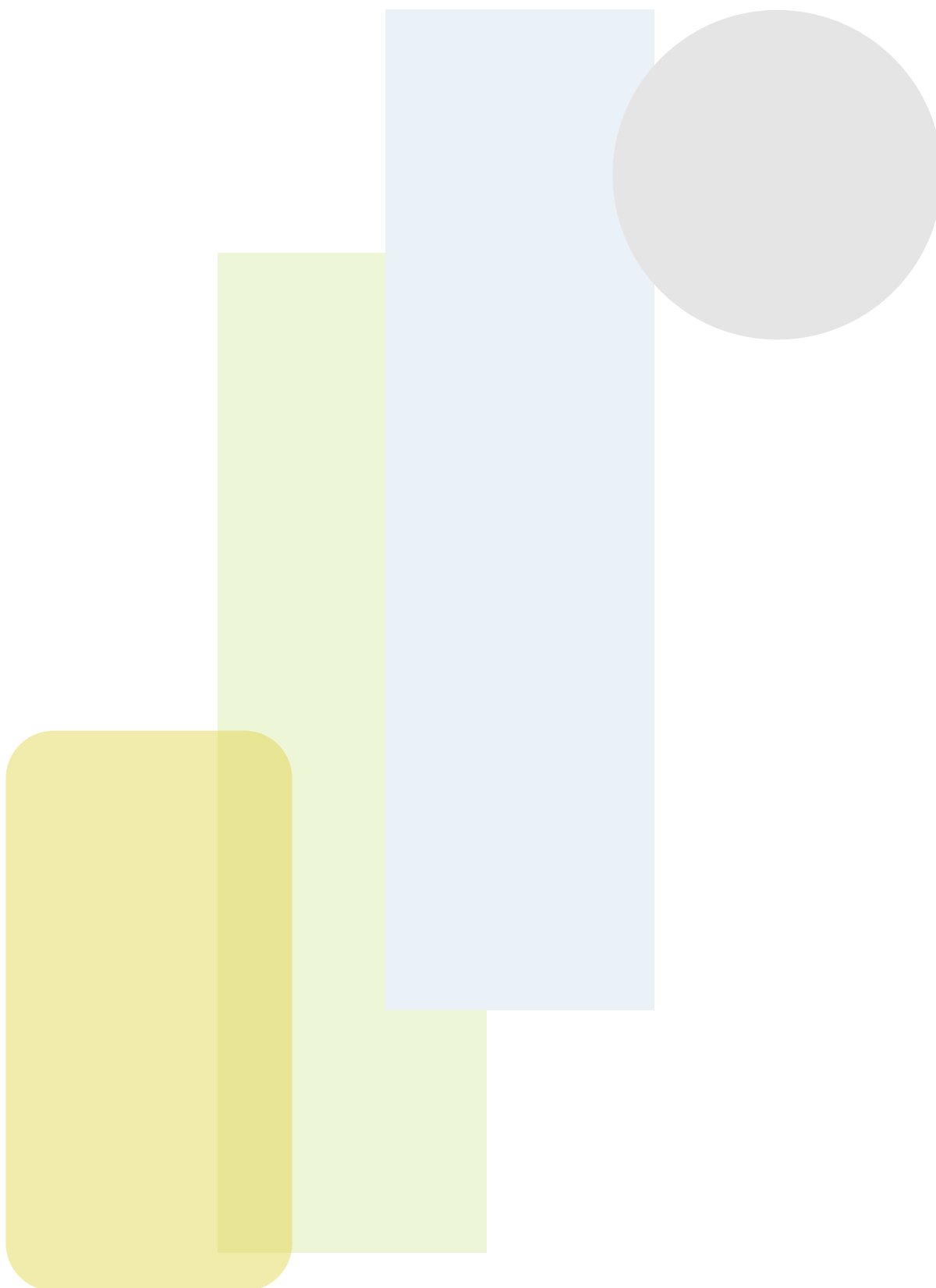
SARAN

Dalam hal kinerja internal Kota Administrasi Jakarta Pusat, dirasakan seluruh pihak terkait telah bekerja dengan cukup baik, namun tidak menutup dilakukannya perbaikan dalam beberapa hal:

1. Merujuk pada hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya maka, disarankan untuk memperbaiki indikator kinerja sasaran khusus yang masih bersifat output untuk menjadi outcome;
2. Menyusun Rencana Aksi untuk Indikator Kinerja Utama guna mendukung ketercapaian target kinerja yang lebih baik.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

Kategori	Nama	NIP	Jabatan	Instansi	Indikator Kinerja	Bentuk Data	Pengukuran Kinerja	Tahun					Tetapan	Keterangan
								2024	2025	2026	2027	2028		
Strategis	Dhany Sukma	197403091993111001	Walikota	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indikator Kinerja Utama (IKU) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-5000	<p>Uraian Kinerja</p> <p>Penetapan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan level kepuasan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.</p> <p>Tujuan</p> <p>Indikator kinerja utama ini menunjukkan tercapainya target nilai rata-rata pengisian dan level kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan di lingkungan dan wilayah kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p> <p>Metric Pengukuran</p> <p>Penetapan Pengukuran: Nilai diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan di lingkungan dan wilayah kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p> <p>Skala Data</p> <p>Skala Pengukuran: Nilai diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan di lingkungan dan wilayah kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p> <p>Skala Data</p> <p>Skala Pengukuran: Nilai diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan di lingkungan dan wilayah kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p>	80	85	90	95	100	80	
							80	85	90	95	100	80		
Strategis	Dhany Sukma	197403091993111001	Walikota	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indikator Kinerja Utama (IKU) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-5000	<p>Uraian Kinerja</p> <p>Penetapan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan level kepuasan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.</p> <p>Tujuan</p> <p>Indikator kinerja utama ini menunjukkan tercapainya target nilai rata-rata pengisian dan level kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan di lingkungan dan wilayah kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p> <p>Metric Pengukuran</p> <p>Penetapan Pengukuran: Nilai diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan di lingkungan dan wilayah kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p> <p>Skala Data</p> <p>Skala Pengukuran: Nilai diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan di lingkungan dan wilayah kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p>	80	85	90	95	100	80	
							80	85	90	95	100	80		

No	Isi	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahun					Tahun	Rata-rata
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	1.000	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	100	100	100	100	100	100	100
2	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	1.000	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	100	100	100	100	100	100	100

No	Isi	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahun					Tahun	Rata-rata
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	1.000	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	100	100	100	100	100	100	100
2	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	1.000	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	100	100	100	100	100	100	100

No	Isi	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahun					Tahun	Rata-rata
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	1.000	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	100	100	100	100	100	100	100
2	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	1.000	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	100	100	100	100	100	100	100

Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN TARGET KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendorong ketercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di mana masih terdapat penekapan Target Kinerja Tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi Target Kinerja Tahun sebelumnya, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penetapan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
- b. terhadap target yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Forum Asisten Sekretaris Daerah dan belum mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 wajib disesuaikan dengan ketentuan, Target Kinerja Tahun 2024 sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023; dan
- c. terhadap penyesuaian target sesuai dengan huruf b, selanjutnya perlu dilakukan revisi pada Rancangan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang akan ditandatangani ulang oleh pejabat yang berwenang.

KEDUA : Melakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Kepala Perangkat Daerah:
 - 1) menyesuaikan Target Kinerja Tahun 2024 pada Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja; dan

2

2) menindaklanjuti arahan supervisi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

- 1) melakukan inventarisasi terhadap penetapan Target Kinerja Tahun 2024 yang belum mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
- 2) menyusun jadwal dan mekanisme, memfasilitasi, melakukan supervisi serta memantau penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja; dan
- 3) merumuskan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024.

c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan penandatanganan konsep final penyesuaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Pejabat Gubernur DKI Jakarta.

d. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda agar menghimpun konsep final Perjanjian Kinerja (asas-asas strategis, sasaran khusus, dan sasaran operasional) yang akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses penandatanganan oleh Pejabat Gubernur DKI Jakarta.

e. Para Kepala Biro Setda sesuai bidang tugasnya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengoordinasikan dan menghimpun konsep final penyesuaian Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di bawah koordinasinya serta menyampaikan konsep tersebut kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda.

KETIGA : Finalisasi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan penyesuaian Target Kinerja Tahun 2024 pada Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selambiat-lambatnya pada bulan April tahun 2024.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2023 serta upaya meningkatkan capaian Nilai AKIP Tahun 2024.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2024



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



PENGHARGAAN

<p>Penghargaan Adipura Tahun 2023 kategori Kota Metropolitan: Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kementerian LHK RI)</p>	
<p>Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) 2024 Proklam Utama:</p> <ul style="list-style-type: none">• RW 01 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir• RW 06 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir• RW 12 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran <p>SK No. 893 Tahun 2024 Tanggal 29 Juli 2024 Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif Proklam Lestari Tahun 2024 dari Kementerian LHK RI</p>	
<p>Penghargaan Stan Performa Terbaik dalam Pameran Flora & Fauna Jakarta 2024</p>	

	
<p>Paralegal Justice Award 2024: Muhammad Hari Ananda (Lurah Karet Tengsin)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 Peserta Favorit Publik per Region • Non Litigation peace maker, sebagai Kepala Desa/Lurah yang memperoleh anugerah Non Litigation Peacemaker atas peran aktifnya dalam penyelesaian Sengketa/Konflik di Desa/Kelurahan • Anubhawa Sasana Jagadditha. Desa/Kelurahan yang memperoleh Anugerah Anubhawa Sasana Jagaddhita yang telah berperan aktif dalam upaya Kelayakan Investasi, Peningkatan Sektor Pariwisata dan Pembukaan Lapangan Kerja 	
<p>Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024 (BPJS Kesehatan)</p>	
<p>Penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta atas suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</p>	

	
<p>Posyandu Inovasi Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2024: Posyandu Mawar Melati Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih</p> <p>Juara 1 Kader Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2024: Melita Selviasari (Posyandu Aster 7c kelurahan Cideng)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Juara 1 Tingkat Nasional Lomba Vlog Pokja IV: TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat • Juara Harapan Vlog Nasional: TP PKK Sumur Batu dan TP PKK Kebon Kosong • Juara Terbaik ke-2 Nasional Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (KGSTTB) 	

Posyantek Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024: Posyantek Rosella Kelurahan Kebon Kosong



Juara I Lomba Peragaan Busana Kategori PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta: Ketua TP PKK Kelurahan Karet Tengsin Lia Amalia



Juara Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari Tingkat Provinsi DKI Jakarta: Kelurahan Cikini



- Juara III Lomba Festival Beduk Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024: Kelurahan Kemayoran
- Juara Harapan II Lomba Beduk Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024: Kelurahan Galur




Desa Wisata Proklam Lestari Kampung Samtama RW. 03 CPT telah masuk dalam 300 besar Desa Wisata Terbaik “Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024”



Penghargaan IMDI Kemkominfo Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2024



	
<p>Jakarta Pusat Sabet Enam Selempang di Final Abnon Tingkat Provinsi yaitu: juara 2 dan 3 none sedangkan harapan 1, 2, 3 Abang, serta harapan 3 none</p>	
<p>Hyminaphogot Kelurahan Harapan Mulya Raih Juara 2 Dalam Ajang Jakarta Innovation Award</p>	

	
<p>Ajang Anugerah Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL) 2024 Sekolah Adiwiyata :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDN GSS 01 2. SMPN 01 CIKINI 3. SMPN 18 MENTENG 4. SMPN 60 GAMBIR 5. SD GAMBIR 01 6. SMPN 70 BENHIL 7. SMK 31 JOHAR BARU 8. SMAN 30 JAKARTA <p>Proklim :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RW 08 TANAH TINGGI 2. RW 04 DURI PULO 3. RW 03 KARTINI 4. RW 03 MENTENG 5. RW 06 CPB <p>BPS RW :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RW 08 KENARI 2. RW 06 PETOJO UTARA <p>MAGGOT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RW 04 RAWASARI <p>BANK SAMPAH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RW 12 CPB 	
<p>Penghargaan pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RW 11 Kelurahan Cempaka Putih Barat dalam Kampung Siaga TBC meraih Juara III, 2. RT 10 RW 09 Kelurahan Johar Baru dalam Kampung Bebas Asap Rokok sebagai Juara III, 3. RW 5 Kelurahan Harapan Mulya dalam Kampung Bebas Jentik sebagai Harapan I 	

Penghargaan Predikat Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024



Peringkat Pertama Kategori Komunikasi Publik Dalam Anugerah Humas Jakarta 2024



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Walikota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menerima Pin Siddhakarya Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta, Siddhakarya merupakan penghargaan tertinggi Tingkat Provinsi di bidang produktivitas.



Walikota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menerima Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Peringkat Pertama dalam Kategori Kota/Kabupaten.



Kota Administrasi Jakarta Pusat Mendapatkan Piagam Penghargaan Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Bapak Musa Rustam Sekretaris Kelurahan Petojo Utara sebagai Pemenang 5 Terbaik Seleksi Inovasi PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan Inovasi "Harmul Eco-Village".



Kelurahan Pegangsaan masuk 3 besar dalam rangka cepat respon penanganan pengaduan melalui CRM, dan Kelurahan Paseban menjadi kelurahan terbaik dalam rangka penataan kawasan di wilayah Jakarta Pusat.



Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia terkait penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024 dengan nilai 97,98 masuk Zona Hijau Kualitas Tertinggi.



Lurah Kelurahan Kampung Rawa Bapak Ferry Zahrudin, SE, MA atas penerimaan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penganugerahan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Money) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.



Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih peringkat 6 Nasional Kategori Pemerintah Daerah pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan Indeks Pelayanan Publik Kota 4.66 Kategori A / Pelayanan Prima



Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2024
Kelurahan Kebon Kosong meraih Juara 4



Lomba RT/ RW Terbaik Tertib Administrasi Kependudukan
Tingkat Provinsi Tahun 2024



KUESIONER

Kepuasan Masyarakat

JakSurvei Platform survei yang inovatif

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DKI JAKARTA SEMESTER 1 TAHUN 2024

Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Indikator. Pelayanan yang menjadi salah satu Indikator tersebut adalah Pembinaan dan Apresiasi terhadap dan Reformasi Birokrasi (Pembinaan dan Apresiasi).
Survei Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tujuan dan Maksud Penelitian:

1. Terukur tingkat kepuasan pelayanan
2. Mendapatkan masukan masyarakat
3. Terjalinnya keterbacaan dan kesungguhan di setiap unit pelayanan, sehingga dapat memformulasikan Rencana Tindak Lanjut bagi Penyelenggara
4. Dapat memberikan umpan balik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan
5. Dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
6. Sebagai dasar dalam merencanakan peningkatan pelayanan pada tahun berikutnya

Kerangka:
Kerangka dan fondasi Aksi dalam survei ini akan menjadi bahan pertimbangan layanan Pemerintah DKI Jakarta di masa akan datang. Data yang telah akan dipaparkan dan hanya digunakan sebagai bahan kerja kami saja.

[Berikutnya](#)

DEMOGRAFI RESPONDEN

Kecamatan
 Pilih salah satu dari jawaban berikut

Kecamatan
 Pilih salah satu dari jawaban berikut

Kecamatan
 Pilih salah satu dari jawaban berikut

Instansi yang Diteliti
 Pilih yang sesuai

PMPD

Kantoran Umum

RTMKA

Juruwika

Puskawita

Dwi

RTM/RTM/RTM/RTM/RTM

Profil Responden

Nama Responden

Nomor HP Responden

• Masukkan nomor yang dimasukkan di awal dengan format XXX

(Contoh: 8 1234 5678 9 harusnya akan muncul 8123456789)

Contoh: 8123456789

• Masukan nomor format jawaban anda.

Jenis Kelamin

Perempuan Laki-laki

Usia Responden

Pendidikan Terakhir Responden

• Pilih salah satu dari pilihan di bawah ini

- Tidak Pernah Sekolah
- Sekolah Dasar (SD) / Setingkat
- SMP / Setingkat
- SMA / Setingkat
- Diploma (D) / Di / Setingkat
- Sarjana (S)
- Magister (S)
- Doktor (D)

*** Pekerjaan Responden**

1 Pilih salah satu dari jawaban berikut

2 Jika pilih Lainnya, sertakan nama instansi

- Pegawai Mahasiswa
- Mahasiswa
- TNI
- POLRI
- Swasta
- Wirausaha/Tanggung Jawab Perseorangan
- Tenaga Kerja
- Di Rumah Tangga
- Pegawai swasta
- Pegawai pemerintah umum
- Kepala Perangkat MT dan RW
- Kode Pegawai pemerintah
- Lainnya:

Pilihlah jawaban yang menurut anda sesuai

*** F1. Persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah**

1 Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*** F2. Prosedur mendapatkan pelayanan mudah**

1 Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F3. Waktu pelayanan selesai dengan cepat dan hasilnya sesuai yang diharapkan

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F4. Tidak ada biaya untuk mendapatkan pelayanan

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F5. Hasil kerja petugas umumnya baik dan memuaskan

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F6. Kompetensi petugas mendukung kelancaran penyelesaian semua pekerjaannya

● Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F7. Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat

① Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F8. Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik

① Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

*F9. Sarana dan prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik

① Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak setuju
- Setuju
- Sangat setuju

SURVEI INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DKI JAKARTA TAHUN 2023

Kepada Yth. TA B05 Jakarta,

Bapak/Ibu Token testing

Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi terdiri dari 9 Indikator Pelayanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permendagri) RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tujuan dan Manfaat survei:

1. Mengetahui sejauh mana pelayanan koordinasi
2. Teridentifikasi seluruh masalah koordinasi (peta LSPD)
3. Terdapat tindakan dan perubahan kebijakan koordinasi, sehingga dapat merestrukturisasi Rencana Kerja Lanjut dan Pertindakannya
4. Diperolehnya data pendukung untuk membimbing unit pelayanan koordinasi agar lebih sesuai dalam menyelenggarakan pelayanan koordinasi
5. Diperolehnya data pendukung dalam pemrosesan kegiatan re-look/peningkatan pelayanan koordinasi
6. Diperolehnya uraian dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan koordinasi pada tahun berikutnya

Perhatian:

Partisipasi dan isian Anda dalam survei ini akan menjadi bahan perbaikan layanan koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi di masa yang akan datang. Data pribadi Anda akan dijaga kerahasiaannya, tidak dipublikasikan, dan hanya digunakan sebagai kebutuhan analisis pada survei ini.

Activate V
Go to Setting

Berikutnya

Demografi

42 Jenis kelamin



43 Usia

Pilih salah satu dan jawaban berikut

- <17 Tahun
- 17-25 Tahun
- 26-35 Tahun
- 36-45 Tahun
- 46-55 Tahun
- >55 Tahun

Activate V
Go to Setting

44 Pendidikan Terakhir

Pilih salah satu dan jawaban berikut

• A1 Pembinaan Tersebut

Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Tidak Pernah Sekolah
- Taman Kanak-kanak (TK) Sederajat
- Sekolah Dasar (SD) Sederajat
- SMP Sederajat
- SMA/ Sederajat
- Diploma D3/D4 Sederajat
- Sarjana S1
- Magister S2
- Doktor S3

• A2 Kota/Kabupaten tempat Anda bekerja

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Hasap ptt...

Activate V
Go to Setting

• A3 Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan siapa Anda berkoordinasi?

• A4 Kota/Kabupaten tempat Anda bekerja

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Pertanyaan ini wajib diisi

Jakarta Pusat

• A5 Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan siapa Anda berkoordinasi?

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Pertanyaan ini wajib diisi

Jenderal Sekretaris Kota Bidang Pemerintahan

• A6 DPRD tempat Anda bekerja

Pilih salah satu dari jawaban berikut

Hasap ptt...

Hasap ptt...

- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi**
- Suku Badan Kesegawaan Kota Administrasi
- Suku Badan Kearsufan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
- Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi
- Suku Dinas Penanggulangan Kebersihan dan Penyelamatan Kota Administrasi
- Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Berikutnya
Activate V
Go to Setting

Pendapat Responden Tentang Asisten Sekretaris Kota

Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan pengalaman Anda saat berkoordinasi dengan asisten sekretaris kota/kabupaten Anda!

• E1.1. Mudah ketika nggih berkoordinasi. Ideal-ada syarat tertentu yang harus di penuhi.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

• E2.2. Mudah dikontak atau ditemui, baik berkelembat saat berkoordinasi.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

Activate M
Go to Setting

• E3.3. Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, terutama selama proses koordinasi hingga selesai.

• Misalnya: cepat menjerawat telepon atau membalas pesan teks/whats.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

• E4.4. Tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

Activate M
Go to Setting

• E5: 5. Tidak dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi.

• Misalnya: memberikan informasi yang relevan sesuai dengan kriteria permasalahan.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

• ISK 5. Tepat dalam menerima segala sesuatu selama proses koordinasi.

• Memilih: memberikan informasi yang relevan, sesuai dengan kriteria permasalahan.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

• ISK 6. Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah dibagikan bersama.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

• ISK 7. Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

Activate M
Go to Setting

• ISK 8. Mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

• ISK 9. Mampu mengontrol informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

• ISK 10. Mampu melakukan informasi ketika ada data pihak yang mengaburkannya.

• Pilih salah satu dari jawaban berikut:

Activate M
Go to Setting

002 9. Menjaga keamanan informasi berdasar sisi pihak yang menguburkannya.

Pilih salah satu dari jawaban berikut.

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

071 10. Selalu mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/perjelas selama proses koordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut.

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

072 11. Menghindari situasi informasi yang sempang-pun selama proses koordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut.

- Sangat Tidak Setuju

Activate V
Go to Setting

071 11. Menghindari situasi informasi yang sempang-pun selama proses koordinasi.

Pilih salah satu dari jawaban berikut.

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

00 12. Mengprosek rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi.

Melakukn langkah-langkah strategis

Pilih salah satu dari jawaban berikut.

- Sangat Tidak Setuju
- Tidak Setuju
- Setuju
- Sangat Setuju

Activate V
Go to Setting

09 13. Menyediakan forum komunikasi yang dapat digunakan selama proses koordinasi.

Melakukn grup WA.

ID 12. Menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi.

Maksimal 5 menit.

Menyiapkan satu dan jawaban berikut:

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Sebelumnya

Berikutnya [State W](#)
[Setting](#)

Saran dan Masukan

Tuliskan saran dan masukan Anda selama berkoordinasi dengan sekretaris kota/kecamatan Anda!

Di Saran dan masukan:

Sebelumnya

Kirim

DATA PENDUKUNG

Dasar perhitungan yang digunakan

1. capaian output program menggunakan rumus:

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator Output Program } j}{\text{Target Indikator Output Program } j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Maksimal 100%

Keterangan:

COP: capaian output program tingkat unit eselon I

RIOPj: realisasi indikator output program j

TIOPj: target indikator output program j

l: jumlah program pada suatu unit eselon I

m: jumlah output program suatu program

n: jumlah indikator suatu output program

2. penyerapan anggaran

$$R = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P: penyerapan anggaran

RA: Realisasi anggaran

AA: alokasi anggaran

3. Efisiensi

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^n (AAP_{Program i} \times COP_i) - RAP_{Program i}}{\sum_{i=1}^n (AAP_{Program i})} \times 100\%$$

Keterangan:

EOP: efisiensi output program tingkat unit eselon I

AA Program: alokasi anggaran program i

RA Program: realisasi anggaran program i

COPi: capaian output program i

n: jumlah program pada suatu unit eselon I

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Batas maksimal nilai efisiensi menggunakan rumus ini adalah 20% dan batas minimal -20%. Untuk mengubah Nilai Efisiensi ke skala 0-100%, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

NE: nilai efisiensi

E: efisiensi

4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDKn - [RPDKn - RAKn]}{RPDKn} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

NE: nilai efisiensi

E: efisiensi

Data-data, adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran

No	Bulan	RPD	Realisasi
1	2	3	4
1	Januari	19,051,399,262	22,368,182,405
2	Februari	54,491,662,113	59,207,523,152
3	Maret	55,089,301,033	56,540,691,398
4	April	79,106,676,552	82,792,894,447
5	Mei	56,803,557,573	57,841,746,420
6	Juni	68,501,855,116	66,087,650,132
7	Juli	56,846,688,858	56,656,306,553
8	Agustus	54,807,350,833	56,126,069,300
9	September	57,649,415,523	53,013,139,622
10	Oktober	54,864,374,271	53,724,324,736
11	November	53,313,618,516	65,926,993,648
12	Desember	136,001,201,978	90,888,075,982
		746,527,101,628	721,173,597,795

No	Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya pengelolaan kecamatan dan kelurahan yang optimal	Indeks Kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	4
			Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan layanan PPSU	4	4
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	4	4
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	80	82
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4
5	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	85	95.8
			Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	85	90.63
			Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	85	84.61

Nilai Kinerja Tingkat Unit Eselon I

Penilaian Kinerja tingkat unit eselon I dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit eselon I terkait.

b. Nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I

$$NKA MI = (NKA \times W_i) + (CSS \times W_m)$$

Keterangan:

NKA M_i = nilai Kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I

NKI = nilai kinerja atas aspek implementasi

CSS = capaian sasaran strategis (rumus dalam peraturan Menteri Keuangan menggunakan CSP)

W_i = bobot aspek implemntasi

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

W_m = bobot aspek manfaat

Bobot masing-masing aspek sebagai berikut:

Aspek implementasi (W_i) = 33,3% terdiri atas

$W_p = 9,7\%$

$W_k = 18,2\%$

$W_{ck} = 43,5\%$

$W_e = 28,6\%$

Aspek manfaat (W_m) = 66,7%

- c. Nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit Eselon I terkait.

$$NKA = (NKA MI + rata - rata nilai satker)/2$$

Keterangan:

NKA = nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I

NKA MI = nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit es I

SK Tim Penyusunan LKIP



4

MEMORANDUM

Subjek: KEGIATAN WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TERKAIT PERENCANAAN TM SELAM PELAJARAN POKY/BAKAL LAYANAN KEMERIA, INTISARI PROGRAM/TAJUK ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

ISI: Menyetujui TM serta Pelaksanaan Program Kerja Tahunan (PKT) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 sebagai berikut:

REVISI: TM Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2024 akan disusun sebagai lampiran pada pengantar dan surat perintah kepada instansi/instansi terkait Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024.

ALASAN: TM Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2024 akan disusun sebagai lampiran pada pengantar dan surat perintah kepada instansi/instansi terkait Kota Administrasi Jakarta Pusat.

REKOMENDASI: Disarankan Walikota untuk menyetujui pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Daftar:

1. Pl. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Pl. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Perwakilan Kota Administrasi Jakarta Pusat

4

**LAMPIRAN KEGIATAN WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : 14-006/TAHUN 2024
TANGGAL : 9 Januari 2024**

TEMAT:
PERENCANAAN TM SELAM PELAJARAN POKY/BAKAL LAYANAN KEMERIA DITANAM PERENCANAAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

ISI: KEGIATAN TM SELAM PELAJARAN POKY/BAKAL LAYANAN KEMERIA DITANAM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

Revisi: Melampirkan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Revisi/Revisi: Melampirkan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Revisi I: Asas Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Revisi II: Asas Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Revisi III: Asas Perencanaan dan Pengembangan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Revisi IV: Asas Perencanaan, Pengembangan dan Pelaksanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Revisi V: 1. Landasan Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Dasar Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Asas Perencanaan dan Pengembangan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Dasar Perencanaan, Pengembangan dan Pelaksanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Asas Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Para Asas Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Para Asas Kota Administrasi Jakarta Pusat

Revisi VI: 1. Asas Perencanaan, Pengembangan dan Pelaksanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Berita Acara Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024

**BERITA ACARA MELAKUKAN/MAKAIAN KEGIATAN PERENCANAAN STRATEGIS KEGIATAN PERENCANAAN BAKAL LAYANAN KEMERIA
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PERENCANAAN BAKAL LAYANAN KEMERIA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Berita Acara ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan implementasi manajemen risiko di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

NO	PENJELASAN PERISTIWA	PERSELESAIAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO		HASIL VERIFIKASI GEDSI INSPEKTORAT		
		DAFTAR	DAFTAR	Selesai	Tidak Selesai	Kategori
1	Dokumen Laporan Perencanaan Risiko TM II	100%	100%	✓		
2	Dokumen Laporan Perencanaan Risiko TM II dan Laporan Perencanaan Risiko Tahunan	100%	100%			
3	Tujuan (untuk pengoperasian yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan organisasi)	Perencanaan	100%			
4	Prosedur (untuk yang dipertahankan secara terencana)	Perencanaan	100%			
5	Kelembagaan (untuk yang terencana secara terencana)	Perencanaan	100%			

Strategi:

- Target Dokumen yang Terencana secara terencana dan terencana
- Perencanaan yang dilaksanakan TM II dan TM IV sebagai lampiran pada pengantar dan surat perintah



